



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

LKj

# Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2018



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI JAMBI TAHUN 2019

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2018 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2018. Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2018 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun ketiga dalam masa RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. LKj Tahun 2018 disusun berdasarkan RKPD Tahun 2018 yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Tahun 2016-2021).

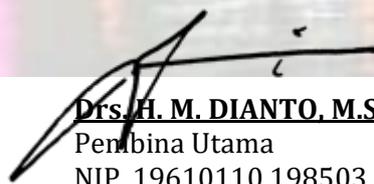
LKj Pemerintah Provinsi Jambi disusun berdasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKj Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Pemprov Jambi. Komitmen dalam penyusunan LKj Pemerintah Provinsi Jambi, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2018 terdiri atas: Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, geografis, sisi historis, demografis, kinerja ekonomi, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Pemprov Jambi. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Pemprov Jambi pada tahun 2018.

Kami sadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang sehingga Jambi TUNTAS yang diharapkan bisa terwujud. Berkenaan dengan itu, LKj Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2018 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Jambi, Maret 2019

**a.n. Gubernur Jambi**  
**SEKRETARIS DAERAH**



**Drs. H. M. DIANTO, M.Si**  
Pembina Utama  
NIP. 19610110 198503 1 005

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Gambaran Umum Daerah .....	1
1.2.1 Kedudukan dan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan .....	2
1.2.2 Kondisi Geografi dan Demografi.....	2
1.2.3 Kondisi Ekonomi.....	7
1.3 Isu Strategis.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
2.1 Rencana Strategis .....	13
2.1.1 Visi dan Misi.....	13
2.1.2 Tujuan , Sasaran, Indikator Kinerja .....	15
2.2 Perjanjian Kinerja.....	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	39
3.1 Capaian Kinerja .....	39
3.1.1 Capaian IKU.....	40
3.1.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	43
3.2 Realisasi Anggaran.....	147
BAB IV PENUTUP.....	151

### LAMPIRAN:

Pernyataan Reviu APIP atas LKJ Provinsi Jambi Tahun 2018

Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian penting untuk menjamin pemerintahan telah berjalan demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2018 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, serta mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.

Penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Sedangkan pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Pemerintah Provinsi Jambi.

### 1.2 Gambaran Umum Daerah

#### *Bab I Berisi:*

- 1.1 Latar Belakang*
- 1.2 Gambaran Umum Daerah*
  - 1.2.1 Kedudukan dan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan*
  - 1.2.2 Kondisi Geografi dan Demografi*
  - 1.2.3 Kondisi Ekonomi*
- 1.3 Isu Strategis*

### **1.2.1 Kedudukan dan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan**

Pemerintah Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 57 dan 58, penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jambi terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Dalam penyelenggaraannya, Pemerintah Provinsi Jambi berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggara negara;
- c. Kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efisiensi;
- i. Efektivitas; dan
- j. Keadilan.

### **1.2.2 Kondisi Geografi dan Demografi**

Luas wilayah Provinsi Jambi tercatat 53.435,92 Km<sup>2</sup> yang terbagi atas luas daratan 48.989,98 Km<sup>2</sup> dan luas lautan 4.445,94 Km<sup>2</sup> serta dengan panjang garis pantai 223,025 km. Luas wilayah daratan terbesar di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Merangin sebesar 7.508 km<sup>2</sup> atau sebesar 15,31 % dari total luas wilayah

Provinsi Jambi, diikuti oleh Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun masing-masing sebesar 6.205 km<sup>2</sup> dan 5.948 km<sup>2</sup>.

Tabel 1.1 Luas Wilayah Provinsi Jambi

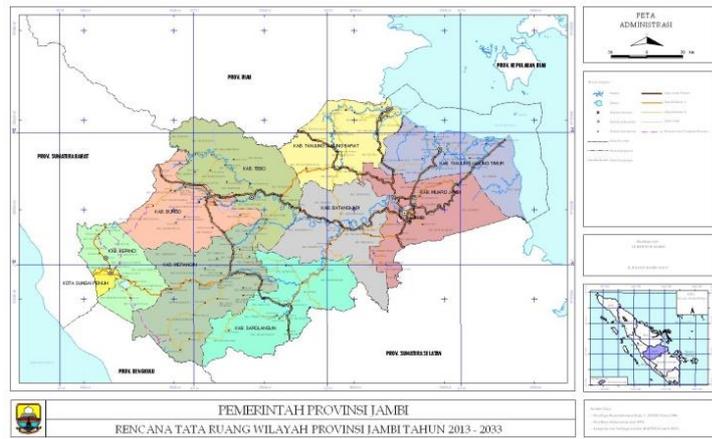
No	Kabupaten/Kota	Luas (Km <sup>2</sup> )	
1	Kerinci	3.334,99	
2	Merangin	7.508,23	
3	Sarolangun	5.948,73	
4	Bungo	4.673,16	
5	Tebo	6.205,81	
6	Batanghari	5.536,86	
7	Muaro Jambi	5.321,67	
8	Tanjung Jabung Barat	Darat	4.990,95
		Laut	384,21
9	Tanjung Jabung Timur	Darat	4.943,36
		Laut	4.061,73
10	Kota Sungai Penuh	353,76	
11	Kota Jambi	172,26	
<b>Jumlah daratan</b>		<b>48.989,98</b>	
<b>Jumlah lautan</b>		<b>4.445,94</b>	
<b>Total</b>		<b>53.435,92</b>	

Sumber: RTRWP Jambi 2013-2033, 2013

### 1.2.2.1 Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Provinsi Jambi terletak diantara 0° 74' - 2° 46,16' Lintang Selatan dan 101° 12' - 104° 44' Bujur Timur. Provinsi Jambi terletak pada Bagian Tengah Pulau Sumatera, berhadapan dengan Selat Karimata dan Selat Berhala serta berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan lalu lintas

Gambar 1-1 Peta Provinsi Jambi



internasional. Posisi ini menjadikan Provinsi Jambi masuk dalam rencana pembangunan tol laut di Indonesia serta menjadi provinsi yang cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu

IMS-GT (*Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle*).

### 1.2.2.2 Topografi

Provinsi Jambi memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 m dpl di bagian timur sampai pada ketinggian di atas 1.000 m dpl, ke arah barat morfologi lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.

Tabel 1.2 Klasifikasi Ketinggian di Provinsi Jambi

Topografi/ Ketinggian (m/dpl)	Luas		Wilayah/ Kabupaten
	Ha	%	
1	2	3	4
Dataran Rendah (0 - 100 )	3.431.165	67	Kota Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Merangin, Batang Hari
Dataran sedang (100 - 500)	903.180	17	Sebagian Sarolangun, Tebo, sebagian Batang Hari, Kota Sungai Penuh, Merangin, sebagian Tanjung Jabung Barat,
Dataran Tinggi (> 500)	765.655	16	Kerinci, Kota Sungai Penuh, sebagian Merangin, sebagian Sarolangun dan sebagian Bungo
Jumlah	5.100.000	100	

Sumber : RTRWP Jambi 2013-2033, 2013

### 1.2.2.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Adapun Kawasan Strategis Nasional yang termasuk dalam kawasan wilayah Provinsi Jambi meliputi:

- Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan)
- Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi)
- Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau)
- Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (Provinsi Jambi)

Untuk Kawasan Strategis Provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi. Penetapan kawasan strategis Provinsi Jambi lebih didasari oleh aspek pertumbuhan ekonomi adalah:

- Kawasan Muara Bulian - Jambi dan Sekitarnya
- Kawasan Strategis Perkotaan Muaro Bungo dan Perkotaan Sungai Penuh
- Kawasan Strategis Pantai Timur Provinsi Jambi - Kawasan Tanjab Barat dan Tanjab Timur
- Kawasan strategis Bangko – Sarolangun

Sementara Kawasan strategis Provinsi Jambi dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah :

- Kawasan wisata sejarah Candi Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi
- Kawasan Permukiman Suku Anak Dalam di Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun.

Sedangkan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi adalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Kabupaten Kerinci.

Luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya didominasi oleh Hutan Produksi Tetap dan Taman Nasional. Rincian luas kawasan hutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya yang terdiri dari, Cagar Alam 4.990 Ha, Taman Nasional 657.120 Ha, Taman Hutan Raya 33.943 Ha, Taman Wisata Alam 413 Ha, Hutan Lindung 112.722 Ha, Hutan Produksi Terbatas 264.034 Ha, Hutan Produksi Tetap 1.006.266 Ha, dan Hutan Lindung Gambut 60.810 Ha.

#### 1.2.2.4 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Jambi berdasarkan Jambi Dalam Angka Tahun 2017 yang dirilis oleh BPK adalah sebanyak 3.515.017 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 70,08 jiwa/km<sup>2</sup> dengan kepadatan tertinggi berada di Kota Jambi sebesar 2.877,54 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kota Sungai Penuh sebesar 227,12 jiwa/km<sup>2</sup>. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi tahun 2016-2017 adalah sebesar 1,62 persen per tahun dengan rata pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Muaro Jambi sebesar 2,64 persen dan terendah di Kabupaten Kerinci sebesar 0,42 persen.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2013-2017

No	Kabupaten / Kota	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kerinci	236,762	234,003	234,882	235.800	236.782
2	Merangin	358,530	360,187	366,315	372.200	377.905
3	Sarolangun	267,549	272,203	278,222	284.200	290.231
4	Batang Hari	258,016	257,201	260,631	263.900	266.971
5	Muaro Jambi	376,619	388,323	399,157	410.340	421.179
6	Tanjab Timur	212,218	212,084	213,670	215.320	216.777
7	Tanjab Barat	301,469	304,899	310,914	316.810	322.527
8	Tebo	321,641	324,919	330,962	337.020	343.003
9	Bungo	329,934	336,320	344,100	351.880	359.590
10	Kota Jambi	569,331	568,062	576,067	583.490	591.134
11	Sungai Penuh	84,965	86,220	87,132	87,970	88.918
	<b>Provinsi Jambi</b>	<b>3,242,81</b>	<b>3,317,0</b>	<b>3,344,4</b>	<b>3,402,0</b>	<b>3.515.0</b>

Sumber: Jambi Dalam Angka 2018, 2018

Dilihat dari posisi kewilayahan barat dan timur, maka persentase distribusi penduduk di kedua wilayah tersebut terlihat relatif seimbang, yaitu 52,00 persen untuk wilayah timur (Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi), dan 48,00 persen untuk wilayah barat (Kerinci, Sungai Penuh, Merangin, Sarolangun, Bungo dan Tebo).

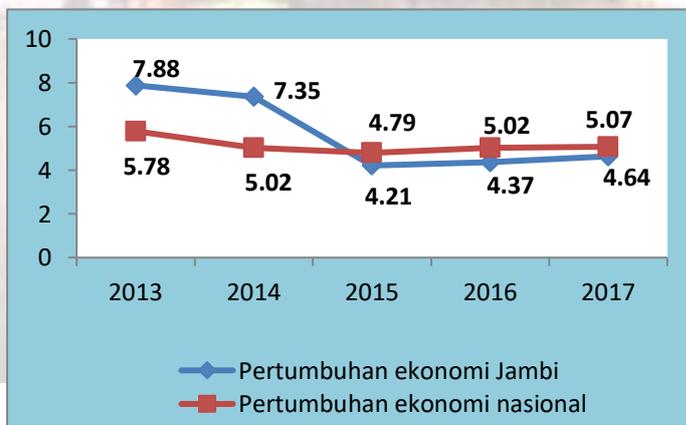
Tabel 1.4 Kepadatan Penduduk di Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
1	Kerinci	70.57
2	Merangin	49.21
3	Sarolangun	46.93
4	Batang Hari	46.00
5	Muaro Jambi	79.08
6	Tanjab Timur	39,81
7	Tanjab Barat	69.36
8	Tebo	53.09
9	Bungo	77.18
10	Kota Jambi	2,877.54
11	Sungai Penuh	227.12
<b>Jumlah</b>		<b>70.08</b>

Sumber: Jambi Dalam Angka 2018, 2018

## 1.2.3 Kondisi Ekonomi

### 1.2.3.1 Pertumbuhan PDRB

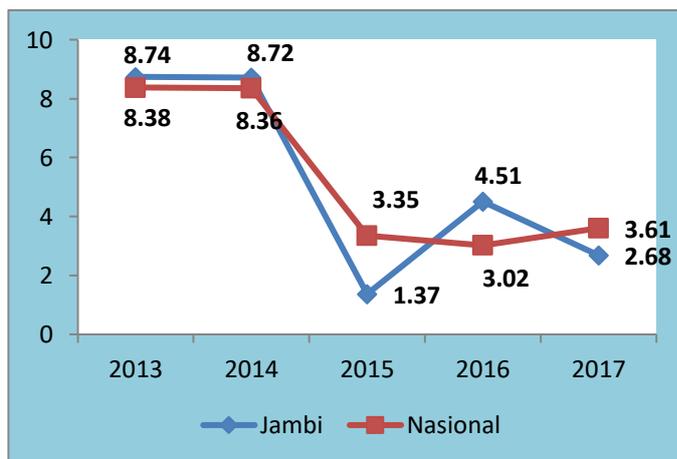


Gambar 1-2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi dibandingkan Nasional Tahun 2013 - 2017

Pembangunan Provinsi Jambi tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi, keduanya bersinergi dan saling terkait. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi Provinsi

Jambi sampai dengan triwulan III 2018 adalah sebesar 4,77% dan berdasarkan perhitungan Bank Indonesia selama tahun 2018 bertumbuh sebesar 4,59 – 4,99 %, mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang bertumbuh sebesar 4,64 %. Pertumbuhan ekonomi ini masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang diprediksi Bank Indonesia pertumbuhannya sebesar 5,1 – 5,4 % pada tahun 2018.

### 1.2.3.2 Inflasi



Gambar 1-3 Inflasi Provinsi Jambi dibanding Nasional Tahun 2013 - 2017

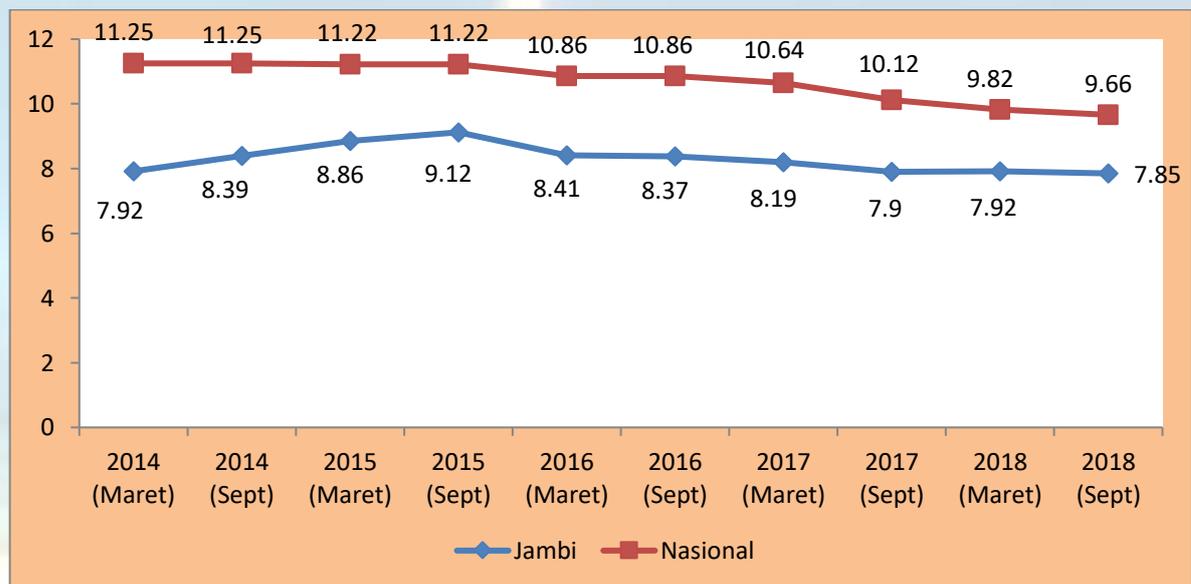
Inflasi menjadi indikator ekonomi yang penting terutama untuk fokus kesejahteraan masyarakat. Tingkat inflasi Provinsi Jambi Tahun 2018 adalah 3,02 persen, di bawah tingkat inflasi nasional yang berada pada 3,13 persen. Inflasi ini meningkat bila dibandingkan dengan inflasi tahun 2017 yang berada di angka 2,68. Hal ini disebabkan oleh kenaikan indeks

harga pada hampir semua kelompok pengeluaran yaitu kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; kelompok sandang; kelompok kesehatan; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga; serta kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan.

### 1.2.3.3 Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan

Masalah kemiskinan banyak dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang telah lama menjadi isu sentral. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi antara lain kelebihan penduduk, tidak meratanya distribusi sumberdaya ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup dan standar hidup yang tinggi,

pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak memadai, dan degradasi lingkungan. Pada banyak kasus, penyebab dan dampak kemiskinan saling berinteraksi, jadi apa yang membuat penduduk miskin juga menciptakan kondisi yang membuat mereka tetap miskin. Kemiskinan bisa menjadi penghambat pembangunan di masa mendatang yang akan berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini.



Gambar 1-4 Angka Kemiskinan Provinsi Jambi dibandingkan Nasional Tahun 2014-2018

Berdasarkan Berita Resmi yang diekspos BPS, dalam kurun waktu Maret-September 2017, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi terjadi penurunan. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 2,13 ribu orang (dari 120,62 ribu orang pada Maret 2017 menjadi 118,49 ribu orang pada September 2017), demikian pula jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang dari 165,93 ribu orang pada Maret 2017 menjadi 160,11 ribu orang pada September 2017 atau terjadi penurunan sebanyak 5,81 ribu orang.

### 1.3 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan suatu wilayah dimasa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Isu – isu strategis yang menjadi perhatian Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. **Tata kelola pemerintahan masih memerlukan perbaikan terutama dalam hal akuntabilitas dan pelayanan publik.** Hal ini berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah yang belum berjalan efektif sehingga masih terjadi penyalahgunaan keuangan daerah dalam bentuk tindak pidana korupsi. Selain itu, *e-government system* belum optimal dan inovasi dalam penggalan sumber-sumber pendapatan daerah menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pendapatan asli daerah dan masih lambatnya birokrasi serta rendahnya kualitas pelayanan publik.
2. **Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum sesuai dengan kebutuhan pasar dan belum mendukung pembangunan di Provinsi Jambi.** Belum meratanya akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas menjadi salah satu penyebab kualitas SDM belum memiliki daya saing sesuai harapan. Disamping itu, mulai lunturnya nilai – nilai luhur agama dan budaya juga berimplikasi pada minimnya SDM yang berkarakter dan berdaya saing. Perbaikan karakter SDM sekaligus dapat mendukung upaya pemerintah pusat melalui gerakan **revolusi mental**.
3. Predikat **Provinsi Jambi sebagai salah satu daerah yang aman di Indonesia** merupakan salah satu hal positif yang harus dipertahankan. Situasi daerah yang kondusif akan menjadi salah satu modal penciptaan iklim investasi di Provinsi Jambi.
4. **Pengelolaan sumberdaya alam (SDA) berwawasan lingkungan belum optimal.** Kurang optimalnya pengelolaan SDA tersebut disebabkan oleh kurangnya sentuhan IPTEK dan inovasi, sehingga nilai tambah produk unggulan daerah tidak didapatkan oleh Provinsi Jambi. Demikian pula dengan eksplorasi

sumberdaya alam yang hanya berorientasi pada profit tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan.

5. **Ketersediaan dan kualitas infrastruktur** umum masih kurang memadai dalam mendukung pengembangan wilayah.
6. Adanya **kesenjangan ekonomi ditandai** angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin.
7. **Kondisi perekonomian global yang berfluktuatif** berdampak terhadap harga komoditi unggulan Provinsi Jambi seperti Migas, Batubara, Crude Palm Oil (CPO), Karet dan kelapa dalam. Kondisi ini berdampak pada pendapatan masyarakat yang sekitar 65 persen berada disektor pertanian dan perkebunan yang pada gilirannya berdampak pada daya beli masyarakat.
8. **Isu dunia yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan iklim terkait program Pengurangan Emisi Karbon akibat Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan serta SDGs.** Dalam hal pengurangan emisi, Provinsi Jambi berpotensi menjadi daerah yang potensial untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Sebagai jantung pulau Sumatera, posisi hutan Jambi sangat strategis sebagai rumah terakhir bagi keanekaragaman hayati Sumatera. Dengan memiliki 4 Taman Nasional (TNKS, TNBT, TNBD dan TNB) dapat dipastikan Provinsi Jambi merupakan benteng terakhir dari habitat bermacam satwa liar, seperti Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatraensis*), Gajah Sumatera (*Elephas maximus*) dan lainnya yang terus menurun drastis akibat perburuan dan penyempitan habitat. Selain itu juga sebagai rumah yang nyaman untuk flora khas seperti cendawan muka harimau (*Rafflesia haseltii*), *Rafflesia arnoldi*, *Amorphopalus titanum* dan berbagai jenis kayu, perdu juga bebungaan. Demikian pula dalam hal pencapaian SDGs, Provinsi Jambi harus ikut berperan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar manusia.
9. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan **kedaulatan pangan dan energi** harus didukung dengan peningkatan produksi pangan melalui perbaikan sarana prasarana pendukung dan intensifikasi serta pemberian sentuhan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dalam pengolahan lahan pertanian serta

optimalisasi penggunaan potensi energi baru dan terbarukan guna pemenuhan kebutuhan energi di Provinsi Jambi.

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

2

### 2.1 Rencana Strategis

#### 2.1.1 Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan rencana strategis daerah untuk periode 5 tahun. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2016 – 2021, yaitu :

**“Tertib, Unggul, Nyaman Tangguh, Adil dan Sejahtera”**

#### **JAMBI TUNTAS 2021**

**Tertib:** diartikan sebagai wujud tata kelola pemerintah Provinsi Jambi yang menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan harmonis yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, birokrasi pemerintahan yang professional dan berkinerja tinggi, adanya jaminan kepastian hukum, serta terjadi harmonisasi antar tingkatan pemerintahan dari pusat sampai desa.

**Unggul:** Menggambarkan kualitas Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi yang berdaya saing dan mampu menjadi modal sosial bagi perwujudan perekonomian Provinsi Jambi yang berdaya saing.

**Nyaman:** Keadaan yang menggambarkan kehidupan masyarakat di Provinsi Jambi yang hidup dalam suasana aman, tenteram, damai, saling menghargai dan bertoleransi tinggi antar Suku, Agama dan Ras dilandasi supremasi hukum sehingga dapat mendorong iklim investasi dan berusaha yang kondusif.

*Bab II Berisi:*  
2.1 Rencana Strategis  
2.1.1 Visi dan Misi  
2.1.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja  
2.2 Perjanjian Kinerja

**Tangguh:** Menggambarkan kemandirian ekonomi masyarakat yang mampu bertahan terhadap guncangan ekonomi global dan mampu bersaing secara global, berkembangnya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) serta pembangunan yang berwawasan lingkungan

**Adil:** mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu, golongan maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat

**Sejahtera:** mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi, politik dan budaya

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut:

1. **Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik**, yaitu menerapkan prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kuantitas aparatur pemerintahan yang profesional, berkinerja tinggi dan berorientasi melayani masyarakat.
2. **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender**, yaitu membangun sumber daya manusia yang berdaya saing, ditandai oleh penduduk laki-laki dan perempuan yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat masyarakat kesehatan yang lebih baik serta adil dalam kerangka masyarakat yang berbudaya dan agamis .
3. **Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat**, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.
4. **Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan**, yaitu

meningkatkan nilai tambah produk – produk unggulan daerah dengan memanfaatkan IPTEKIN yang ramah lingkungan.

5. **Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan**, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar serta mengoptimalkan potensi sumber energi terbarukan untuk pemerataan akses energi wilayah sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mobilitas penduduk antar wilayah
6. **Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat**, yaitu meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap kehidupan yang lebih baik.

### 2.1.2 Tujuan , Sasaran, Indikator Kinerja

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan adalah :

- 1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas
- 2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
- 3 Meningkatkan kualitas SDM perempuan dan SDM yang berbudaya dan agamis
- 4 Mewujudkan ketertiban umum daerah
- 5 Meningkatkan daya saing daerah berbasis IPTEKIN
- 6 Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian tanaman pangan
- 7 Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum
- 8 Meningkatkan kualitas pengelolaan energi dan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan
- 9 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Berdasarkan tujuan, maka sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien

2. Meningkatnya kualitas pelayanan pada instansi/ lembaga pemerintah daerah yang melayani publik
3. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
4. Meningkatnya kualitas pendidikan menengah
5. Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan
6. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya
7. Meningkatnya harmonisasi kehidupan umat beragama
8. Meningkatnya stabilitas ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan hukum
9. Meningkatnya stabilitas demokrasi di daerah
10. Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)
11. Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah
12. Meningkatnya ketahanan pangan
13. Meningkatnya indeks pertanaman pada lahan tanaman pangan
14. Terciptanya akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian
15. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik
16. Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi
17. Meningkatnya pengelolaan SDA dan bahan tambang dengan dampak lingkungan yang minimal
18. Meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi
19. Menurunnya angka kemiskinan
20. Menurunnya angka pengangguran
21. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja
1	<b>MISI 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik</b>	Mewujud-kan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi (Kondisi awal "CC", dan target capaian akhir "B")	Meningkat-nya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien	Nilai SAKIP Hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Efisiensi pengelolaan Keuangan daerah
				Meningkat-nya kualitas pelayanan pada instansi/ lembaga pemerintah daerah yang melayani publik	IKM
2	<b>MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender.</b>	Meningkat-kan kualitas sumberdaya manusia melalui peningka-tan kualitas pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia (kondisi awal 68,24 dan target capaian akhir 71,8)	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup
					Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran)
					Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja
					Prevalensi kekurangan gizi ( <i>underweight</i> ) pada anak balita (persen)
				Meningkatnya kualitas Pendidikan Menengah	Angka Melanjut-kan ke PT Akreditasi B
					Tingkat kelulusan SMA dan SMK
			Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender (IKKG) (kondisi awal 0,809 dan target capaian akhir 0,815)	Meningkat-nya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	IDG
		Meningkat-kan kualitas SDM perempuan dan SDM yang berbudaya dan agamis	Indeks kebebasan dari diskriminasi (kondisi awal 96,7 dan target capaian akhir 100)	Meningkat-nya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya	HAKI (Hak Atas kekayaan Intelektual) Karya Seni
				Meningkat-nya harmonisasi kehidupan umat beragama	Indeks Kebebasan Berkeyakinan

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja
3	<b>MISI 3: Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama dan kesadaran hukum masyarakat</b>	Mewujudkan ketertiban umum daerah	Indeks Demokrasi Indonesia (kondisi awal 70,68 dan target capaian akhir 79,0)	Meningkatnya stabilitas tibatran-mas dan hukum	Indeks Aspek Kebebasan Sipil
				Meningkatnya stabilitas demokrasi di daerah	Indeks Aspek Lembaga Demokrasi
4	<b>MISI 4 : Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan , teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan</b>	Meningkatkan daya saing daerah berbasis IPTEKIN	Nilai Daya Saing (ACI) (Kondisi awal -0,7379 dan target capaian akhir sebesar 0,1)	Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)	Total Factor Productivity (TFP)
				Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah	Persentase share sektor Sekunder terhadap PDRB
		Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian tanaman pangan	Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Petani Tanaman Pangan (Kondisi awal 105,03 dan target capaian akhir sebesar 106,0)	Meningkatnya ketahanan pangan	Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari)
				Meningkatnya Indeks Pertanian pada lahan Tanaman Pangan	Persentase Peningkatan luas lahan dengan Indeks Pertanian: - IP 200 - IP 300

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja
5	<b>MISI 5 : Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan</b>	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum serta pengelolaan energi	Nilai Komponen daya saing infrastruktur dan kualitas hidup (ACI) (Kondisi awal sebesar -0,3915 dan target akhir sebesar 0,1)	Terciptanya akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian	Persentase jalan provinsi menuju sentra produksi kondisi mantap
					Jalan Provinsi dalam kondisi mantap
				Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik	Rasio Elektrifikasi
				Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja
		Meningkat-kan kualitas pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Kondisi awal sebesar 52,72 dan target capaian akhir sebesar 66,0)	Meningkatnya pengelolaan SDA dan bahan tambang dengan dampak lingkungan yang minimal	persentase peningkatan pemanfaatan energi terbarukan
	Persentase Perusahaan minerba yang menerap-kan > 75% syarat <i>good mining practise</i>				
	persentase perusahaan proper hijau				
	Persentase peningkatan industri ekowisata				
	Persentase pengelolaan hutan yang lestari				
	Meningkat-nya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi			Persentase penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar	
					persentase penurunan luas lahan kritis

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja
6	<b>MISI 6 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat</b>	Meningkat-kan kualitas hidup masyarakat	Indeks kebahagiaan (Kondisi awal 71,1 dan target capaian akhir sebesar 72,5)	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan
				Menurunnya angka pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka
				Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk

Dari indikator-indikator kinerja tersebut dipilih 16 indikator kinerja utama yang selanjutnya ditetapkan menjadi sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi
	<p>MISI 1:</p> <p><b>Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik</b></p>		
1	<p>Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas</p>	<p>Indeks Reformasi Birokrasi</p>	<p>a. Pengukuran dibagi ke dalam dua komponen, yaitu komponen pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit adalah pengukuran terhadap seluruh upaya perbaikan tata kelola pemerintah yang dilakukan oleh pihak internal instansi pemerintah agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, efisien, akuntabel, dan bebas KKN. Komponen hasil adalah pengukuran terhadap kapasitas dan akuntabilitas, integritas (bersih dan bebas KKN), dan kepuasan pengguna layanan; dan</p> <p>b. Bobot Pengukuran diberikan 60% untuk Komponen Pengungkit dan 40% untuk Komponen Hasil. Unsur yang diukur dalam komponen Pengungkit adalah sebagai berikut:</p>

No	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi		
			NO	UNSUR PENILAIAN	NILAI MAKSIMAL
			1	Manajemen Perubahan	5,0
			2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,0
			3	Penataan dan Penguatan organisasi	6,0
			4	Penataan Tatalaksana	5,0
			5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,0
			6	Penguatan Akuntabilitas	6,0
			7	Penguatan Pengawasan	12,0
			8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,0
			JUMLAH		60
Unsur yang diukur dalam Komponen Hasil adalah sebagai berikut:					

No	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi		
			NO	Unsur Penilaian	Nilai Maksimal
			1	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,0
			2	Pemerintah yang bersih dan bebas KKN	10,0
			3	Kualitas Pelayanan Publik	10,0
			JUMLAH		40,0
<p>Metode pengukuran/penilaian adalah dengan <i>self assessment</i> (penilaian mandiri) yang dievaluasi melalui wawancara, observasi langsung, pengumpulan bukti-bukti pendukung, survey internal dan eksternal.</p>					
<p>MISI 2: <b>Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender</b></p>					
2	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia	<p>IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup (<math>e_0</math>), indeks pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak.</p> $IPM = \frac{1}{3} [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$ <p>dimana :</p>		

No	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi
			<p><math>X_{(1)}</math> : Indeks harapan hidup</p> <p><math>X_{(2)}</math> : Indeks pendidikan = <math>\frac{2}{3}</math>(indeks melek huruf) + <math>\frac{1}{3}</math>(indeks rata-rata lama sekolah)</p> <p><math>X_{(3)}</math> : Indeks standar hidup layak</p>
3	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pemberdayaan Gender	<p>IDG merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.</p> <p>IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.</p> $IDG = \frac{(I_{par} + I_{DM} + I_{inc-dis})}{3}$ <p>Dimana:</p> <p><math>I_{par}</math> = Indeks Keterwakilan di parlemen</p> <p><math>I_{DM}</math> = Indeks pengambilan keputusan</p> <p><math>I_{inc-dis}</math> = Indeks distribusi pendapatan</p>
	<p>MISI 3:</p> <p><b>Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama dan kesadaran hukum masyarakat</b></p>		
4	Terwujudnya ketertiban umum daerah	Indeks Demokrasi Indonesia	Metode pengumpulan data menerapkan metode triangulation dengan mengombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan

No	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi
			<p>memvalidasi (<i>cross validate</i>) data yang didapat dengan metode yang lain. Terdapat 4 metode utama yang digunakan di dalam pengumpulan data penyusunan indeks ini yakni: Reviu Media (analisis isi berita surat kabar) dan Reviu Dokumen (analisis isi dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah); <i>Focus Group Discussion</i> (FGD); Wawancara Mendalam (<i>in-depth interview</i>).</p> <p>Terdapat 11 indikator yang berkontribusi pada pengukuran di tingkat indeks indikator yang membentuk indeks variabel kemudian ditimbang menggunakan penimbang indikator yang didapat melalui suatu proses terpisah yang disebut <i>Analytical Hierarchy Procedure</i> (AHP). Penimbang ini menentukan berapa kontribusi masing-masing indikator terhadap variabel di mana indikator tersebut menjadi salah satu komponennya. Indeks variabel kemudian menyumbang kepada indeks aspek. Dalam proses pembentukan skor aspek setiap variabel ditimbang menggunakan penimbang hasil AHP.</p> <p>Metode perhitungan salah satu aspek IDI ini melalui 4 tahap perhitungan, yakni:</p>

No	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi
			<p>Tahap pertama yakni menghitung indeks data kuantitatif masing-masing indikator komponen penyusun IDI dari hasil coding surat kabar dan coding dokumen, dengan rumus sebagai berikut:</p> $\text{Indeks } (X_{ijk}) = \sum \left( \frac{X_{ijk} - X_{\text{terburuk}}}{X_{\text{ideal}} - X_{\text{terburuk}}} \right)$ <p>Di mana:</p> <p><math>X_{ijk}</math> : Tingkat capaian indikator komponen penyusun IDI dari aspek ke I, variabel ke j, indikator ke k.</p> <p><math>K_{\text{ideal}}</math> : Tingkat capaian ideal yang mungkin dicapai dari indikator <math>X_{ijk}</math>.</p> <p><math>X_{\text{terburuk}}</math>: Tingkat capaian terburuk dari indikator <math>X_{ijk}</math></p> <p>Persamaan (1) menghasilkan nilai <math>0 &lt; \text{Indeks } (X_{ijk}) &lt; 1</math> ; untuk memudahkan cara membaca, skala dinyatakan dalam 100 dengan cara mengalikan persamaan (1) dengan 100 sehingga menghasilkan nilai <math>0 &lt; \text{Indeks } (X_{ijk}) &lt; 100</math>.</p> <p>Tahap kedua, mempertimbangkan data kualitatif hasil FGD dan atau hasil wawancara mendalam pada hasil perhitungan persamaan (1) dalam skala 100. Hasil FGD dan atau wawancara mendalam dinilai 10 poin indeks. Nilai</p>

No	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi
			<p>tersebut dapat menjadi faktor penambah atau pengurang indeks tergantung pada sifat indikator yang bersangkutan. Nilai FGD dan/atau wawancara mendalam menjadi faktor penambah apabila indikator bersifat searah dengan tingkat demokrasi, artinya semakin banyak jumlah kejadian pada suatu indikator merupakan indikasi semakin baik tingkat demokrasi. Salah satu ciri indikator yang bersifat searah dengan tingkat demokrasi adalah <math>X_{ideal} &gt; 0</math>. Sebaliknya nilai FGD dan atau wawancara mendalam menjadi faktor pengurang apabila indikator bersifat berlawanan dengan tingkat demokrasi yang dicirikan dengan <math>X_{ideal} &gt; 0</math>. Rumus penghitungan pada tahap ini yakni:</p> $I(X_{ijk}) = (\text{Indeks } (X_{ijk}) \times 100\% \pm 10$ <p>Di mana:</p> <p><math>I (X_{ijk})</math> : Indeks indikator komponen penyusun IDI dari aspek ke I, variabel ke j indikator ke k, setelah mempertimbangkan hasil FGD dan/atau wawancara mendalam.</p> <p>Tahap ketiga adalah menghitung indeks masing- masing variabel. Indeks variabel merupakan rata- rata tertimbang dari indeks indikator komponen variabel.</p>

No	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi
			<p>Penghitungan indeks variabel dilakukan dengan rumus sebagai berikut:</p> $I(V_{ij}) = \sum_k^n P_{ijk} I(X_{ijk})$ <p>Di mana:</p> <p><math>I(V_{ik})</math> : Indeks variabel ke j dari aspek ke i.</p> <p><math>P_{ijk}</math> : Nilai penimbang dari AHP untuk indikator komponen penyusun IDI ke k dari variabel ke j dan aspek ke i.</p> <p><math>(X_{ijk})</math> : Indeks indikator komponen penyusun IDI ke k dari variabel ke j, aspek ke I setelah mempertimbangkan hasil FGD dan/atau wawancara mendalam.</p> <p>Tahap keempat adalah menghitung indeks aspek dengan rumus sebagai berikut:</p> $I(A_i) = \sum_{j=1}^n P_{ij} I(V_{ij})$ <p>Di mana:</p> <p><math>I(A_j)</math>: Indeks aspek ke i.</p> <p><math>P_{ij}</math> : Nilai penimbang dari AHP untuk variabel ke j dari aspek ke i.</p> <p><math>I(V_{ij})</math>: Indeks variabel ke j dari aspek ke i.</p>
	<p><b>MISI 4:</b></p> <p><b>Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan , teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan</b></p>		

No	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi
5	Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)	Total Factor Productivity (TFP)	$A = \frac{Y}{K^{\alpha}L^{\beta}}$ <p>Dengan</p> <p>A = Total Factor Productivity</p> <p>Y = total produksi (output yang dihasilkan)</p> <p>K = input kapital</p> <p>L = input tenaga kerja</p> <p><math>\alpha, \beta</math> = konstanta (elastisitas input) dari kapital dan tenaga kerja</p>
6	Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah	Persentase <i>share</i> sektor Sekunder terhadap PDRB	$\frac{S_{st}}{PDRB} \times 100\%$ <p>dengan:</p> <p><math>S_{st}</math> = besarnya <i>share</i> sektor sekunder terhadap PDRB pada tahun t</p> <p>PDRB = Total PDRB pada tahun t</p>
7	Meningkatnya ketahanan pangan	Ketersediaan Energi (kcal/kap/hari)	$KSPe = \frac{KTSP}{(\Sigma P \times 365 \text{ hari})} \times \text{Kand. e}$ <p>Dimana:</p> <p>KSPe = Ketersediaan Energi (Kcal/kap/hari)</p> <p>KTSP = Ketersediaan pangan untuk dikonsumsi manusia (ton/tahun)</p> <p><math>\Sigma P</math> = Jumlah Penduduk (jiwa)</p>

No	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi
			Kand. e = Kandungan energi
	<p>MISI 5:</p> <p><b>Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan</b></p>		
8	Terciptanya akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian	Jalan Provinsi dalam kondisi mantap	<p>Jalan Prov. Dalam kondisi mantap =</p> $\frac{J_{baik} + J_{sedang}}{J} \times 100\%$ <p>Dimana:</p> <p><math>J_{baik}</math> = Panjang Jalan provinsi dalam kondisi baik (km)</p> <p><math>J_{sedang}</math> = Panjang Jalan provinsi dalam kondisi sedang (km)</p> <p><math>J</math> = Total panjang jalan kewenangan Provinsi</p>
9	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik	Rasio Elektrifikasi	$Rasio\ Elektrifikasi = \frac{\sum RT_L}{\sum RT} \times 100\%$ <p><math>RT_L</math> = Jumlah rumah tangga dengan listrik</p> <p><math>RT</math> = Jumlah rumah tangga</p>
10	Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya pada periode yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%).</p>

No	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi
			<p>Rumus:</p> $P_{AML} = \frac{JRTML}{JRTS} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>P AML: Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.</p> <p>JRTML: Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak).</p> <p>JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya. (penduduk 40% terbawah/berpendapatan terendah).</p>
		<p>persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik</p>	$= \frac{JI_{baik}}{JI} \times 100\%$ <p>JI<sub>baik</sub>= panjang jaringan irigasi provinsi dalam kondisi baik (km)</p> <p>JI = total panjang jaringan irigasi provinsi (km)</p>

No	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi
11	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan  Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		$IKLH\ Prov = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$ <p>Keterangan:</p> <p>IKLH Prov = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi</p> <p>IKA = Indeks Kualitas Air Prov</p> <p>IKU = Indeks Kualitas Udara Prov</p> <p>IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan</p> <p>Dimana:</p> $PI_j = \sqrt{\frac{\left(\frac{Ci}{Lij}\right)_M^2 + \left(\frac{Ci}{Lij}\right)_R^2}{2}}$ <p>Keterangan:</p> <p>PI<sub>j</sub> adalah indeks pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan fungsi dari Ci/L<sub>ij</sub>, dimana Ci menyatakan konsentrasi parameter kualitas air ke i dan L<sub>ij</sub> menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j. Dalam hal ini peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas I berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 82 Tahun 2001.</p> $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{EU} - 0,1)\right)$ <p>Keterangan :</p> <p>I<sub>EU</sub> = Standar kualitas udara berdasarkan EU Directives, dimana I<sub>EU</sub> &gt; 1 berarti kualitas udara melebihi standar EU dan sebaliknya</p>

No	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi
			$IKTL = 0,23 ITH + 0,24 IPH + 0,30 IKT + 0,15 IKBA + 0,08 IKH$ <p>Keterangan:</p> <p>IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan</p> <p>ITH = Indeks Tutupan Lahan</p> <p>IPH = Indeks <i>Performance</i> Hutan</p> <p>IKT = Indeks Kondisi Tutupan Hutan</p> <p>IKBA= Indeks Konservasi Badan Air</p> <p>IKH = Indeks Kondisi Habitat</p>
	<p>MISI 6:</p> <p><b>Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat</b></p>		
12	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^0$ <p>Dengan:</p> <p><math>P_0</math> = Persentase penduduk miskin (head count index)</p> <p><math>Z</math> = garis kemiskinan</p> <p><math>y_i</math> = rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (<math>i = 1, 2, 3, \dots, q</math>); <math>y_i &lt; z</math></p> <p><math>q</math> = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan</p> <p><math>n</math> = jumlah penduduk</p>
13	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka	$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$

No	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi
14	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	$r = \left(\frac{P_t}{P_0}\right)^{1/t} - 1$ <p>Keterangan:  r = laju pertumbuhan penduduk  P<sub>t</sub> = jumlah penduduk pada tahun t  P<sub>0</sub> = jumlah penduduk pada tahun dasar  t = jangka waktu</p>

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah wujud komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk mencapai sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang terukur. Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	CC
2.	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia	70,5

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pemberdayaan Gender	64
4.	Terwujudnya ketertiban umum daerah	Indeks Demokrasi Indonesia	70,68
5.	Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)	Total Factor Productivity (TFP)	1,2
6.	Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah	Persentase <i>share</i> sektor Sekunder terhadap PDRB	20,5%
7.	Meningkatnya ketahanan pangan	Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari)	3.212
8.	Terciptanya akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian	Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi mantap	77,7
9.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik	Rasio Elektrifikasi	93
10.	Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	80%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	78%
11.	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,2
12.	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	7,8%
13.	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka	3,57%
14.	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,04

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

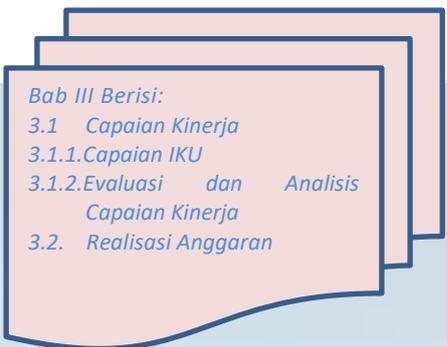
3

### 3.1 Capaian Kinerja

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja berorientasi pada perubahan yang lebih baik, dimana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai rumusan perubahan baik pada keluaran maupun dampak yang dihasilkan. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good government* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/ kegiatan menjadi penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sebagai pengejawantahan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk membangun akuntabilitas kinerja, pengembangan monitoring dan evaluasi kinerja adalah faktor kunci untuk mendorong pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik. Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dalam hal ini, aturan perundangan-undangan yang dipakai sebagai pedoman penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah ini adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja maka dibutuhkan suatu skala penilaian. Dalam hal ini skala yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah



Bab III Berisi:  
3.1 Capaian Kinerja  
3.1.1. Capaian IKU  
3.1.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja  
3.2. Realisasi Anggaran

tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan tingkatan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 - $\geq$ 100	Sangat Tinggi	
2	76 - 90	Tinggi	
3	66 - 75	Sedang	
4	51 - 65	Rendah	
5	$\leq$ 50	Sangat Rendah	

### 3.1.1 Capaian IKU

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya digunakan dalam pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Jambi. Pencapaian IKU Gubernur Jambi sampai dengan tahun 2018 secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

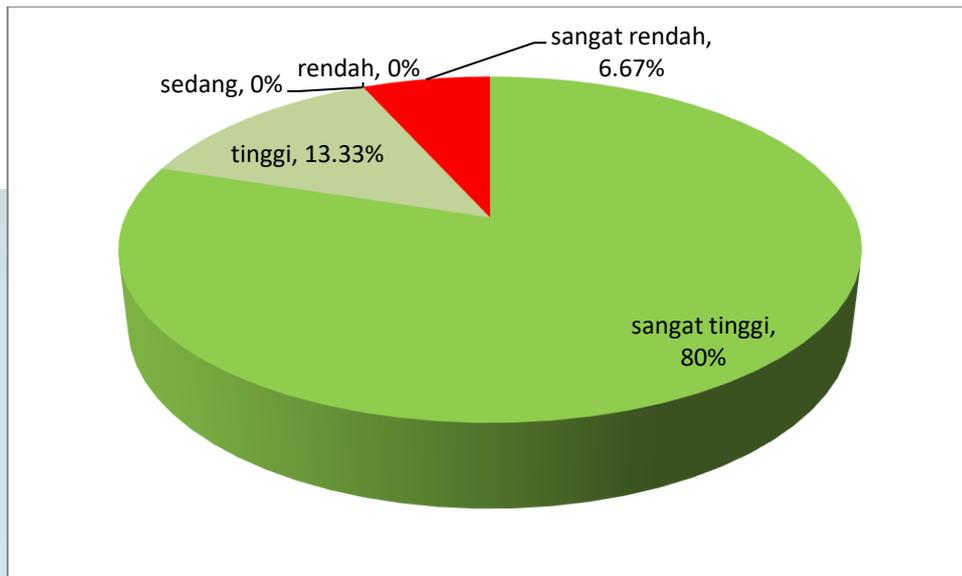
Tabel 3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan Tahun 2018

No	Indikator	Kondisi Awal (2015)	2018			Target Akhir (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	CC	CC	100	B	96,37
2	Indeks Pembangunan Manusia	68,24	70,5	69,99	99,28	71,8	97,48
3	IDG	61,93	64,00	65,32	102,06	67,01	97,48

No	Indikator	Kondisi Awal (2015)	2018			Target Akhir (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
4	Indeks Demokrasi Indonesia	70,68	75	74,12	98,83	79	93,82
5	Total Factor Productivity (TFP)	NA	1,2	0,46	38,33	1,5	30,67
6	Persentase share sektor Sekunder terhadap PDRB	18,38%	20,50 %	17,24 %	84,09	22,00 %	78,36
7	Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari)	3.204	3.212	3.425	106,63	3.217	106,45
8	Jalan Provinsi dalam kondisi mantap	75,56%	77,70 %	77,20 5%	99,36	79,54 %	97,06
9	Rasio Elektrifikasi	81,5	93	97,39	104,72	96	101,45
10	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	62,75	80%	65,73	82,16	80%	82,16

No	Indikator	Kondisi Awal (2015)	2018			Target Akhir (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
11	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	66,35%	78%	77,2 %	98,74	91%	84,84
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,72	64,2	64,98	101,22	66	98,45
13	Angka Kemiskinan	9,12%	7,8%	7,85 %	99,36	7,4	93,91
14	Tingkat pengangguran Terbuka	4,20%	3,57 %	3,86 %	91,88	2,80%	62,14
15	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,24	2,04	1,62	120,59	1,82	110,99

Dari 15 Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas, 6 indikator menunjukkan capaian 100% atau lebih. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan dukungan kerja keras seluruh stakeholder dalam pelaksanaan program pendukung sasaran tersebut. Bila dikelompokkan berdasarkan kriteria penilaian realisasi kinerja sebagaimana tabel 3.1, maka 12 indikator (80,0%) masuk dalam kategori dengan capaian sangat tinggi, 2 indikator (13,33%) dengan capaian tinggi, dan 1 indikator (6,67%) terealisasi sangat rendah. Sejumlah target IKU yang tingkat pencapaiannya belum optimal pada tahun 2018 akan diupayakan melalui kinerja yang lebih keras, fokus dan terarah dengan pertimbangan sejumlah analisa di masa yang akan datang. Secara umum, tingkat capaian seluruh indikator dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3-1 Persentase capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

### 3.1.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

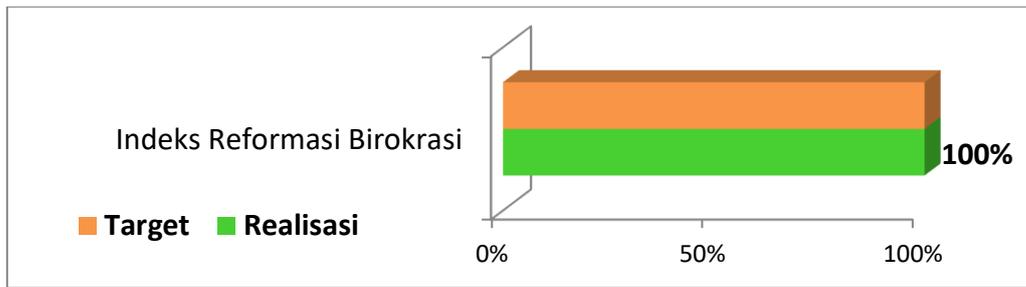
Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan dalam subbab sebelumnya. Penyajian untuk subbab ini disajikan berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sebagai berikut:

#### ***Sasaran Strategis 1***

***Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas***

Istilah *good and clean governance* memiliki pengertian akan segala hal terkait dengan tindakan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam prakteknya, pemerintahan yang bersih adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif.

Ukuran yang digunakan untuk melihat capaian sasaran strategis ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun capaian Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2018 dapat dilihat gambar di bawah ini.



Gambar 3-2 Capaian Sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas

### 1. Indeks Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia. Sebagai bentuk komitmen pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan Indeks Reformasi Birokrasi sebagai indikator kinerja utama yang harus diwujudkan dan menggambarkan keberhasilan misi 1 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Adapun capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3 Realisasi Indikator Kinerja Utama Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja						Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2018
	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017	2018				
				Target	Realisasi	% capaian		
Indeks Reformasi Birokrasi	C (35,33)	CC (51,35)	CC (57,83)	CC	CC (57,83)*	100	B	96,37

Sumber:Kemenpan RB, 2018

Ket: \*) data yang dikeluarkan tahun 2018 (kondisi tahun 2017)

Data capaian kinerja tahun 2018 di atas masih menggunakan data kondisi tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB pada tahun 2018 karena sampai dengan laporan ini dibuat capaian kondisi 2018 belum dikeluarkan. Berdasarkan komponen pengungkit penilaian capaian tersebut, komponen yang mengalami perbaikan nilai adalah komponen penataan dan penguatan organisasi, komponen penataan sistem manajemen SDM, komponen penguatan akuntabilitas, serta komponen peningkatan kualitas pelayanan publik. Sedangkan komponen pengungkit lainnya masih stagnan ataupun sedikit menurun. Secara detil perubahan nilai per komponen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi

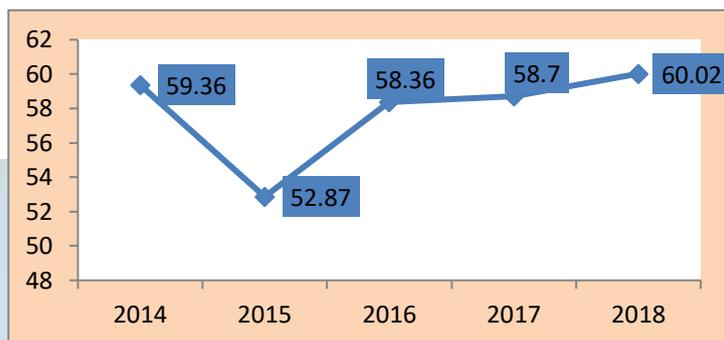
No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2016	2017
<b>I</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>			
1	Manajemen Perubahan	5,00	2,36	1,99
2	Penataan peraturan perundang-undangan	5,00	2,09	2,09
3	Penataan dan penguatan organisasi	6,00	1,32	2,84
4	Penataan tatalaksana	5,00	1,87	1,83
5	Penataan sistem manajemen SDM	15,00	7,89	10,75
6	Penguatan akuntabilitas	6,00	2,20	3,29
7	Penguatan pengawasan	12,00	3,51	1,87
8	Peningkatan kualitas pelayanan publik	6,00	2,54	2,90
	<b>Total Komponen pengungkit (A)</b>	<b>60,00</b>	<b>23,78</b>	<b>27,56</b>
<b>II</b>	<b>Komponen Hasil</b>			
	Nilai akuntabilitas kinerja	14,00	7,40	8,40
	Survei internal integritas organisasi	6,00	4,85	4,55
	Survei eksternal persepsi korupsi	7,00	5,32	6,07
	Opini BPK	3,00	3,00	3,00
	Survei eksternal Pelayanan publik	10,00	7,00	8,25
	<b>Total komponen hasil (B)</b>	<b>40,00</b>	<b>27,57</b>	<b>30,27</b>
	<b>Indeks reformasi birokrasi (A+B)</b>	<b>100,00</b>	<b>51,35</b>	<b>57,83</b>

Sumber: Kemenpan, 2018

Berbagai upaya telah dilakukan demi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, hal ini terlihat dari peningkatan nilai pengungkit reformasi birokrasi dan komponen hasil. Hal yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan nilai penataan dan penguatan organisasi adalah penataan organisasi pemerintah daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 dan berlaku resmi mulai tahun 2017. Dalam rangka penguatan komponen penataan sistem manajemen SDM, pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Jambi untuk ketiga kalinya telah melaksanakan seleksi jabatan tinggi pratama untuk pengisian beberapa jabatan eselon II yang masih kosong sebagai penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 untuk membangun sistem rekrutmen yang kompetitif. Jabatan eselon II hasil seleksi tersebut adalah Staf Ahli Bidang ekonomi dan Pembangunan, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Staf Ahli Bidang kemasyarakatan dan SDM, Asisten Administrasi Umum, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Koperasi dan SDM.

Sementara itu, pada komponen penguatan akuntabilitas, pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Jambi juga telah melakukan beberapa perbaikan pada seluruh komponen SAKIP. Akuntabilitas kinerja adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah mengubah orientasinya dari berorientasi pada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi pada hasil atau outcome. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, instansi Pemerintah disorong untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggungjawab terhadap kinerja atau hasil yang dicapai.

Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya, setiap tahun Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), baik di tingkat Pusat maupun daerah. Komponen penilaian meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Instansi pemerintah yang dinilai akuntabel atau yang akuntabilitas kinerjanya baik adalah instansi yang berdasarkan hasil evaluasi memperoleh predikat minimal “B” atau “Baik”.



Sumber: kementerian PAN dan RB, 2019

Gambar 3-3 Nilai SAKIP Provinsi Jambi Tahun 2014-2018

Perbaikan komponen akuntabilitas kinerja menghasilkan capaian yang baik, sehingga Provinsi Jambi berhasil meningkatkan nilai SAKIP dari CC pada tahun 2017 menjadi B pada tahun 2018. Bila dibandingkan dengan target, dimana target

pada tahun 2018 adalah B, maka persentase realisasi capaian kinerja pada indikator ini telah mencapai 100% atau masuk dalam kategori **sangat tinggi**. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada tahun 2021, maka capaian hingga tahun 2018 ini mencapai 85,73% atau masuk dalam kategori tinggi. Bila melihat tren perolehan nilai, maka secara umum dapat dilihat bahwa peningkatan terjadi pada seluruh komponen penilaian.

Tabel 3.5 Perkembangan Capaian Nilai pada Komponen SAKIP

No	Komponen yang dinilai	2016	2017	2018
a.	Perencanaan Kinerja	19,26	19,29	19,84
b.	Pengukuran Kinerja	12,63	12,67	12,95
c.	Pelaporan Kinerja	9,34	9,37	9,76
d.	Evaluasi Internal	5,54	5,52	5,56
e.	Capaian Kinerja	11,59	11,85	11,91
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>58,36</b>	<b>58,70</b>	<b>60,02</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>CC</b>	<b>CC</b>	<b>B</b>

Sumber: Kemenpan RB, 2019

Dalam rangka perbaikan komponen perencanaan kinerja, Pemerintah Provinsi telah melakukan perubahan atas RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 yang diikuti oleh perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Perubahan ini dilakukan untuk menyempurnakan rencana kinerja agar lebih baik serta pemenuhan amanat peraturan perundang-undangan yang terbit setelah RPJMD ditetapkan, termasuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu juga dilakukan perbaikan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) dengan melibatkan seluruh pimpinan di level Pemerintah Provinsi Jambi dan Perangkat Daerah. Pemerintah Provinsi Jambi juga telah mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk membuat cascading penetapan kinerja sampai dengan eselon IV sehingga diharapkan seluruh komponen secara berjenjang memiliki kinerja yang saling mendukung dalam pencapaian sasaran daerah. Pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja juga mengalami perbaikan dan didukung oleh capaian kinerja yang secara umum menunjukkan capaian yang sangat tinggi.

Tata kelola pemerintahan yang baik lazim digambarkan dalam 3 pilar yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Ketiga pilar tersebut menunjukkan pengakuan akan kontribusi bukan hanya pemerintah dalam penyelesaian urusan-urusan publik, namun juga masyarakat dan pihak non pemerintah lainnya. Upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka peningkatan indeks Reformasi Birokrasi, hingga kembali menunjukkan hasil yang sangat baik karena untuk keenam kalinya Provinsi Jambi dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian oleh lembaga eksternal ini menjadi komponen penting untuk karena secara objektif menunjukkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari segi keuangan. Hal ini menjadi bagian yang menguatkan akuntabilitas pada aspek pencapaian kinerja.



Gambar 3-4 Penerimaan hasil audit BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi

Pemeriksaan oleh BPK dilakukan berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik setiap tahun ini mencakup pemeriksaan terhadap neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Atas pencapaian komponen opini BPK ini maka kinerja komponen ini adalah **sangat tinggi** atau memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja ini bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD juga telah mencapai 100% atau sangat tinggi. Sebagai catatan,

realisasi ini merupakan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jambi untuk tahun 2017 yang dikeluarkan oleh BPK pada tahun 2018. Untuk hasil pemeriksaan atas kinerja tahun 2018, masih dalam proses ketika laporan ini disusun.

Tabel 3.6 Realisasi Capaian komponen hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2018
	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017	2018				
					Target	Realisasi	% capaian		
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100

Sumber: BPK, 2017

Pada komponen kualitas pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Jambi terus melakukan survey kepuasan masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Pelayanan publik yang baik merupakan muara dari sebuah reformasi birokrasi, oleh karena itu upaya memperbaiki kinerja organisasi layanan publik harus dilakukan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat menerima layanan sesuai dengan kebutuhannya. Kepuasan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik karena masyarakat adalah konsumen dari produk layanan yang dihasilkan. Keluhan masyarakat yang tidak direspon oleh pemerintah akan menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah, sehingga pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah yang responsif dalam arti positif merupakan dambaan seluruh masyarakat.

Upaya untuk menghubungkan tata pemerintahan yang baik dengan pelayanan publik bukan merupakan hal yang baru. Pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disamping telah menerbitkan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI sebelumnya sebagai upaya untuk memperkuat landasan dalam memberikan jaminan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan publik di Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi bertekad untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada instansi/lembaga pemerintah daerah yang melayani publik.

Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu bentuk upaya yang bisa dilakukan dalam rangka melihat sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Hal ini telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2004 tentang Pedoman Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tertanggal 2 Mei 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Terdapat 9 unsur yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ini, yaitu persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana pelayanan, perilaku

(kesopanan dan keramahan) petugas pelayanan, maklumat pelayanan dan penanganan pengaduan, saran dan masukan. Kesembilan unsur yang ada dalam survei dapat dijadikan tolok ukur perbaikan pelayanan pada masa yang akan datang.

Tabel 3.7 Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Jambi Tahun 2018

<b>Unsur Pelayanan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<i>U1: Persyaratan pelayanan</i>	78,07	81,713
<i>U2: Prosedur pelayanan</i>	78,14	81,390
<i>U3: Waktu pelayanan</i>	76,53	78,860
<i>U4: Biaya/tarif pelayanan</i>	78,88	82,229
<i>U5: Produk/hasil pelayanan</i>	78,11	79,931
<i>U6: Kemampuan petugas pelayanan</i>	80,43	80,763
<i>U7: Perilaku petugas pelayanan</i>	81,03	81,858
<i>U8: Maklumat pelayanan</i>	76,77	78,916
<i>U9: Mekanisme pengaduan pelayanan</i>	75,75	79,775
<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>78,19</b>	<b>80,604</b>

*Sumber: Biro Organisasi, 2018*

Pada tahun 2018, perhitungan indeks kepuasan masyarakat didasarkan pada hasil survey pada 43 Perangkat Daerah guna mendapatkan gambaran secara utuh hasil pelaksanaan upaya perbaikan kinerja pelayanan publik Pemerintah Provinsi Jambi. Hasil perhitungan dan konversi Indeks menjadi mutu pelayanan dan kinerja dapat dilihat pada tabel di atas. Berdasarkan tabel di atas, capaian indeks kepuasan masyarakat Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2018 adalah “B” atau “Baik” dengan nilai rata-rata 80,604. Hal ini berarti tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Provinsi Jambi termasuk dalam kategori baik dengan peningkatan nilai pada seluruh unsur pelayanan. Unsur dengan nilai tertinggi adalah biaya/ tarif pelayanan dan terendah adalah unsur waktu pelayanan. Berdasarkan hasil survey ini, kedepan harus dilakukan perbaikan atas unsur waktu pelayanan dengan menerapkan SOP pelayanan lebih baik lagi dan tidak mengurangi perbaikan-perbaikan pada unsur lainnya.

Program-program yang telah dilakukan pada tahun 2018 dalam rangka meningkatkan indeks reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- b. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- c. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- d. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
- e. Program Pembangunan dan Pengembangan sarana teknologi informasi dan komunikasi
- f. Program penataan batas dan wilayah administrasi
- g. Program Pengelolaan dan penataan kearsipan SKPD Provinsi, lembaga kearsipan Kab/kota, Parpol, Ormas dan Perorangan
- h. Program Profesionalisasi PNS
- i. Program Manajemen pelayanan kediklatan
- j. Program Promosi dan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka
- k. Program Penataan, Perencanaan, dan Rekrutmen SDM Aparatur Berbasis Kompetensi
- l. Program Peningkatan Kesejahteraan PNS dan Pemberian Penghargaan PNS
- m. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- n. Program penelitian dan pengembangan
- o. Program penghimpunan data dan penyebarluasan informasi pembangunan daerah Provinsi Jambi
- p. Program Perencanaan dan Penataan Peraturan daerah provinsi
- q. Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- r. Program Pengelolaan Kekayaan Daerah
- s. Program pembangunan, pengembangan aplikasi dan telematika
- t. Program layanan dan pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

- u. Program pengembangan perpustakaan
- v. Program peningkatan kualitas SDM perpustakaan
- w. Program Reformasi Birokrasi

**Permasalahan:**

1. Cascading kinerja sudah dilakukan sampai level eselon IV, namun penjabaran pada beberapa Perangkat Daerah masih ada yang belum relevan dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran strategis organisasi di atasnya.
2. Unsur-unsur pelayanan masih memerlukan pembenahan, terutama berkaitan dengan waktu pelayanan.

**Solusi:**

1. Dalam rangka perbaikan cascading kinerja di level satuan kerja, pembinaan dan pendampingan akan lebih ditingkatkan lagi.
2. Penetapan standar operasi pelayanan (SOP) pelayanan yang diterapkan secara terbuka kepada pihak pemakai jasa atau masyarakat, yang disertai tenggat waktu yang jelas. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak yaitu Perangkat Daerah dan masyarakat karena seluruh petugas pada unit pelayanan akan bekerja secara maksimal berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan pada sisi lain, masyarakat merasa yakin akan mendapatkan produk/ jasa pelayanan yang cepat, murah dan maksimal.
3. Pemberian reward atau prestasi kerja penyelenggara pelayanan publik dan punishment terhadap hasil kerja yang tidak baik.
4. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan maka perlu dilakukan peningkatan pengetahuan, keahlian dan keterampilan petugas pemberi pelayanan pada setiap unit di masing-masing Perangkat Daerah
5. Peningkatan ketersediaan fasilitas pelayanan yang didukung oleh sistem IT pada setiap unit pelayanan, baik secara kuantitas maupun kualitas

*Sasaran strategis 2*

*Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan*

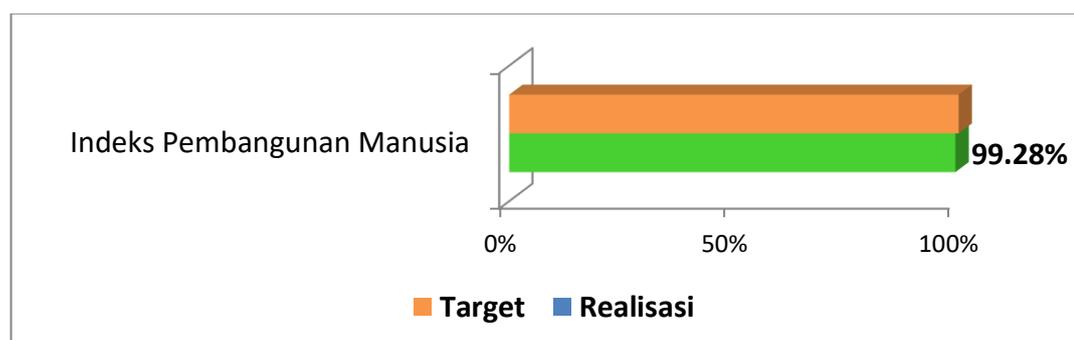
Pembangunan kesehatan sebagaimana kita ketahui bertujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal. Keberhasilan pembangunan kesehatan mempunyai peran penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumberdaya kesehatan.

Oleh karena itu peningkatan kualitas kesehatan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Demikian pula pendidikan, sebagai salah satu hak asasi manusia maka setiap warga negara berhak untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran, minimal pada tingkat pendidikan dasar. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, agama, maupun gender. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pendidikan merupakan salah satu sarana penting agar masyarakat dapat terampil dan produktif yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan juga merupakan aspek yang sangat strategis untuk menghadapi era globalisasi yang sedang berlangsung. Dalam era globalisasi, keunggulan kompetisi suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusianya.

Ukuran yang digunakan untuk melihat capaian sasaran strategis ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Adapun capaian Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2018 dapat dilihat gambar di bawah ini.



Gambar 3-5 capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan kesehatan

## 1. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan

indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Data IPM dikeluarkan oleh BPS setiap tahun merupakan data capaian tahun sebelumnya dan data penghitungan tahun 2018 belum dirilis hingga laporan ini dibuat. Bila melihat capaian IPM Provinsi Jambi 5 tahun terakhir, terlihat peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan. Data yang dirilis tahun 2018 menunjukkan peningkatan IPM sebesar 0,37 dari tahun sebelumnya, yaitu dari 69,62 menjadi 69,99 atau meningkat 0,53%. Realisasi ini belum mencapai target tahun 2018 yaitu 70,5 atau terealisasi sebesar 99,28%. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka sampai dengan tahun 2018 kinerja indikator IPM telah tercapai sebesar 97,48%.

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							% Capaian Target s.d. 2017	
	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017	2018				Target Akhir RPJMD (2021)
					Target	Realisasi	% capaian		
Indeks Pembangunan Manusia*)	68,24	68,89	69,62	69,99	70,5	69,99*)	99,28	71,8	97,48

Sumber: BPS, 2018

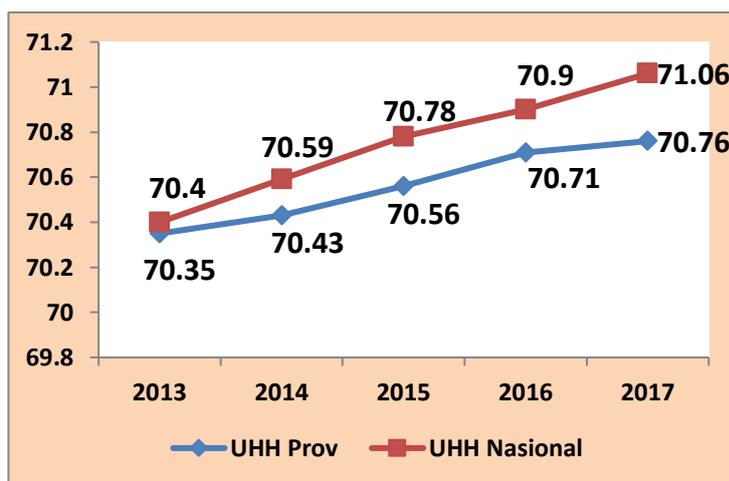
Ket: \*) data yang dikeluarkan tahun 2018 (kondisi tahun 2017)

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Bila dilihat per-dimensi, seluruh dimensi mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan persentase peningkatan terbesar pada pengeluaran per kapita dan peningkatan terkecil pada Usia Harapan Hidup (UHH). Selama periode 2010-2017, UHH tumbuh 0,18 persen per tahun, Harapan Lama Sekolah (HLS) tumbuh 1,53 persen per tahun, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tumbuh 0,81 persen per tahun dan pengeluaran per kapita tumbuh 2,36 persen per tahun.

## 1. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Usia harapan hidup menjadi salah satu penanda penting keberhasilan pembangunan bidang kesehatan di suatu daerah.

Peningkatan Usia Harapan Hidup Provinsi dibandingkan nasional selama kurun waktu tahun 2013-2017 dapat dilihat pada gambar di samping. Data usia harapan hidup dikeluarkan oleh BPS setiap tahun merupakan data capaian tahun sebelumnya dan untuk penghitungan tahun 2019 yang merupakan data capaian tahun 2018 belum dirilis hingga laporan ini dibuat. Bila melihat capaian usia harapan hidup Provinsi Jambi 5 tahun terakhir, terlihat peningkatan yang cukup menggembirakan, walupun di tahun terakhir terlihat sedikit melambat. Data tahun 2018 menunjukkan peningkatan usia harapan hidup sebesar 0,05 tahun dari tahun sebelumnya, yaitu dari 70,71 tahun menjadi 70,76 tahun atau meningkat 0,07%.



Sumber: BPS, 2018

Gambar 3-6 Usia Harapan Hidup Provinsi Jambi dibanding Nasional Tahun 2013-2017

kesejahteraan rakyat khususnya sektor kesehatan yang didukung oleh sektor ekonomi, budaya dan pendidikan.

Angka Kematian Ibu (AKI) atau *Maternal Mortality Rate* (MMR) adalah jumlah kematian ibu akibat proses kelahiran, persalinan, dan pasca persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. atau angka pengukuran risiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan. Kematian ibu adalah kematian wanita

Tingkat keberhasilan peningkatan usia harapan hidup tidak terlepas dari upaya penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian bayi dan penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita. Tingginya capaian usia harapan hidup memperlihatkan peningkatan derajat kesehatan dan pencapaian pembangunan

dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apapun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan karena sebab-sebab lain.

AKI didapatkan dari Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilakukan 5 tahun sekali dan digunakan untuk pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan umum, pendidikan, dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Sensitifitas AKI terhadap perbaikan pelayanan kesehatan menjadikannya indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. AKI mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Berdasarkan SDKI tahun 2012, AKI Provinsi Jambi adalah 359 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini mengalami perbaikan yang signifikan pada data Supas Tahun 2015 dan SDKI 2015, dimana AKI menurun menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup atau telah terjadi peningkatan kinerja penurunan AKI sebesar 15,04 persen.

Tabel 3.8 Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Jambi Tahun 2016-2018

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Kerinci	3	6	6	4	5
2	Merangin	8	10	6	5	5
3	Sarolangun	5	3	5	4	4
4	Batang Hari	2	4	2	8	3
5	Bungo	5	6	10	5	12
6	Tebo	2	5	9	4	3
7	Muaro Jambi	3	3	3	5	2
8	Tanjab Barat	5	2	5	7	4
9	Tanjab Timur	5	8	8	6	4
10	Kota Jambi	6	7	3	4	2
11	Kota Sei Penuh	4	2	2	2	2
Provinsi		48	56	59	59	54

Sumber: Dinas Kesehatan, 2019

Data jumlah kematian ibu di Provinsi Jambi cenderung berfluktuatif, dan memperlihatkan penurunan pada tahun 2018. Berdasarkan kasus kematian yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi pada tahun 2019, jumlah kematian ibu di Provinsi Jambi Tahun 2018 adalah sebanyak 54 kasus, dengan jumlah kematian ibu terbanyak terdapat pada Kabupaten Bungo dengan 12 kasus, sedangkan yang paling

sedikit terdapat pada Kabupaten Muaro Jambi, Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh yaitu masing-masing 2 kasus. Jumlah Kematian Ibu ini berkaitan dengan berbagai sebab, baik langsung maupun tidak langsung. Penyebab langsung (*Direct Obstetric Death*) kematian ibu antara lain adalah komplikasi obstetri pada masa hamil, bersalin dan nifas, atau kematian yang disebabkan oleh suatu tindakan, atau berbagai hal yang terjadi akibat tindakan yang dilakukan selama hamil, bersalin atau nifas terkait erat dengan faktor penolong persalinan (tenaga) dan tempat/fasilitas persalinan.

Tabel 3.9 Proporsi riwayat jenis komplikasi kehamilan yang pernah dialami oleh perempuan 10-54 tahun selama masa kehamilan menurut karakteristik

Karakteristik	Riwayat Komplikasi		Jenis komplikasi kehamilan									
	%	N tertimbang	Muntah/ diare terus menerus	Demam tinggi	Hipertensi	Janin kurang bergerak	Pendarahan pada jalan lahir	Keluar air ketuban	Bengkak kaki disertai kejang	Batuk lama	Nyeri dada/ jantung berdebar	Lainnya
<b>Umur saat bersalin (tahun)</b>												
10 - 14	37,14	4	37,14	37,14								
15 - 19	21,21	142	16,64	3,49	3,00			2,36	2,66	2,51	2,17	
Remaja (10-19)	21,65	146	17,21	4,43	2,91			2,29	2,58	2,44	2,11	
20 - 24	17,05	436	14,31	2,43	1,47		1,89	1,80	1,27	0,28	0,45	4,15
25 - 29	21,46	501	15,91	2,88	2,85	0,66	1,49	1,18	0,79	1,79	0,91	2,74
30 - 34	17,15	393	12,24	2,12	1,09	0,36	2,19	0,86	1,41	2,30	0,76	3,64
35 - 39	19,60	200	14,70	3,26	3,19	1,01	1,83	1,04	0,42	1,52	0,85	1,57
40 - 44	21,24	63	10,90	3,26	4,36	2,09	5,33	3,59	2,07	2,69	2,09	7,71
45 - 49	24,21	12			7,58		10,72	5,91				
50 - 54	23,27	1										
15 - 49*	19,17	1.747	14,32	2,68	2,25	0,46	1,87	1,46	1,20	1,58	0,89	3,10
<b>Pendidikan ibu</b>												
Tidak pernah sekolah	13,37	26	13,37								3,60	3,60
Tidak tamat SD/MI	23,96	105	20,62	8,08	3,39		1,31	4,57	0,87	0,65	2,21	1,64
Tamat SD/MI	20,91	371	15,42	2,73	1,86		2,77	2,07	1,41	2,17	1,12	2,48

Karakteristik	Riwayat Komplikasi		Jenis komplikasi kehamilan									
	%	N tertimbang	Muntah/ diare terus menerus	Demam tinggi	Hiper- tensi	Janin kurang bergerak	Pendarahan pada jalan lahir	Keluar air ketuban	Bengkak kaki disertai kejang	Batuk lama	Nyeri dada/ jantung berdebar	Lain nya
Tamat SLTP/MTS	17,15	435	13,85	2,44	2,15	0,30	0,85	0,65	0,56	2,41	0,76	4,03
Tamat SLTA/MA	18,43	608	13,32	2,29	2,27	0,33	2,05	1,45	1,69	0,92	0,27	2,85
Tamat D1/D2/D3/PT	21,06	208	13,58	2,53	2,74	2,26	2,30	0,71	1,04	1,34	1,59	3,60
<b>Pekerjaan kepala keluarga</b>												
Tidak bekerja	17,59	1.171	12,95	2,24	2,31	0,11	1,28	1,75	1,09	1,36	0,96	3,09
Sekolah	12,94	8	12,94	12,94			12,94			12,94		
PNS/ TNI/ Polri/ BUMN/ BUMD	18,76	68	12,73	1,52	0,62	2,84	1,90		1,72	0,62	0,49	2,96
Pegawai swasta	24,37	67	19,56	2,48		4,61	2,76	2,04	1,73			
Wiraswasta	18,46	109	12,36	2,56	3,88	0,15	3,07	1,90	2,19	0,55		7,06
Petani/buruh tani	22,93	194	19,95	3,75	1,67	0,80	1,68	0,33	0,71	1,29		2,58
Nelayan		1										
Buruh/ supir/ pembantu ruta	31,55	14	20,39		7,30			7,30		11,16	7,30	0,27
Lainnya	26,05	121	18,45	6,95	2,76		5,67		1,79	4,56	2,49	2,70
<b>Daerah tempat tinggal</b>												
Perkotaan	19,61	513	13,82	2,99	2,49	0,73	2,41	1,86	1,06	1,44	0,56	4,45
Perdesaan	19,03	1.239	14,59	2,67	2,14	0,34	1,63	1,29	1,25	1,63	1,03	2,53
<b>Prov. Jambi</b>	19,20	1.752	14,36	2,76	2,24	0,46	1,86	1,46	1,20	1,57	0,89	3,09

Sumber: Dinas Kesehatan, 2019

Berdasarkan data riwayat jenis komplikasi kehamilan yang pernah dialami oleh perempuan 10-54 tahun selama masa kehamilan di Provinsi Jambi Tahun 2018, jenis komplikasi yang paling sering dialami adalah muntah/ diare terus menerus dan komplikasi yang paling jarang dialami adalah janin kurang bergerak. Bila dilihat lebih dalam, jenis komplikasi muntah/ diare terus menerus tersebut paling banyak dialami oleh perempuan hamil berumur 10-14 tahun, tingkat pendidikan ibu tamat SD/MI dengan pekerjaan kepala keluarga buruh/supir/ pembantu rumah tangga. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa hal ini berhubungan dengan tingkat pengetahuan dan umur ibu yang kurang memadai serta dapat dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan keluarga yang biasanya berkaitan dengan sanitasi yang buruk.

Pemerintah Daerah terus berupaya melakukan pelayanan terhadap ibu hamil ataupun ibu bersalin dan nifas guna menekan jumlah kematian ibu, antara lain mendorong ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan rutin kehamilannya serta meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan melalui pemenuhan tenaga kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak serta peningkatan kemampuan tenaga kesehatan yang membantu proses melahirkan. Bila dilihat dari data cakupan penolong persalinan, masyarakat di Provinsi Jambi lebih banyak memilih bidan sebagai penolong persalinan, serta penggunaan tenaga dukun pada posisi kedua dan dokter kandungan pada posisi ketiga. Jika melihat preferensi ini, maka perlu peningkatan pengetahuan kepada tenaga kesehatan seperti bidan di Provinsi Jambi serta pelatihan bagi dukun-dukun beranak yang ada agar dapat menolong proses persalinan dengan aman dan selamat.

Tabel 3.10 Cakupan penolong persalinan least qualify yang pernah dimanfaatkan perempuan 10-54 tahun menurut karakteristik

Karakteristik	Penolong persalinan <i>least qualify</i> *					
	dr kandungan	dr umum	bidan	perawat	dukun	keluarga/ lainnya
<b>Umur saat bersalin (tahun)</b>						
10-14						
15-19	4,43		57,22	2,61	34,64	
Remaja			56,07	2,54	36,02	
20-24	8,27	0,04	65,65	3,28	22,61	0,15
25-29	11,57	0,23	67,13	2,55	18,51	
30-34	16,58	0,07	63,35	2,87	16,80	0,34
35-39	16,16	1,39	62,88	2,31	17,26	
40-44	15,21		55,20	4,83	23,02	1,74
45-49	38,81		42,71		18,48	
50-54					100,00	
15-49*	12,11	0,25	64,04	2,84	20,50	0,17
<b>Pendidikan terakhir</b>						
Tidak pernah sekolah	14,38		48,88		36,74	
Tidak tamat SD/MI	5,51		53,59		40,29	0,61
Tamat SD/MI	5,79		54,90	3,93	35,38	
Tamat SLTP/MTS	11,06	0,30	63,55	2,70	22,03	
Tamat SLTA/MA	11,90	0,40	73,02	1,87	12,57	0,22
Tamat D1/D2/D3/PT	29,10	0,26	61,26	5,81	3,06	0,50
<b>Pekerjaan</b>						
Tidak bekerja	10,79	0,18	64,17	2,16	22,40	0,17
Sekolah			67,11		32,89	
PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD	42,46		48,21	6,04	1,78	1,51
Pegawai swasta	24,63		72,23	1,07	2,07	
Wiraswasta	13,94	1,98	66,39	5,59	12,09	
Petani/buruh tani	3,87		64,02	2,27	29,84	
Nelayan				100,00		
Buruh/supir/pembantu ruta	20,05		62,68		17,27	
Lainnya	12,26		63,49	7,06	17,19	
<b>Tempat tinggal</b>						
Perkotaan	21,76	0,46	66,27	3,34	8,16	
Perdesaan	8,08	0,16	62,91	2,63	25,84	0,24
<b>Prov. Jambi</b>	12,07	0,25	63,89	2,84	20,69	0,17

Sumber: Dinas Kesehatan, 2019

Selain AKI, situasi derajat kesehatan digambarkan pula oleh Angka Kematian Bayi (AKB). Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate* (IMR) dapat didefinisikan sebagai banyaknya bayi meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka kematian bayi (*Infant Mortality Rate*) merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum. Angka ini sangat sensitif terhadap perubahan tingkat kesejahteraan dan kesehatan, dimana dapat didefinisikan sebagai kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu bulan.

Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Jambi yang digunakan adalah data SDKI yang dirilis setiap 5 tahun sekali, dan data terakhir yang dirilis adalah hasil SDKI 2017 yang baru saja dirilis. Berdasarkan data SDKI 2017, terlihat bahwa telah terjadi kecenderungan penurunan AKB di Provinsi Jambi dari 34 kematian per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2012 menjadi 24 kematian per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2017. Penurunan ini cukup menggembirakan dan menggambarkan keberhasilan Pemerintah Provinsi Jambi dalam menurunkan angka tersebut.

Upaya kesehatan yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi di Provinsi Jambi sudah cukup banyak, diantaranya adalah PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) di puskesmas-puskesmas yang ada di Provinsi Jambi dan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) 24 Jam pada rumah sakit milik pemerintah daerah (RSUD). Dari 13 RSUD yang ada di Provinsi Jambi, 11 diantaranya telah melaksanakan PONEK 24 jam. Faktor penyebab 2 RSUD yang belum melaksanakan PONEK 24 jam tersebut adalah tenaga dokter spesialis kandungan dan anak yang bekerja masih separuh waktu sehingga pelayanan PONEK belum optimal.

Selain itu dilakukan pula imunisasi yang merupakan kegiatan rutin dan terintegrasi dalam pelayanan dasar di Puskesmas, Rumah Sakit dan unit-unit pelayanan lainnya termasuk di pos pelayanan terpadu (Posyandu). Imunisasi juga telah memberikan kontribusi dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian pada bayi khususnya yang disebabkan oleh penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti difteri, pertusis, tetanus neonatorum, polio dan penyakit campak. Hal tersebut akan lebih cepat tercapai apabila cakupan imunisasi rutin dapat dipertahankan tetap tinggi setiap tahun dan merata sampai ketinggian desa/kelurahan (UCI Desa).

Dalam rangka perbaikan gizi masyarakat sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Jambi antara lain melaksanakan perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi dan peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi dan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi.

Berdasarkan data hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada balita mencapai 19,7 persen. Setelah dilaksanakan upaya-upaya penurunan prevalensi tersebut, maka telah terjadi penurunan terhadap Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita menjadi 10,8 persen pada tahun 2018 berdasarkan data EPPGM. Hal ini membuktikan bahwa telah berhasil menurunkan prevalensi sebesar 45,18 persen dalam kurun 5 tahun tersebut. Bila dilihat per kabupaten/ kota, terlihat bahwa Kabupaten Merangin memiliki prevalensi tertinggi, diikuti oleh Kota Sungai Penuh dan Kota Jambi pada urutan 2 dan 3. Sedangkan Kabupaten dengan prevalensi terendah adalah kabupaten Muaro Jambi.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi untuk menurunkan angka ini, diantaranya adalah memberikan pelayanan kesehatan pada anak balita meliputi; pemeriksaan kesehatan anak balita secara berkala; penyuluhan pada orang tua (kebersihan anak, perawatan gigi, perbaikan gizi/ pola pemberian makan anak, kesehatan lingkungan, perawatan anak saat sakit, dan menjauhkan anak dari bahaya); penyuluhan cara menstimulasi perkembangan anak; imunisasi dan upaya pencegahan penyakit; pemberian vitamin A dimana Kapsul Vitamin A berwarna merah diberikan 2 kali dalam setahun; dan identifikasi tanda kelainan dan penyakit yang mungkin timbul pada bayi dan cara menanggulangnya.

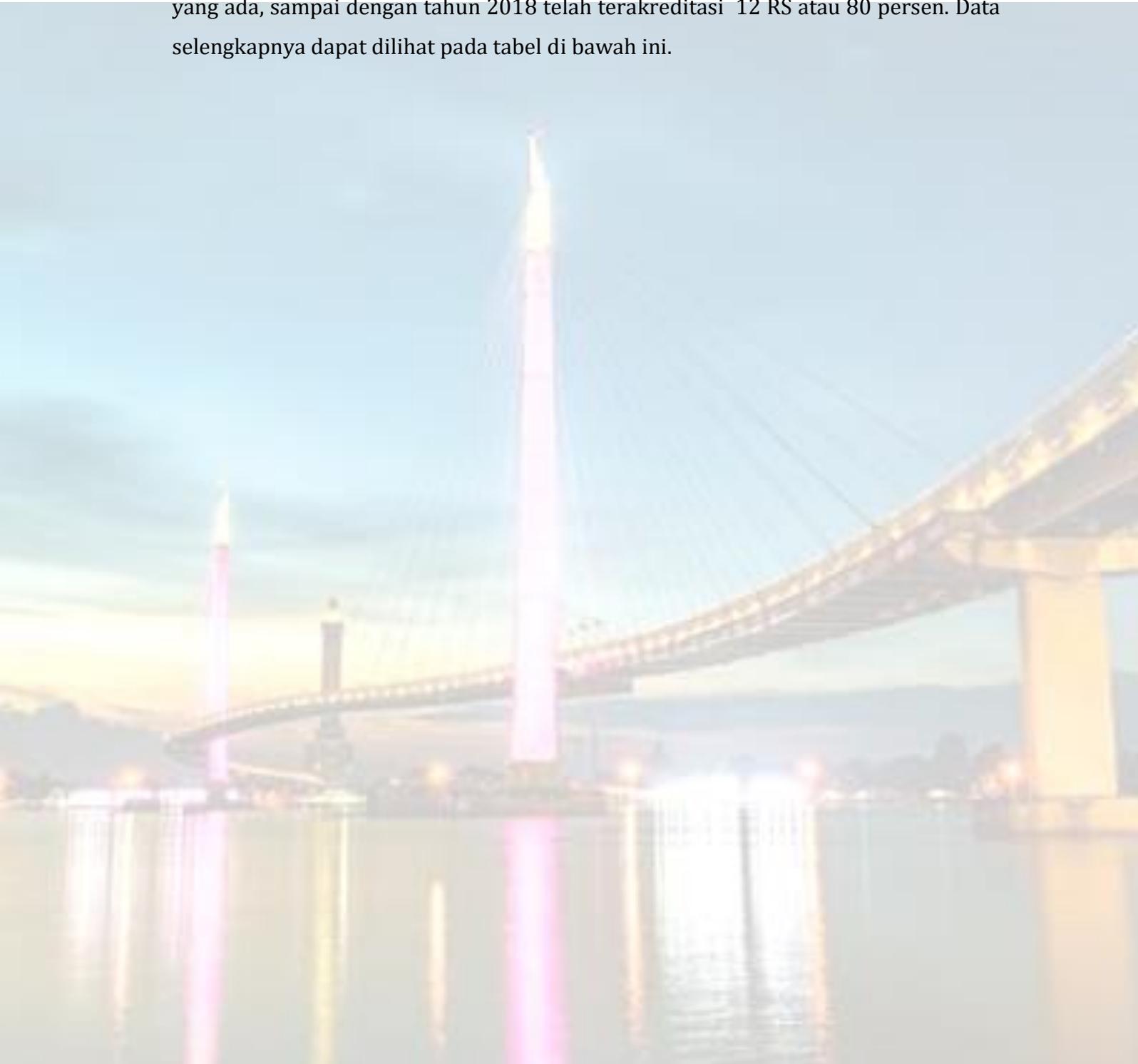
Khusus pada balita yang tergolong kurus, hampir semua balita kurus mendapat makanan tambahan di provinsi Jambi. Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan pada tahun 2018 adalah sebanyak 92,58%. Tabel di bawah memperlihatkan bahwa terdapat satu kabupaten dengan persentase dibawah 90% yakni kabupaten Merangin. Hal ini dimungkinkan menjadi salah satu penyebab Kabupaten ini memiliki prevalensi tertinggi di Provinsi Jambi.

Tabel 3.11 Persentase Balita kurus yang Mendapatkan Makanan Tambahan di Provinsi Jambi Tahun 2016-2018

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN		
		2016	2017	2018
1	Kerinci	81,18	100,00	100,00
2	Kota Sungai penuh	100,00	95,24	100,00
3	Merangin	79,09	84,53	66,98
4	Sarolangun	100,00	88,60	98,79
5	Batang Hari	100,00	100,00	99,40
6	Muaro Jambi	88,61	100,00	100,00
7	TanjabTimur	93,62	98,79	100,00
8	Tanjab Barat	73,16	73,16	99,11
9	Tebo	100,00	90,69	100,00
10	Bungo	80,57	100,00	100,00
11	Kota Jambi	98,97	92,90	97,86
	<b>Provinsi</b>	81,23	92,88	92,58

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2019

Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan secara umum di Provinsi Jambi, maka Pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong kabupaten/ kota untuk memiliki minimal 1 rumah sakit Pemerintah Terakreditasi. Dari 15 RS Pemerintah yang ada, sampai dengan tahun 2018 telah terakreditasi 12 RS atau 80 persen. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 3.12 Status Akreditasi Rumah Sakit Pemerintah di Provinsi Jambi

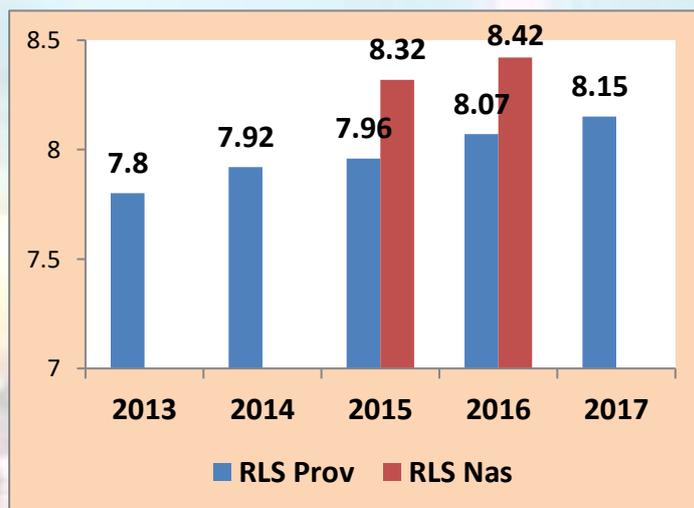
NO	KAB/KOTA	RUMAH SAKIT DAERAH DAERAH	TYPE	AKREDITASI 2016	AKREDITASI 2017	AKREDITASI 2018
1	KERINCI	RSUD Mayjen H.A Thalib	C	Belum Terakreditasi	Belum Terakreditasi	Belum Terakreditasi
2	MERANGIN	RSUD Kolonel Abundjani Bangko	C		Tingkat Utama	Tingkat Utama
3	SAROLANGUN	RSUD Prof. Dr. H. Chatib Quzwain	C	Lulus Perdana	Lulus Perdana	Lulus Perdana
4	BATANGHARI	RSUD Haji Abdoel Madjid Batoe	C		Tingkat Paripurna	Tingkat Paripurna
5	MUARO JAMBI	RSUD Ahmad Ripin Muaro Jambi	C	Lulus Perdana	Lulus Perdana	Lulus Perdana
		RSUD Sungai Bahar	D	Belum Terakreditasi	Belum Terakreditasi	Belum Terakreditasi
		RSUD Sungai Gelam	D	Belum Terakreditasi	Belum Terakreditasi	Lulus Perdana
6	TANJAB TIMUR	RSUD Nurdin Hamzah Sabak	C	Lulus Perdana	Lulus Perdana	Lulus Perdana
7	TANJAB BARAT	RSUD KH. Daud Arif Tungkal	C	Lulus Perdana	Lulus Perdana	Lulus Perdana
8	TEBO	RSUD Sulthan Thaha Saifuddin Tebo	C	Lulus Perdana	Lulus Perdana	Lulus Perdana
9	BUNGO	RSUD H. Hanafie Bungo	B	Tingkat Utama	Tingkat Utama	Tingkat Utama
10	KOTA JAMBI	RSUD Abdul Manap Kota Jambi	C	Tingkat Madya	Tingkat Madya	Tingkat Utama
		RSUD Abdul Rahman Sayuti	D		Belum Terakreditasi	Belum Terakreditasi
		RSUD Raden Mattaher	B	Tingkat Paripurna	Tingkat Paripurna	Tingkat Paripurna
		RSJD Provinsi Jambi	B	Tingkat Paripurna	Tingkat Paripurna	Tingkat Paripurna
<b>PERSENTASE</b>				<b>63.64%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2019

## 2. Dimensi Pengetahuan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi peningkatan taraf kehidupan, sudah selayaknya masyarakat mengedepankan pendidikan sebagai salah satu kebutuhan. Pendidikan sendiri merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan sebuah proses belajar mengajar agar peserta didik menjadi aktif dan berkembang dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator pembentuk IPM yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Beberapa informasi yang digunakan untuk menghitung rata-rata lama sekolah adalah partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang disusuki, ijazah tertinggi yang dimiliki, dan tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki.



Sumber: BPS, 2018

Gambar 3-7 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jambi dibanding nasional tahun 2013-2017

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun keatas Provinsi Jambi pada tahun 2017 sebesar 8,15 tahun atau mengalami kenaikan 0,08 tahun dari capaian tahun sebelumnya. Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk Provinsi Jambi baru mampu menempuh pendidikan sampai kelas 2 (dua) atau kelas 3 (tiga) SMP. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan

RLS ini adalah memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antar jenjang pendidikan.

Kesempatan seluas-luasnya telah diberikan kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan. Dengan berbagai upaya, pemerintah melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan pada tahun

2018 sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi. Upaya yang dilakukan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 158 Sekolah Menengah Atas dan 102 Sekolah Menengah Kejuruan
2. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN dalam Provinsi Jambi sebanyak 73 ruang dan pembangunan Laboratorium IPA sebanyak 25 ruang.
3. Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN dalam Provinsi Jambi sebanyak 16 ruang
4. Pengadaan Peralatan Praktek Labor Komputer SMAN dalam Provinsi Jambi sebanyak 21 paket dan Peralatan Laboratorium IPA sebanyak 34 ruang.
5. Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMKN dalam Provinsi Jambi sebanyak 17 ruang dan pemenuhan peralatan praktek SMKN untuk 16 ruang praktek
6. Pengadaan Meubiler SMAN untuk 81 ruang dan SMKN sebanyak 49 ruang.

Upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan RLS adalah pemberian beasiswa, dimana pada tahun 2018 telah disalurkan 3.870 beasiswa kepada siswa jenjang SMA, SMK dan Pendidikan Khusus, 100 beasiswa untuk mahasiswa jenjang D3, 350 beasiswa untuk mahasiswa jenjang S1, 125 beasiswa untuk mahasiswa jenjang S2 dan 9 beasiswa untuk dokter spesialis.

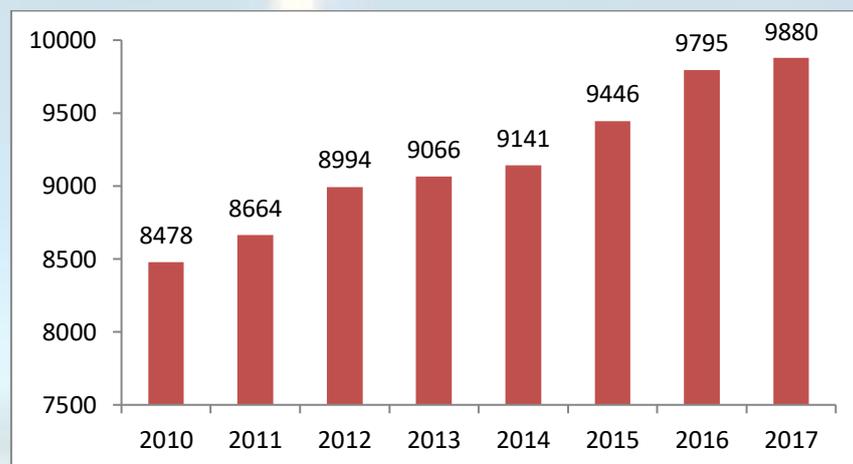
Salah satu Indikator untuk mengukur keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan menengah adalah tingkat kelulusan peserta didiknya. Untuk Provinsi Jambi, tingkat kelulusan SMA pada tahun 2018 adalah sebesar 99,02% dan SMK sebesar 98,57% . Tingkat kelulusan ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2016 yang baru mencapai 98,79%. Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan maka capaian realisasinya mencapai termasuk dalam kategori **sangat tinggi**.

Indikator lainnya yang digunakan untuk mengukur keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan menengah adalah sejauh mana angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi terakreditasi minimal B. Perguruan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program sarjana, magister, doktor dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Angka melanjutkan ke PT akreditasi minimal B yang dimaksud pada indikator ini adalah angka melanjutkan ke program D I/ D II/ D III/ D IV/ Sarjana. Untuk Provinsi Jambi, Angka melanjutkan ke PT akreditasi minimal B pada tahun 2018 adalah 47,91% untuk lulusan SMA dan 24,03% untuk lulusan SMK. Tingkat kelulusan ini bila dibandingkan dengan target

yang telah ditetapkan pada tahun 2018 maka capaian realisasinya termasuk dalam kategori **sangat tinggi**.

### 3. Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang dipresentasikan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan (harga konstan 2012). Pada tahun 2017, pengeluaran perkapita masyarakat Provinsi Jambi mencapai Rp9,880 juta per tahun. Selama tujuh tahun terakhir, pengeluaran per kapita masyarakat meningkat sebesar 2,36 persen per tahun.



Sumber: BPS, 2018

Gambar 3-8 Pengeluaran per kapita Provinsi Jambi Tahun 2010-2017

Capaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia tidak terlepas dari upaya-upaya peningkatan ketiga dimensi di atas. Adapun program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung upaya tersebut pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Upaya Kesehatan Perorangan
3. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
4. Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan
5. Program Peningkatan Balai Kesehatan Provinsi Jambi

6. Program Pengembangan Akademi Analis Kesehatan
7. Program Pengembangan Akademi Farmasi
8. Program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan
9. Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
10. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
12. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
13. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
14. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
15. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
16. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
17. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
18. Program peningkatan sarana dan Prasarana olahraga dan pemuda
19. Program Kesehatan Ibu dan Anak
20. Program kesehatan anak balita
21. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
22. Program Pendidikan SMA
23. Program Pendidikan SMK
24. Program Beasiswa dan BOSDA
25. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

**Permasalahan:**

1. Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk di Provinsi Jambi berdasarkan indikator Indonesia Sehat telah memenuhi standar minimal namun belum

tersebar merata sesuai kebutuhan pada masing-masing kabupaten/ kota se-  
Provinsi Jambi.

2. Pola pengasuhan (perawatan, pemberian makanan dan lain-lain) anak balita yang berkembang di masyarakat masih dilakukan sesuai dengan kebiasaan turun-temurun yang kadangkala belum sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan.
3. Integrasi program gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak di tingkat pelaksana (puskesmas dan jaringannya) belum optimal.
4. Kesenjangan kemampuan siswa yang cukup tinggi di seluruh Kabupaten/ kota se-  
Provinsi Jambi serta kepercayaan diri siswa untuk bersaing dengan siswa lainnya secara nasional masih harus terus didorong.
5. Ujian Nasional berbasis komputer merupakan salah satu kendala bagi SMA dan SMK di Provinsi Jambi, baik dari segi sarana prasarana juga kesiapan siswa dalam menghadapinya.
6. Kesenjangan kualitas sekolah menengah masih cukup tinggi

#### **Solusi:**

1. Standarisasi pelayanan kesehatan di Provinsi Jambi
  2. Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan untuk memenuhi kekurangan tenaga kesehatan di wilayah terpencil.
  3. Pemberdayaan posyandu dan puskesmas serta tenaga kesehatan untuk terus mengintensifkan penyuluhan kepada para orang tua agar menerapkan cara hidup sehat khusus balita seperti pemeriksaan kesehatan anak balita secara berkala, menjaga kebersihan anak, perawatan gigi, perbaikan gizi/ pola pemberian makan anak, kesehatan lingkungan, perawatan anak saat sakit, menjauhkan anak dari bahaya, menstimulasi perkembangan anak, imunisasi dan upaya pencegahan penyakit, pemberian vitamin A dan identifikasi tanda kelainan dan penyakit yang mungkin timbul pada bayi dan cara menanggulangnya.
  4. Bimbingan teknis dan pendampingan secara berkelanjutan pada puskesmas dan jaringannya sehingga integrasi program gizi dan kesehatan ibu dan anak dapat berjalan optimal dan melaporkan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang telah ditetapkan.

5. Penyediaan sarana prasarana sekolah terstandar nasional serta mengintensifkan *try out*.
6. Perbaikan sarana-prasarana sekolah, peningkatan kapasitas guru sekolah menengah, uji coba kompetisi tingkat nasional dan internasional serta pemberian motivasi kepada siswa-siswa SMA dan SMK harus terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas lulusannya.
7. Pemberian beasiswa di seluruh jenjang pendidikan
8. Distribusi guru secara merata

### ***Sasaran Strategis 3***

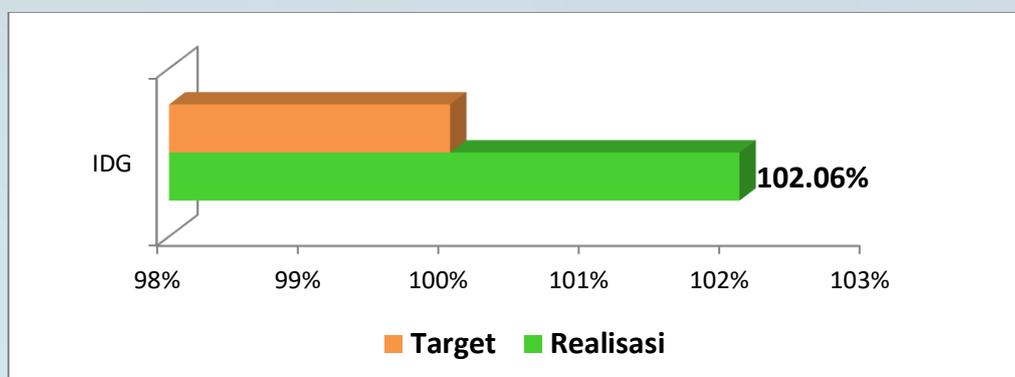
#### ***Meningkatnya Kapabilitas dan Partisipasi Perempuan di Berbagai Bidang Kehidupan***

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah secara resmi telah menganut dan menetapkan kesepakatan atas persamaan antara perempuan dan laki-laki sebagaimana termuat dalam UUD 1945 Pasal 27. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia perempuan dipandang sebagai penyebab kurang terbukanya akses perempuan dalam hal perbaikan sumber daya. Sehingga, kaum perempuan tidak dapat bersaing dengan kaum laki-laki di dalam pembangunan. Hal ini tentu saja menghambat kemajuan perempuan yang juga menghambat terwujudnya masyarakat adil dan sejahtera secara umum.

Dalam SDGs, isu gender masih menjadi salah satu agenda pembangunan. Adapun tujuan pembangunan gender yang ingin dicapai adalah kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan dengan target pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap individu khususnya perempuan dan anak; pengakhiran diskriminasi dan kesenjangan dalam pelayanan publik, penegakan hukum, akses terhadap keadilan dan partisipasi dalam kehidupan politik dan ekonomi berbasis gender; serta kesehatan seksual dan reproduksi dengan semua hak-haknya.

Dalam rangka mendukung target SDGs tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi menjadikan peningkatan kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan sebagai salah satu sasaran strategis yang ingin dicapai. Indikator yang digunakan untuk menunjukkan capaian sasaran strategis ini adalah Indeks

Pemberdayaan Gender (IDG), yang capaiannya pada tahun 2018 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3-9 Capaian sasaran meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan

### 1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Gender dapat diartikan sebagai aspek hubungan sosial yang dikaitkan dengan diferensiasi seksual pada manusia. Pembangunan manusia berbasis gender merupakan salah satu indikator yang menjadi perhatian dunia karena perempuan seringkali mengalami diskriminasi seperti dijadikan objek eksploitasi, mengalami kekerasan, subordinasi, dan adanya upaya marginalisasi perempuan. Perempuan merupakan faktor penting dalam pembangunan. Hal ini mengingat dari sisi jumlah penduduk, perempuan menempati jumlah yang lebih besar dibanding laki-laki. Meski demikian, pembangunan yang dilaksanakan selama ini seringkali masih menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dan cenderung menguntungkan laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari nilai IPG yang lebih rendah dari IPM. Indeks Pembangunan gender (IPG) yang merupakan turunan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), merupakan salah satu ukuran pencapaian pembangunan gender. Melalui angka IPG, kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan mampu dijelaskan dengan melihat rasio antara IPM perempuan dengan laki-laki. Semakin tinggi rasionya (mendekati 100) maka semakin rendah gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, demikian pula sebaliknya.

Di samping IPG, indikator kesetaraan gender lainnya yang bersifat makro dan menunjukkan capaian dalam upaya meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG merupakan indikator untuk melihat peranan perempuan dalam ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. IDG merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan partisipasi perempuan di parlemen, perempuan dalam angkatan kerja, perempuan pekerja profesional, pejabat tinggi, dan manajer, serta upah pekerja perempuan di sektor non-pertanian.

Tabel 3.13 Capaian Kinerja indikator Indeks pemberdayaan gender (IDG)

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja						Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2018	
	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017	2018				
					Target	Realisasi			% capaian
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,93	62,43	63,14	65,32	64,0	65,32*)	102,06 %	67,01	97,48%

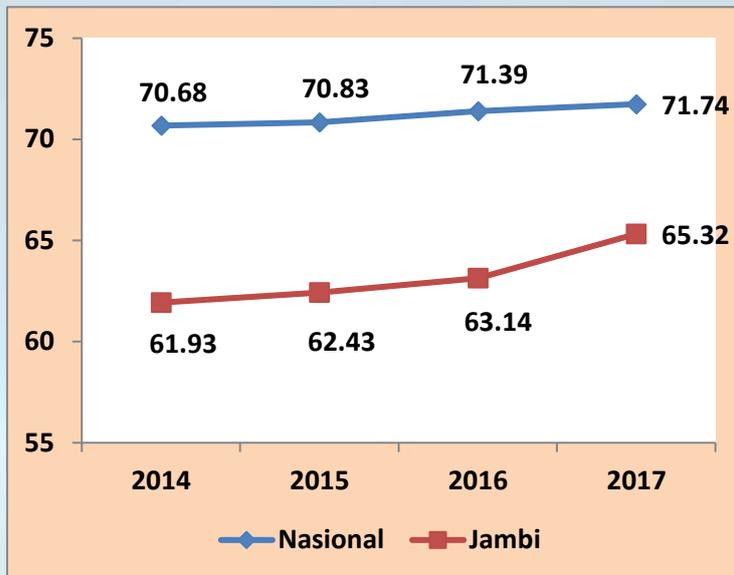
Sumber: BPS, 2018

Ket: \*) data n-1

Sama halnya dengan IPG, penghitungan IDG juga dilakukan setiap tahun dan data yang dikeluarkan pada tahun bersangkutan menggambarkan kondisi tahun sebelumnya. IDG Provinsi Jambi yang dirilis pada tahun 2018 (kondisi Tahun 2017) adalah 65,32 atau melebihi target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar 102,06% atau masuk dalam kategori **sangat tinggi**. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 juga masuk dalam kategori sangat tinggi dengan tingkat capaian 97,48%.

Capaian IDG Provinsi Jambi sebagaimana digambarkan pada gambar disamping, masih berada di bawah capaian nasional dengan tren meningkat setiap tahunnya. Bila digambarkan dalam diagram pengelompokkan capaian IPM dan IDG, maka Provinsi Jambi masuk dalam kuadran 3 yaitu provinsi dengan IPM dan IDG di bawah rata-rata nasional. Dari 3 komponen pembentuk IDG, yaitu keterlibatan perempuan di Parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan

pendapatan perempuan; komponen dengan nilai terendah adalah keterlibatan perempuan di parlemen, disusul oleh komponen sumbangan pendapatan perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen di Provinsi Jambi masih jauh dari harapan dan pendapatan perempuan masih jauh di bawah laki-laki.

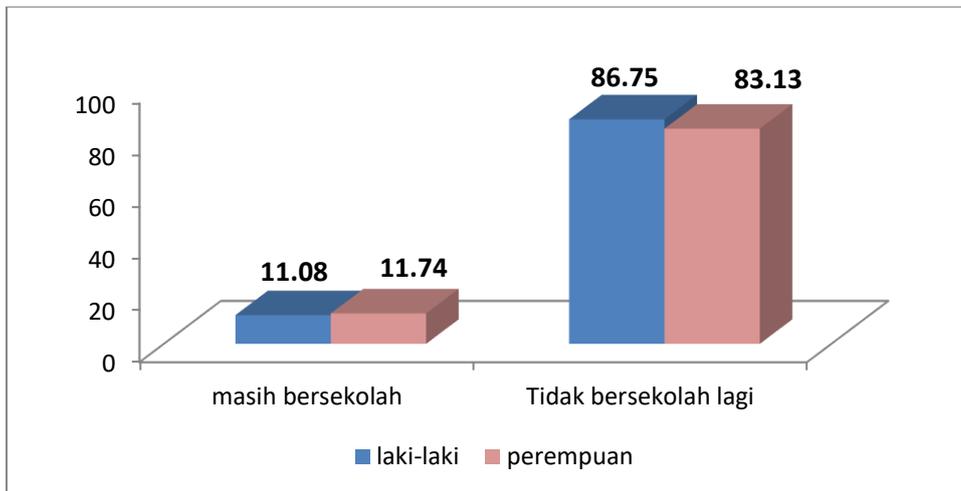


Sumber: BPS, 2018

Gambar 3-10 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jambi Tahun 2014-2017

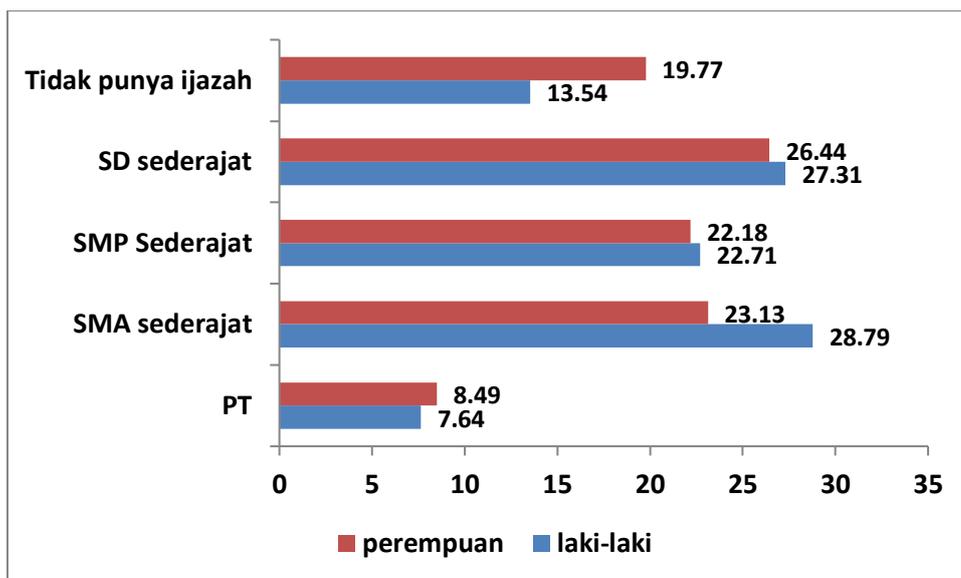
Keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional berhubungan erat dengan akses perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Berdasarkan data susenas tahun 2017, akses perempuan dalam hal pendidikan di Provinsi Jambi menunjukkan perkembangan yang baik. Jumlah penduduk yang masih bersekolah antara laki-laki dan perempuan hampir sama, bahkan jumlah

perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Dilihat dari tingkat pendidikan, secara umum perempuan memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki, dimana pada jenjang SD, SMP dan SMA sederajat masih didominasi oleh laki-laki. Walaupun pada jenjang perguruan tinggi didominasi oleh perempuan namun dengan kesenjangan yang tidak terlalu besar.



Sumber: Susenas 2017, BPS, 2018

Gambar 3-11 Persentase Penduduk 15 tahun keatas yang masih sekolah menurut jenis kelamin di Provinsi Jambi Tahun 2017.



Sumber: Susenas 2017, BPS, 2018

Gambar 3-12 Persentase penduduk berumur 15 tahun keatas menurut jenis kelamin dan pendidikan terakhir yang ditamatkan di Provinsi Jambi Tahun 2017

Kesetaraan gender untuk mengakses pendidikan harus diperhatikan lagi sehingga perempuan dapat meningkatkan investasi *human capital*-nya. Seiring

dengan itu, akses perempuan untuk mendapatkan posisi senior ataupun pemimpin harus diperluas mengingat saat ini perempuan masih sulit menempati posisi tersebut meskipun sudah bergelar tinggi. Fakta bahwa tingkat pendidikan mampu meningkatkan upah bagi perempuan tidak bisa dipungkiri. Pada tahun 2017, hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi persentase buruh/ karyawan/ pegawai perempuan yang menerima upah dibawah UMP lebih besar dibandingkan laki-laki kecuali Kabupaten Tebo. Persentase terbesar berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana 87,70 persen buruh/karyawan/pegawai perempuan di kabupaten tersebut menerima upah dibawah UMP. Sedangkan persentase terendah adalah di Kota Jambi yaitu sebanyak 44,61%. Hal ini mengindikasikan bahwa pekerja perempuan di Kota Jambi memiliki spesifikasi kerja yang dapat bersaing dengan pekerja laki-laki.

Sebagai upaya untuk meningkatkan IDG ini maka Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan **Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak** dengan melakukan beberapa kegiatan pendukung, yaitu Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A), pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan Keadilan Gender, Pembinaan Penilaian Perusahaan Pembina Terbaik Tenaga Kerja Perempuan dan Pembinaan Organisasi Perempuan. Program ini secara parsial didukung pula oleh beberapa program lain seperti **program perwujudan demokrasi makin kokoh** dan lain-lain.

#### **Permasalahan:**

1. Capaian IDG Provinsi Jambi masih dibawah rata-rata nasional akibat terbatasnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Provinsi Jambi sehingga menyebabkan rendahnya keterlibatan perempuan di parlemen, rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dan terbatasnya jumlah perempuan sebagai tenaga profesional.

#### **Solusi:**

1. Perluasan akses pendidikan bagi perempuan

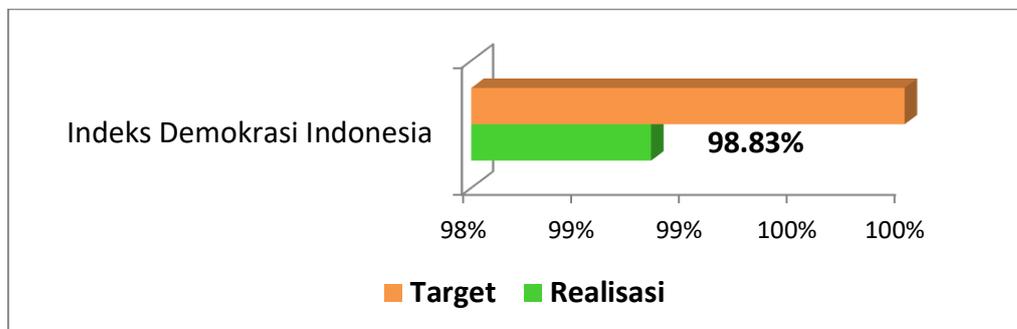
2. Perluasan akses bagi perempuan untuk berkiprah dalam dunia profesional sebagaimana halnya laki-laki dengan pemberian hak dan kewajiban yang sama antar keduanya.

#### **Sasaran Strategis 4**

##### **Terwujudnya Ketertiban Umum Daerah**

Penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen).

Dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dilakukan beberapa langkah preventif dengan menjaga kerukunan umat beragama serta pemetaan potensi konflik dan pencegahan terjadinya konflik, dan lain-lain. Adapun indikator yang digunakan untuk menggambarkan capaian sasaran strategis ini adalah Indeks Demokrasi Indonesia, dengan capaian tahun 2018 sebagaimana tergambar di bawah ini.



Gambar 3-13 Capaian Sasaran terwujudnya Ketertiban Umum Daerah Tahun 2018

#### **1. Indeks Demokrasi Indonesia**

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dihitung dari 3 aspek, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi. Kebebasan sipil meliputi kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan

berkeyakinan serta kebebasan dari diskriminasi. Aspek hak-hak politik dilihat dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, sedangkan aspek lembaga demokrasi dilihat dari Pemilu, peran DPRD, peran Parpol, peran birokrasi dan peran peradilan yang independen.

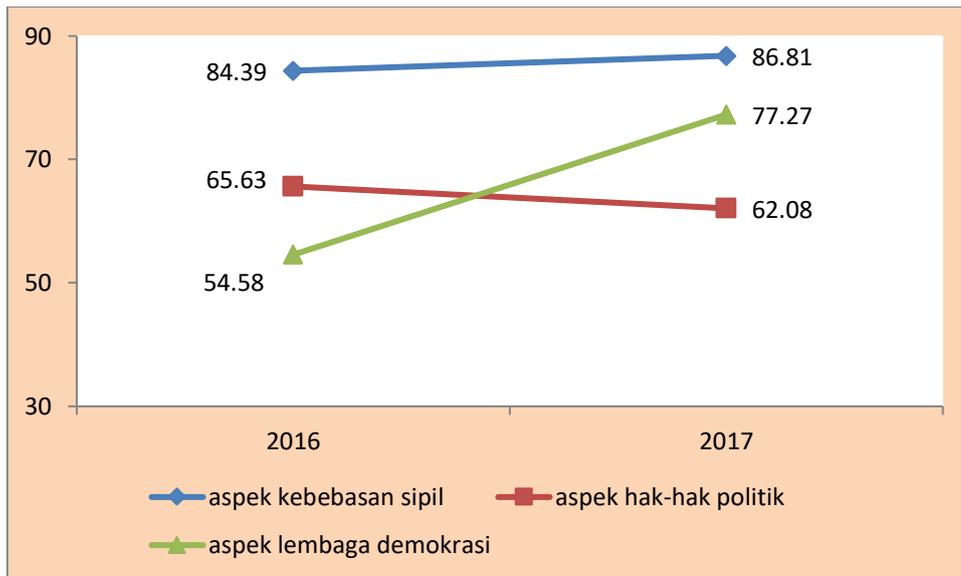
Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja Indeks Demokrasi Indonesia

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2018
	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017	2018				
					Target	Realisasi	% capaian		
Indeks Demokrasi Indonesia	71,15	70,68	68,89	74,12	75,0	74,12*)	98,83%	79,0	93,82%

Sumber: IDI, BRS, 2018

Ket: \*) data IDI tahun 2017 yang dirilis tahun 2018

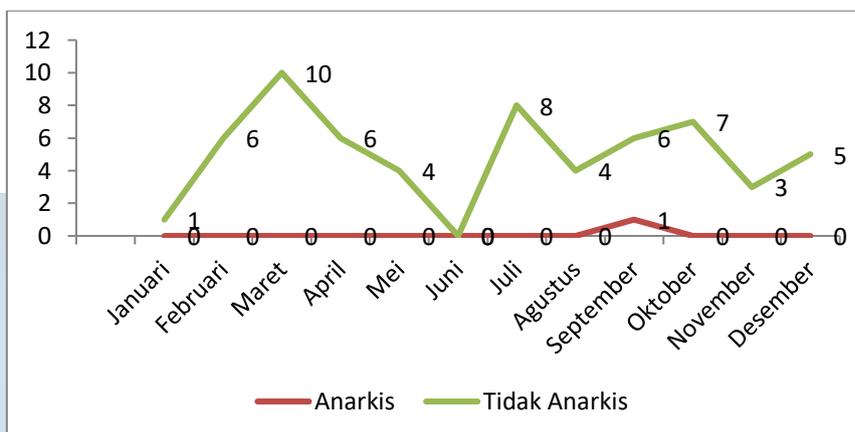
Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dikeluarkan pada tahun tertentu (n) merupakan data kondisi tahun sebelumnya (n-1). Oleh sebab itu, data yang dicantumkan sebagai capaian tahun 2018 merupakan data yang dikeluarkan pada September 2018 dan merupakan kondisi tahun 2017. Berdasarkan data IDI di atas, terlihat bahwa indeks ini mengalami peningkatan setelah terus mengalami penurunan sejak tahun 2014. Pada tahun 2018 (kondisi tahun 2017) realisasi IDI Provinsi Jambi terealisasi sebesar 74,12 dalam skala indeks 0 sampai 100 atau meningkat 5,23 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya, dengan persentase capaian sebesar 98,83% dan masuk dalam kategori **sangat tinggi**. Bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2021 maka capaian ini telah masuk dalam kategori sangat tinggi karena sudah mencapai 93,82%. Capaian IDI dari tahun 2014 hingga 2017 mengalami fluktuasi. Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Provinsi Jambi.



*Sumber: BPS, 2018*

Gambar 3-14 Perkembangan Aspek IDI Provinsi Jambi

Gambar di atas menunjukkan bahwa dari ketiga aspek IDI, dua aspek mengalami peningkatan dan 1 aspek mengalami penurunan. Aspek yang mengalami peningkatan adalah aspek kebebasan sipil yang mengalami peningkatan sebesar 2,42 poin dan aspek lembaga demokrasi yang meningkat signifikan sebesar 22,69 poin. Sedangkan aspek hak-hak politik mengalami penurunan sebesar 3,55 poin. Pada aspek kebebasan sipil, 3 dari 10 indikator mengalami peningkatan, 4 indikator stagnan dan 3 indikator mengalami penurunan. aspek hak-hak politik menjadi satu-satunya aspek yang mengalami penurunan dan menempatkannya menjadi aspek dengan nilai terendah.



Sumber: Satpol PP dan Damkar Prov. Jambi, 2019

Gambar 3-15 Demonstrasi yang terjadi tahun 2018

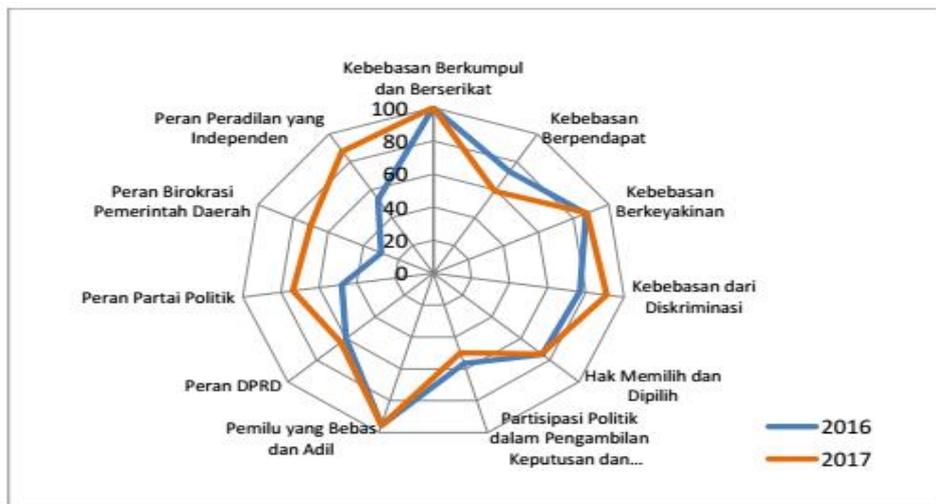


Sumber: Satpol PP dan Damkar Prov. Jambi, 2019

Gambar 3-16 Aksi Unjuk Rasa di Provinsi Jambi Tahun 2013-2018

Aspek kebebasan sipil yang meningkat tersebut ditunjang oleh aksi demonstrasi yang damai dan tidak anarkis. Berdasarkan data Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi, Bila melihat tren jumlah aksi unjuk rasa pada Pemerintah Provinsi Jambi, terlihat bahwa jumlah unjuk rasa sempat mengalami penurunan pada tahun 2015, namun kembali meningkat pada tiga tahun terakhir.

Pada tahun 2016 terjadi 41 kali unjuk rasa dan meningkat menjadi 56 kali unjuk rasa pada tahun 2017 dan kembali meningkat pada tahun 2018 menjadi 61 unjuk rasa. Peningkatan jumlah unjuk rasa damai ini pula yang selanjutnya meningkatkan indeks kebebasan sipil di Provinsi Jambi. Dari 61 aksi unjuk rasa pada tahun 2018, hanya 1 aksi yang berakhir agak anarkis atau 98,37 persen unjuk rasa berlangsung damai tanpa kekerasan. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan indeks kebebasan sipil, diantaranya dengan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat serta optimalisasi forum Pembauran Kebangsaan



Sumber: BRS IDI Provinsi Jambi 2017, BPS, 2018

Gambar 3-17 Perkembangan Indeks variabel IDI Provinsi Jambi Tahun 2016-2017

Indikator yang mengalami peningkatan tertinggi adalah indikator ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok karena alasan gender, etnis, kelompok yang meningkat 50 poin. Capaian ini menunjukkan bahwa toleransi antar gender, etnis, kelompok membaik dari tahun lalu. Demikian pula terhadap indikator ancaman /penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama yang mengalami peningkatan sebesar 15 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi toleransi antar umat beragama di Provinsi Jambi sudah berangsur kondusif kembali, setelah terimbas beberapa isu keagamaan yang terjadi secara nasional. Hasil tersebut tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi melalui pengoptimalan peran Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), sehingga potensi-potensi konflik terkait keagamaan atau permasalahan terkait SARA dapat segera dipecahkan bersama melalui musyawarah untuk mufakat.

Tabel 3.15 Perkembangan Skor Indikator per Variabel Aspek IDI  
Provinsi Jambi Tahun 2016-2017

No	Nama Variabel	2016	2017
<b>Kebebasan Sipil</b>			
1	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	100,00
2	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	100,00
3	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	87,50	70,83
4	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	0,00	0,00
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	86,96	82,61
6	Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	90,63	100,00
7	Ancaman /penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama	85,00	100,00
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok	83,33	83,33
9	Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok	100,00	90,63

No	Nama Variabel	2016	2017
10	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, kelompok	50,00	100,00
<b>Hak-Hak Politik</b>			
11	Hak memilih atau dipilih terhambat	100,00	100,00
12	kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih	60,00	60,00
13	Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)	72,37	72,37
14	Voters Turnout	77,25	77,25
15	persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi	48,48	42,42
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	13,04	0,00
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	100,00	100,00
<b>Lembaga Demokrasi</b>			
18	keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	100,00	100,00
19	Kecurangan dalam penghitungan suara	91,14	91,14
20	Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan	74,70	71,83
21	Perda yang merupakan inisiatif DPRD	60,00	100,00
22	Rekomendasi DPRD kepada eksekutif	7,14	3,57
23	Rekomendasi DPRD kepada eksekutif	42,86	71,43
24	Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik	93,02	92,72

No	Nama Variabel	2016	2017
25	kebijakan Pejabat Pemerintah Daerah yang dinyatakan bersaah oleh keputusan PTUN	55,26	73,68
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemerintah Daerah	8,33	66,66
27	keputusan hakim yang kontroversial	6,25	75,00
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	100,00	100,00

*Sumber: BRS IDI Provinsi Jambi 2017, BPS, 2018*

Demikian pula aspek lembaga demokrasi, indikator yang mengalami peningkatan terbesar adalah indikator keputusan hakim yang kontroversial, yaitu sebesar 68,75 poin. Hal ini berarti keputusan-keputusan hakim yang kontroversial sudah jauh berkurang.

Adapun program pendukung pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut:

1. program pengembangan wawasan kebangsaan.
2. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjadi ketertiban dan keamanan
3. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
4. Pemeliharaan kantantibmas dan pencegahan tindak kriminal
5. Program advokasi hukum dan HAM
6. Program dokumentasi dan informasi produk hukum
7. Program pendidikan politik masyarakat
8. Program perwujudan emokrasi makin kokoh
9. Program peningkatan kapasitas lembaga DPRD

**Permasalahan;**

1. Hubungan antar umat beragama merupakan hubungan yang sensitif dan rentan konflik. Isu-isu agama yang banyak beredar saat ini berpotensi menurunkan indeks kebebasan berkeyakinan.

2. Aksi unjuk rasa yang tidak tertib dan cenderung menggunakan kekerasan akan berdampak buruk bagi kehidupan demokrasi di Provinsi Jambi. Pada akhirnya hal ini juga akan berdampak pada situasi ekonomi dan sosial di Provinsi Jambi.

**Solusi:**

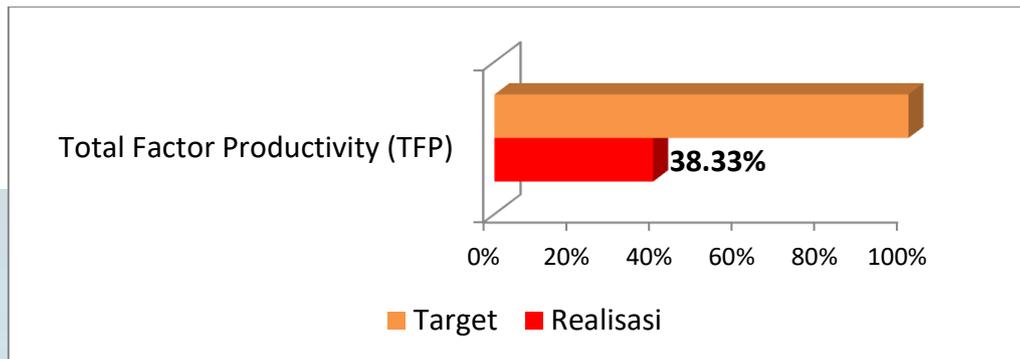
1. Optimalisasi FKUB dan FPK sebagai wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan dan memelihara toleransi antar umat beragama
2. Tindak kekerasan dalam hal apapun sudah tidak layak dilakukan pada era demokrasi, untuk itu pendekatan persuasif dan optimalisasi peran Forum komunikasi dan Forum kebangsaan yang ada di Provinsi Jambi harus terus dilakukan.

**Sasaran Strategis 5**

***Meningkatnya Total factor Productivity (TFP)***

Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi seringkali menjadi penentu kemajuan suatu daerah. Teknologi bukan hanya sebagai alat, tetapi juga digunakan sebagai daya saing suatu daerah. Daya saing bukan lagi ditentukan oleh sumber daya alam dimiliki tetapi lebih ditentukan oleh cara suatu daerah berinovasi teknologi untuk mengelola sumber daya alam tersebut.

Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur sejauhmana sentuhan IPTEK dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah *Total Factor Productivity (TFP)*. Penggunaan *Total Factor Productivity (TFP)* sebagai sebuah metode untuk mengukur peranan teknologi di dalam pertumbuhan ekonomi cukup beralasan karena TFP dinilai oleh para penggunanya sebagai sebuah ukuran produktivitas menyeluruh yang telah mendapat pengakuan dan diterima tidak hanya dalam pembuktian teoretis, melainkan juga dalam praktik pengambilan kebijakan dan analisis ekonomi. Capaian sasaran meningkatnya TFP dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3-18 Capaian Sasaran Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)

## 2. Total Factor Productivity (TFP)

Dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik yang dikembangkan oleh Solow, faktor input tenaga kerja dan modal adalah determinan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di luar tenaga kerja dan modal, ada faktor yang sering disebut dengan Total Factor Productivity (TFP) yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain total TFP menjelaskan peranan faktor lain diluar faktor tenaga kerja dan modal.

Di balik konsep TFP ini, sebenarnya yang mau diketahui adalah pengaruh *technological progress* (perkembangan teknologi) seperti penguasaan teknologi produksi, tingkat pendidikan dan keahlian tenaga kerja, kemampuan penguasaan teknologi dan lain sebagainya terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara empiris jelas tidak mudah untuk mengetahui pengaruh dan peran teknologi ini karena sifatnya yang *embodied* kedalam peran modal dan tenaga kerja itu sendiri. Akan tetapi "pesan" penting berkaitan dengan upaya mendekomposisi peran teknologi dalam proses ini sesungguhnya adalah untuk mengetahui peran *managerial* dalam setiap proses produksi. Dengan demikian, perumusan kebijakan untuk meningkatkan produktivitas akan lebih mudah.

Tabel 3.16 Capaian Indikator Total Factor Productivity (TFP)

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2018
	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017	2018				
					Tar-get	Realisasi	% capaian		
Total Factor Productivity (TFP)	NA	NA	-1,45	0,88	1,2	0,46	38,33%	1,5	30,67%

Sumber: Bappeda Prov. Jambi (hasil analisis), 2019

Realisasi indikator TFP Provinsi Jambi pada tahun 2018 adalah sebesar 0,46 atau terealisasi 38,33% dari target yang telah ditetapkan sebesar 1,2 dan termasuk dalam kategori **sangat rendah**. Pada dasarnya Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan TFP di Provinsi Jambi pada tahun 2018. Namun demikian, kondisi perekonomian nasional dan global yang belum stabil serta tuntutan pengurangan tingkat pengangguran merupakan sisi yang saling bertolakbelakang dan tidak terpisahkan. Kemajuan teknologi akan berpengaruh terhadap pengurangan kebutuhan tenaga kerja yang bila tidak didukung oleh pertumbuhan yang tinggi akan menimbulkan banyak pengangguran. Adapun program yang dilaksanakan untuk meningkatkan TFP adalah:

1. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
2. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
3. Program Peningkatan Kualitas SDM Pertanian
4. Program Peningkatan Daya Saing KUKM
5. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan
6. Program Peningkatan Penguatan Usaha Koperasi
7. Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah
8. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
9. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

### Permasalahan:

1. Penguasaan teknologi di Provinsi Jambi masih rendah, sehingga tidak mampu menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi di saat perekonomian dunia mengalami kelesuan.

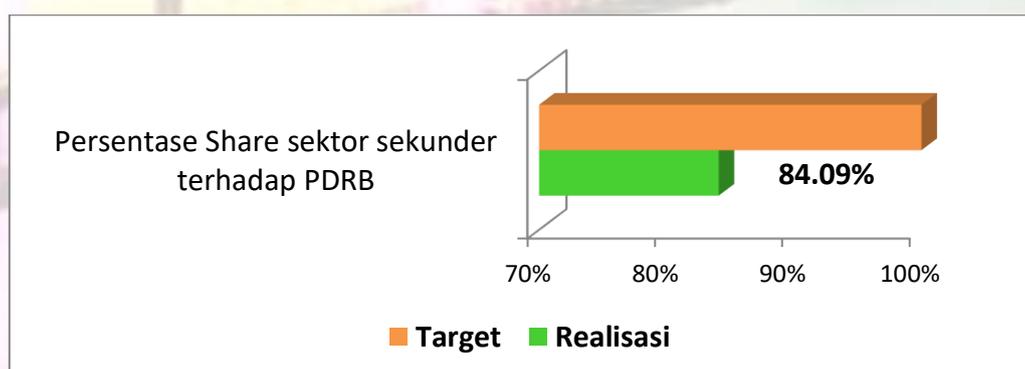
### Solusi:

1. Pelaku industri, khususnya industri pengolahan perlu meningkatkan pengembangan dan penelitian untuk melakukan inovasi, adopsi teknologi dan pengembangan teknologi baru, sehingga dapat meningkatkan TFP

### Sasaran Strategis 6

#### *Perubahan Struktur Ekonomi yang Mampu Memberikan Nilai Tambah*

Perubahan struktur ekonomi disebut juga transformasi struktural, yang berarti rangkaian perubahan ekonomi dari pertanian tradisional ke sektor industri sebagai mesin utama penggerak pertumbuhan ekonomi. Capaian sasaran strategis perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah ditandai dengan indikator persentase share sektor sekunder terhadap PDRB, yang capaiannya pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:



Gambar 3-19 Capaian sasaran perubahan struktur ekonomi yang

#### 1. persentase Share Sektor Sekunder terhadap PDRB

Struktur ekonomi Provinsi Jambi masih ditopang oleh sektor primer. Hal ini bisa dilihat dari share sektor primer terhadap PDRB Provinsi Jambi yang masih merupakan share tertinggi. Bila ingin mewujudkan perubahan struktur ekonomi atau

mengurangi share sektor primer dan mengalihkannya pada sektor sekunder maka indikator yang bisa dijadikan alat ukur adalah besarnya presentase share sektor sekunder terhadap PDRB.

Tabel 3.17 Capaian Indikator persentase share sektor sekunder terhadap PDRB

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2018
	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017	2018				
					Target	Realisasi	% capaian		
Persentase share sektor sekunder terhadap PDRB	18,92	18,38	18,38	17,44	20,5	17,24	84,09	22,0	78,36

Sumber: BPS, data diolah, 2019

Bila dilihat dari persentase capaian kinerja tahun 2018, persentase realisasi indikator ini masih dalam kategori **tinggi** karena mencapai 84,09%. Demikian pula bila dibandingkan dengan target akhir pada tahun 2021, masuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan data capaian indikator ini, sebagaimana tergambar pada tabel di atas, dapat terlihat bahwa share sektor sekunder terhadap PDRB Provinsi Jambi terus mengalami penurunan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 walaupun dalam angka yang sangat kecil.

Sektor industri pengolahan menunjukkan peningkatan yang konsisten sejak awal tahun hingga triwulan IV- 2018. Pada triwulan IV-2018, sektor industri pengolahan tumbuh 6,36% (yoy) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,18%, terutama didorong oleh industri minyak makanan berbasis kelapa sawit (*edible oil*). Secara tahunan, sektor industri pengolahan tercatat tumbuh 3,55% (yoy) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,02% (yoy). Laju pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi sejak tahun 2015, dimana pertumbuhan Provinsi Jambi mengalami perlambatan pasca berakhirnya *booming* komoditas. Perbaikan kinerja sektor ini terutama didorong oleh permintaan domestik mengingat 50% dari industri berskala besar dan sedang di Provinsi Jambi merupakan

industri makanan yang berbasis kelapa sawit. Pertumbuhan positif sektor industri pengolahan juga ditopang oleh kinerja industri makanan yang sebagian besar berbasis bahan baku kelapa sawit antara lain berupa minyak makan kelapa sawit, industri crude palm oil (CPO) dan kernel. Selain itu, perbaikan kinerja sektor industri pengolahan juga sejalan dengan meningkatnya penyaluran kredit industri di Provinsi Jambi yang mencapai 46,15% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 7,36% (yoy) dan meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi 5,75% (yoy).

Sementara itu, sektor konstruksi tercatat tumbuh sebesar 3,39% (YOY) pada triwulan IV-2018 dengan andil pertumbuhan sebesar 0,26%. Laju pertumbuhan tersebut meningkat dibanding triwulan sebelumnya sebesar 2,11% (yoy). Untuk keseluruhan tahun 2018, sektor konstruksi terutama ditopang oleh pengerjaan proyek fisik swasta antara lain pengembangan fasilitas kesehatan dan pembangunan kawasan perbelanjaan. Pertumbuhan sektor konstruksi di Provinsi Jambi yang menunjukkan peningkatan sebesar 93,66% (yoy) dengan total kredit mencapai Rp1,44 triliun, setelah pada triwulan sebelumnya juga tumbuh signifikan sebesar 72,12% (yoy).

Pada dasarnya upaya untuk menggeser share tertinggi pada PDRB Provinsi Jambi dari sektor primer ke sektor sekunder telah dilakukan setiap tahun. Hal ini sejalan dengan upaya menumbuhkan sektor industri di Provinsi Jambi dalam jangka panjang, melalui penyediaan kawasan di Ujung Jabung, penyiapan sarana prasarana pendukung seperti jalan, pelabuhan, air dan energi. Namun karena upaya ini adalah upaya jangka panjang, maka belum bisa dirasakan dampaknya karena masih dalam tahap pembangunan.

Upaya jangka pendek yang telah dilakukan pada tahun 2018 adalah mendorong hilirisasi melalui pemanfaatan IPTEKIN dan memberikan kemudahan bagi investor industri hilir pengolahan. Upaya-upaya lainnya antara lain:

1. Penyediaan informasi Pengolahan komoditi dan pasar terutama industri pengolahan yang berbasis bahan baku lokal, sumberdaya setempat dengan cara penguatan struktur industri berbasis kawasan, sumber daya lokal yang berkelanjutan.

2. Mendukung industri yang memberi nilai tambah komoditi utama yang potensi daerah melalui pendekatan kewilayaan. Dengan cara mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan lainnya dalam mendukung pembangunan industri daerah dan nasional.
3. Menginisiasi pemanfaatan produk karet alam untuk komponen infrastruktur strategis.

Guna mendukung pencapaian indikator kinerja ini program yang dilaksanakan adalah :

1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
2. Program Pembinaan Pembangunan Ekonomi di bidang Penanaman Modal, BUMN/BUMD dan Pendapatan Keuangan
3. Program perencanaan dan penyelenggaraan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan
4. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
5. Program Pengembangan Industri Agro dan Kimia
6. Program Peningkatan Produksi dan teknologi budidaya perkebunan
7. Program Penelitian dan Pengembangan

**Permasalahan:**

1. Kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB belum sesuai dengan harapan, karena sektor primer belum bergeser dan masih menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Jambi. Hal ini terkait dengan belum berkembangnya teknologi dan kurangnya sarana prasarana penunjang pengembangan industri.

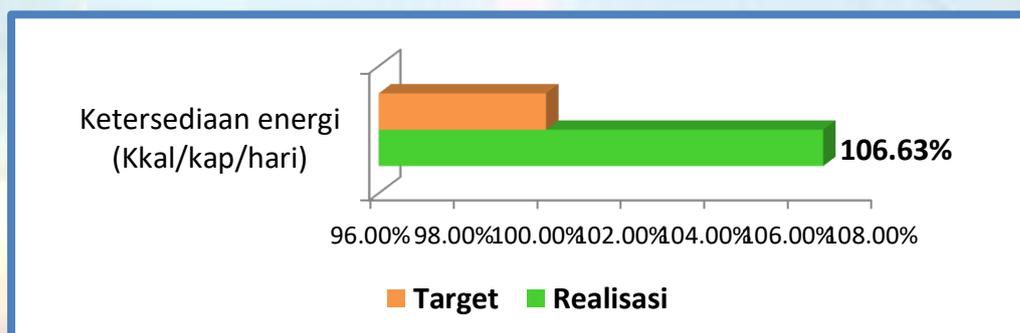
**Solusi:**

1. Penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh industri sedang serta mendorong penguasaan teknologi di Provinsi Jambi.
2. Dalam hal peningkatan usaha industri kecil, menengah dan besar maka perlu penumbuhan iklim usaha yang kondusif, Pengembangan sistem pendukung usaha, Pengembangan wirausaha dan keunggulan kompetitif, Pemberdayaan usaha skala mikro

## Sasaran Strategis 7

### Meningkatnya Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian dunia mengingat pengaruhnya terhadap pembentukan iklim makroekonomi yang kondusif. Permasalahan dan tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan bersifat multidimensi, mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Untuk Indonesia, ketahanan Pangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 mengenai pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan juga disebutkan dalam Undang-Undang tersebut sebagai tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Indikator kinerja yang digunakan untuk menggambarkan capaian sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan adalah ketersediaan energi, dengan capaian pada tahun 2018 sebagai berikut:



Gambar 3-20 capaian Sasaran strategis Meningkatkan Ketahanan Pangan

#### 2. Ketersediaan Energi (Kkal/Kap/hari)

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Ketahanan Pangan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi telah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan. Khusus mengenai cadangan pangan pemerintah daerah,

juga telah diatur sedemikian rupa dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur nomor 12 Tahun 2013.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2013 tersebut, selama kurun waktu 2013 – 2018 cadangan pangan Pemerintah Provinsi Jambi yang tersedia sebesar **109 ton beras**, dan selama kurun waktu 2013 – 2018 telah digunakan sebanyak **47,137 ton** beras untuk membantu masyarakat rawan pangan di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Batanghari, Sarolangun dan Tanjung Jabung Barat, Bungo dan Merangin sehingga stok cadangan pangan pemerintah Provinsi di Gudang Perum Bulog per 31 Desember 2018 sebesar **61,863 ton** beras.

Kemandirian pangan dalam konteks daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam memproduksi pangan beraneka ragam yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat. Dampak dari upaya perwujudan kemandirian pangan ini dapat dilihat dari ketersediaan energi untuk konsumsi perkapita.

Tabel 3.18 Kondisi Ketersediaan Energi Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Provinsi Jambi Tahun 2018

No	Kelompok Bahan Pangan	Ketersediaan Energi (Kkal/Kap/Hari)	Ketersediaan Ideal (Kkal/Kap/Hari)
1.	Padi-Padian	1.720	1.200
2.	Umbi-Umbian	294	144
3.	Pangan Hewani	118	288
4.	Minyak Dan Lemak	704	240
5.	Buah Biji/ Berminyak	209	72
6.	Kacang-Kacangan	74	120
7.	Gula	161	120
8.	Sayuran dan Buah	145	144
9.	Lain-Lain	-	72
	Jumlah	3.425	2.400

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2019

Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Provinsi Jambi, ketersediaan energi untuk konsumsi perkapita sebesar 3.425 Kkal/Kap/Hari, hal ini telah melebihi kecukupan gizi untuk energi ditingkat ketersediaan sebesar 2.400 Kkal/Kap/Hari. Tabel di atas memperlihatkan bahwa ketersediaan Energi sudah melebihi ketersediaan energi ideal sebesar 2.400 kkal/kap/hari, namun dari komposisi ketersediaan kelompok bahan pangan belum berimbang. Komposisi ketersediaan bahan pangan masih didominasi oleh kelompok sumber bahan pangan penghasil karbohidrat, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, gula, serta sayur dan buah sementara ketersediaan bahan pangan hewani dan kacang-kacangan masih lebih rendah dari ketersediaan ideal berdasarkan pola pangan harapan (PPH).

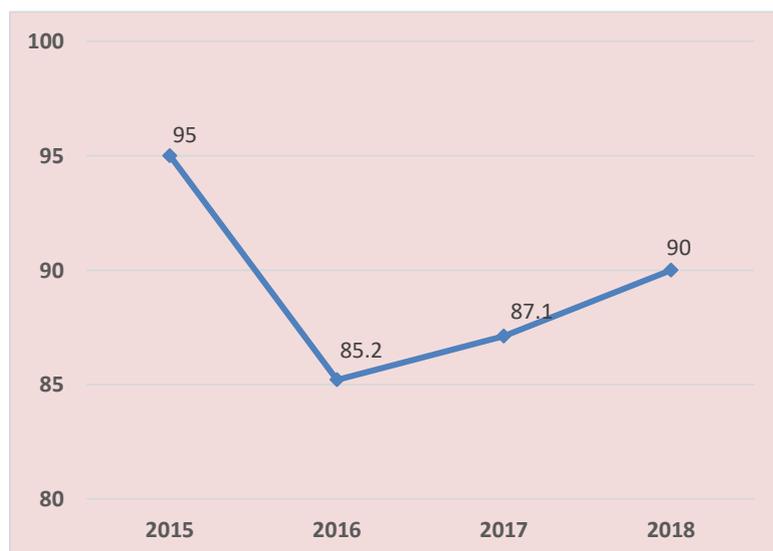
Berdasarkan neraca bahan makanan Provinsi Jambi tahun 2018, ketersediaan energi untuk konsumsi perkapita adalah sebesar sebesar 3.425 Kkal/Kap/Hari

dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ditingkat ketersediaan sebesar 82. Hal ini telah melebihi kecukupan gizi untuk energi ditingkat ketersediaan sebesar 2.400 Kkal/Kap/Hari (hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke X tahun 2012) dan ketersediaan protein minimal 57 gram/kap/hari, dan melebihi target yang ditetapkan sebesar 3.212 kkal/ kapita/hari atau terealisasi sebesar 106,63% dan masuk dalam **kategori sangat tinggi**. Bila dibandingkan dengan target akhir yang ditetapkan sebesar 3.217 kkal/kap/hari maka capaian ini telah mencapai 106,45% atau kategori sangat tinggi.

Tabel 3.19 Capaian indikator ketersediaan Energi (Kkal/kap/hari)

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2018
	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017	2018				
					Target	Realisasi	% capaian		
Ketersediaan Energi(Kkal/ Kap/hari)	3.217	3.204	2.854	3.425	3.210	3.425	106,63	3.217	106,45

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2019



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Jambi, 2019

Gambar 3-21 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi Provinsi Jambi Tahun 2015-2018

Dalam hal konsumsi pangan, permasalahan yang dihadapi tidak hanya mencakup keseimbangan komposisi, namun juga masih belum terpenuhinya kecukupan gizi. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, untuk mengukur keberhasilan upaya diversifikasi baik di bidang produksi, penyediaan dan konsumsi pangan

penduduk diperlukan suatu parameter. Salah satu parameter yang dapat digunakan untuk menilai tingkat keanekaragaman pangan adalah **Pola Pangan Harapan** atau disingkat dengan **PPH**. Skor PPH diketahui tidak hanya pemenuhan kecukupan gizi tetapi sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi yang didukung oleh cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kuantitas dan kemampuan daya beli. Penilaian terhadap pengembangan pola konsumsi pangan tingkat nasional dan Regional dilaksanakan dengan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH), menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional ( SUSENAS ). Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya dapat dilihat pada gambar di atas.

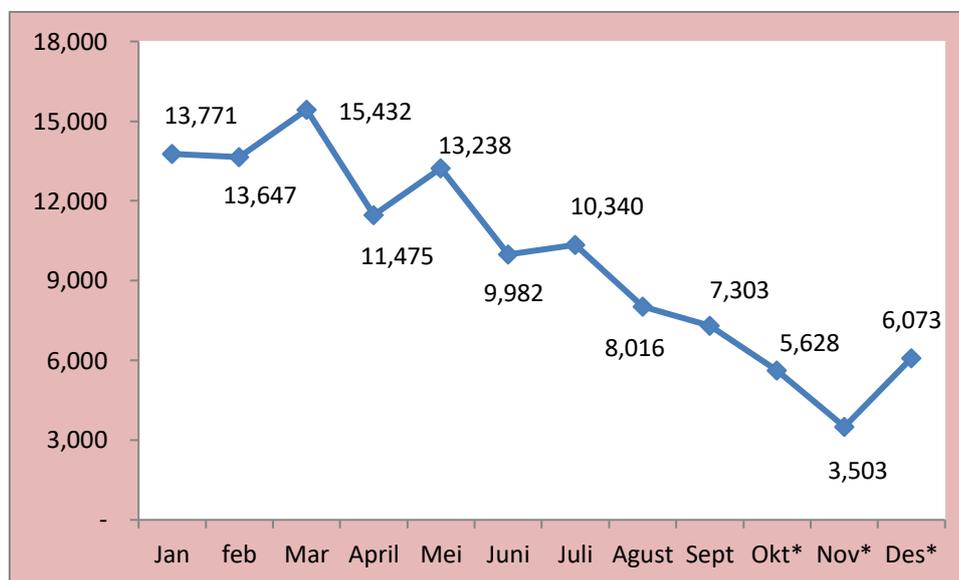
Konsumsi kalori penduduk Jambi sebagian besar berasal dari kelompok padi-padian, makanan dan minuman jadi serta minyak dan kelapa. Sementara untuk konsumsi protein selain dari kelompok makanan diatas, sebagian besar juga berasal dari kelompok ikan, kacang-kacangan dan daging. Rata-rata konsumsi kalori dan protein per kapita sehari menurut kabupaten/ kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.20 Rata-rata konsumsi kalori dan protein per kapita sehari menurut Kabupaten/ Kota

<b>Kabupaten/ Kota</b>	<b>kalori (Kkal)</b>	<b>Protein (Gram)</b>
Kerinci	2.320,50	60,17
Merangin	2.157,53	58,61
Sarolangun	2.107,66	54,13
Batang Hari	2.038,13	54,50
Muaro Jambi	2.181,18	60,34
Tanjab Timur	2.267,12	61,62
Tanjab Barat	1.983,68	52,84
Tebo	2.164,43	56,14
Bungo	2.044,71	56,04
Kota Jambi	1.972,00	56,92
Kota Sungai Penuh	2.234,82	61,31
Provinsi Jambi	2.108,89	57,18

Sumber: Susenas 2017, 2018

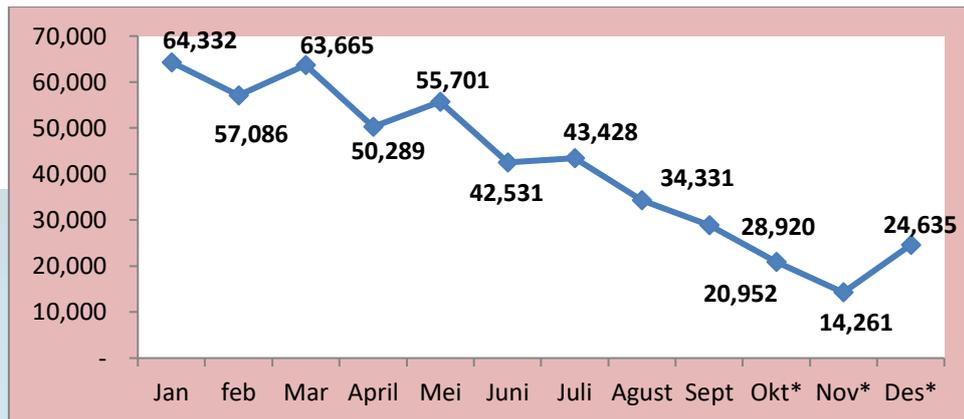
Ketersediaan energi ideal sesuai Pola Pangan Harapan (PPH) adalah sebesar minimal 2.400 kkal/kap/hari. Ketersediaan Energi ini sangat bergantung pada Kondisi Ketersediaan bahan pangan dari kemampuan produksi, sehingga apabila produksi bahan pangan meningkat, ada kecenderungan ketersediaan energi akan meningkat. Berdasarkan hasil survey Kerangka Sampel Area (KSA), luas panen padi di Provinsi Jambi periode Januari-September 2018 sebesar 103.204 hektar. Luas panen tertinggi terjadi pada Bulan Maret yaitu sebesar 15.432 hektar, sementara luas panen terendah terjadi pada Bulan September dengan luas panen sebesar 7.303 hektar. Luas panen padi pada September 2018 mengalami penurunan sebesar 8,89 persen dibandingkan luas panen pada Bulan Agustus 2018.



Sumber: BRS, BPS, 2018\*) potensi luas panen

Gambar 3-22 Perkembangan Luas Panen Padi di Provinsi Jambi, Januari - Desember 2018 (hektar)

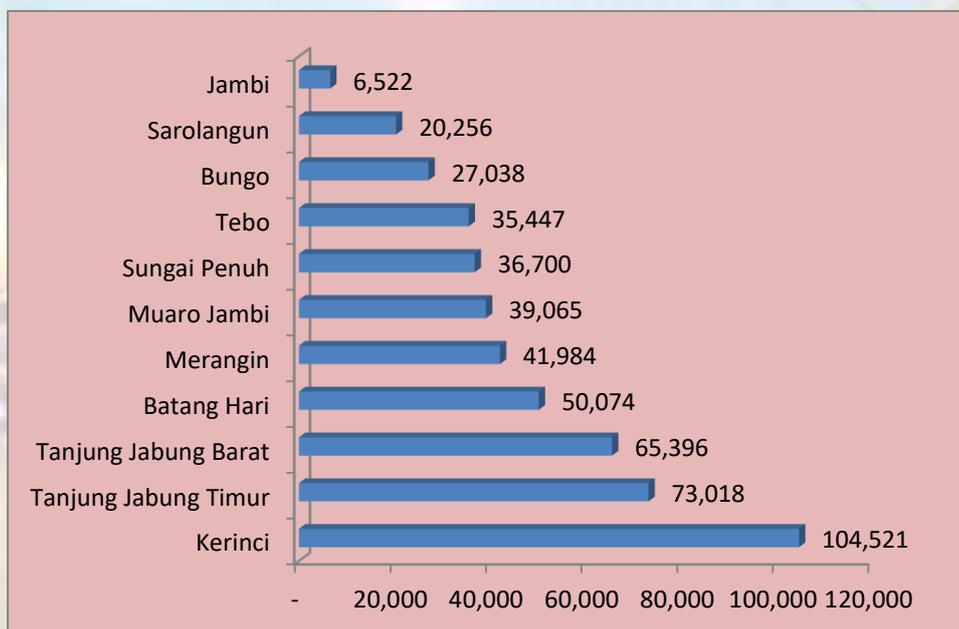
Produksi padi di Provinsi Jambi dari Januari hingga September 2018 sebesar 440.173 ton Gabah Kering Giling (GKG). Produksi tertinggi terjadi pada Bulan Januari yaitu sebesar 64.322 ton, sementara potensi produksi padi pada Bulan oktober, November dan Desember masing-masing sebesar 20.952 ton, 14.261 ton dan 24.635 ton, sehingga perkiraan total produksi padi 2018 adalah sebesar 500.021 ton.



Sumber: BRS, BPS, 2018\*) potensi produksi padi

Gambar 3-23 Perkembangan produksi padi Provinsi Jambi, Januari - Desember 2018 (Ton GKG)

Tiga wilayah dengan produksi padi (GKG) tertinggi di Provinsi Jambi berturut-turut adalah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan produksi masing-masing sebesar 104.521 ton, 73.018 ton dan 65.396 ton.



Sumber: BRS, BPS, 2018

Gambar 3-24 Produksi padi Provinsi Jambi menurut Kabupaten-kota Tahun 2018 (ton GKG)

Program-program yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan adalah **Program Peningkatan Ketahanan Pangan** yang dipadukan dengan **Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan** dan **Program peningkatan produksi ternak**.

**Permasalahan:**

1. Ketersediaan komoditas kedelai, kacang hijau, telur dan daging unggas masih belum memenuhi konsumsi penduduk
2. Terjadi Penurunan Kapasitas Sumberdaya Alam

Kapasitas Sumber Daya Alam yang potensial untuk lahan pertanian pangan dan hortikultura cenderung menurun baik luas maupun kualitasnya. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian terus berlanjut dengan laju yang cenderung meningkat (terutama di daerah Kabupaten Tanjung jabung Timur), begitu pula di daerah kabupaten lain terjadi pengurangan luas lahan pertanian akibat peruntukan bangunan, sementara upaya perluasan areal baru melalui cetak sawah yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat belum seimbang karena sangat kecil dan pembangunannya memerlukan investasi yang cukup besar disamping kualitasnya yang belum sebaik lahan sebelumnya.

Disamping jumlahnya yang menyusut, juga terjadi kemerosotan tingkat kesuburan lahan akibat penggunaan lahan yang terus menerus yang tidak diikuti dengan pengembalian kesuburan lahan melalui penambahan pupuk organik.

Sumber air Irigasi di Jambi umumnya juga sangat terbatas, dan hanya ada di beberapa Kabupaten (Kerinci, Merangin, Sarolangun, Bungo, Tebo Tanjung Jabung Timur & Tanjab Barat) dengan cakupan yang terbatas untuk melaksanakan intensifikasi pertanian melalui peningkatan Indeks pertanaman dan Penerapan System Rice Intensification (SRI), sehingga sering kesulitan. Begitu pula yang terjadi di Balai Benih Induk (BBI), sumber air yang ada hanyalah waduk buatan dengan skala kecil, sehingga seringkali terjadi kekeringan pada saat kemarau mulai tiba.

3. Sarana dan prasarana masih sangat terbatas
4. Kelembagaan Pertanian belum berkembang dengan baik

5. Masih Kurangnya kesadaran terhadap kelestarian lingkungan
- Lingkungan merupakan aspek penting dalam pembangunan agribisnis karena menyangkut kelanjutan usaha agribisnis tersebut. Beberapa metode usaha tani yang diterapkan ada yang belum memenuhi aspek kelestarian lingkungan antara lain :
  - Masih ditemui adanya residu pestisida pada produk tanaman Pangan dan Hortikultura, terutama pada tanaman sayuran sebagai dampak dari penggunaan pestisida yang berlebihan.
  - Penggunaan pestisida yang berlebihan (di atas ambang batas). Sehingga menyebabkan matinya musuh – musuh alami, disamping residu pestisida yang masih tinggi pada hasil produksi hortikultura.
  - Metode konservasi belum diterapkan terutama pada pertanaman hortikultura (kentang).
  - Pola – pola usaha tani secara terpadu antara pertanian pangan / hortikultura dan peternakan belum diterapkan secara baik.

**Solusi:**

1. Meningkatkan upaya peningkatan produksi pangan dan pengawasan distribusi pangan agar harga di tingkat konsumen tidak melambung tinggi.
2. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Peningkatan Produksi dan Ketahanan Pangan dengan melakukan akselerasi peningkatan produksi dan Sekolah lapang Pengelolaan tanaman terpadu (SLPTT) padi, jagung, kedele, perbanyak benih sumber, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, dan kegiatan pembinaan perlindungan OPT.
3. Perbaiki infrastruktur pertanian (optimalisasi pemanfaatan lahan, Pembuatan Tata Air Mikro, rehab Jaringan Irigasi Pertanian serta cetak sawah), Pembinaan dan pengembangan Kedelai dan Jagung.
4. Menyediakan Benih yang Bermutu dari varietas Unggul dengan harga yang terjangkau oleh petani dan sesuai dengan kebutuhan benih yang bermutu menggunakan produksi benih yang dihasilkan oleh penangkar-penangkar benih tanaman pangan dan hortikultura serta pengembangan jaringan sistem perbenihan Padi.

5. Meningkatkan Penggunaan/Penanaman Benih bermutu Varietas Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan melakukan penangkaran benih di tingkat petani, pengembangan sistem produksi dan distribusi benih, perbanyak benih sumber padi varietas unggul lokal.
6. Menumbuhkembangkan Balai Benih, Penangkar Benih serta Produksi Benih Produsen benih yang tangguh, yang mampu menyediakan benih bermutu dengan mengoptimalkan Operasional BBI Hortikultura, Operasional BBI Palawija, Operasional BBI Padi, perbanyak benih pokok dan benih sebar, Perbanyak benih palawija, Operasional Bbi Alai Ilir, Perbanyak benih palawija BS – FS dan FS – SS, Perbanyak benih palawija BS – FS dan FS – SS , jagung kedele dan kacang tanah, Perbanyak benih palawija Alai Ilir.
7. Mengembangkan dan Menerapkan Teknologi Maju Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan membuat demplot, pengujian dan demonstrasi yang dilaksanakan untuk memotivasi petani dalam melakukan usaha tani dengan teknologi maju.
8. Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Lahan secara selektif dengan melaksanakan pengembangan lahan melalui penyempurnaan tata aturan pengelolaan lahan dan air, perluasan areal pertanian dengan mencetak sawah yang didanai oleh Pemerintah maupun swadana petani, optimalisasi lahan terlantar/ tidur, konservasi dan rehabilitasi, perbaikan jalan usahatani, rehabilitasi jaringan irigasi tingkat desa dan tingkat usaha tani, melalui partisipasi masyarakat tani. Pencegahan alih fungsi lahan di Jambi dilakukan dengan penerbitan PERGUB No 14 tahun 2009, sedangkan di tingkat nasional telah dilakukan pula melalui UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Daerah juga merevitalisasi fungsi lahan pasang surut yang selama ini sudah banyak ditinggalkan oleh petani tanaman pangan dengan kegiatan *renovasi lahan sulfat masam* dan memanfaatkan potensi Lahan Rawa lebak yang ada. Peningkatan kesuburan Lahan juga harus terus dilakukan melalui pemanfaatan Pupuk jerami dan dijadikan Trichokompos. Khusus untuk lahan – lahan Balai Benih Induk disamping penggunaan trichokompos, juga diberikan Pupuk kandang dan Pengapuran.

9. Untuk mencukupi ketersediaan air, di kabupaten dilakukan rehab – rehab Jaringan Irigasi Teknis dan rehab Jaringan Irigasi Non Teknis yang dananya berasal dari APBN. Sedangkan untuk Balai benih Induk dibuatkan Pomba air.
10. Mendorong Peningkatan Produktivitas, Produksi dan Mutu melalui Inovasi Teknologi Baru (terutama penggunaan benih Unggul). Hal ini dilakukan mengingat produktivitas tanaman pangan saat ini dimasing masing lokasi berbeda – beda, sesuai dengan tingkat kesuburan tanah dan sumber air yang tersedia. cenderung stagnan. Dari segi potensi Provinsi Jambi, Produktivitas masih berpeluang besar untuk ditingkatkan lagi. Potensi tersebut tercermin dari senjang rata – rata produktivitas riil dengan potensi hasil penelitian. Untuk mendorong peningkatan produktivitas telah dilakukan penggunaan benih unggul varietas baru, meskipun belum semua petani mempergunakannya. Untuk daerah – daerah yang tingkat produktivitasnya masih rendah akan didorong untuk mempercepat terjadinya peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi spesifik lokasi, khususnya mempergunakan benih unggul bermutu dan bersertifikat.
11. Keterbatasan modal petani untuk membeli saprodi dilakukan dengan memberikan bantuan Benih , dan saprodi lainnya secara selektif. Namun demikian petani diupayakan menggunakan pupuk alami dengan menggunakan trchokompos dan pengendalian OPT dengan Herbisida alami pula yang tersedia disekitar tempat tinggal.
12. Sosialisasi tentang pentingnya penggunaan benih unggul bermutu terus dilakukan, agar ketersediaan benih secara 6 tepat bisa terpenuhi, diantaranya mengupayakan kegiatan penangkaran benih di setiap kecamatan dan Kabupaten atau di sentra produksi. Meningkatkan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan bagi petani dalam mewujudkan efisiensi biaya produksi dan meningkatkan produksi pertanian melalui SLPHT, penerapan PHT dan penggunaan bahan saprodi / pengendali OPT yang sifatnya ramah lingkungan, efisiensi dan efektif seperti penggunaan kompos jerami (*Trichokompos*) sebagai sumber pupuk serta penggunaan agen hayati / biopestisida dalam pengendalian OPT.
13. Mendorong Sinergitas Antar Subsystem Agribisnis. Keberhasilan pengembangan sistem dan usaha agribisnis tanaman pangan sangat

tergantung pada keterpaduan secara utuh antar subsistem (sarana prasarana, on farm, pengolahan dan pemasaran hasil, serta penunjuang). Integrasi antara sub sistem agribisnis tersebut harus dimulai dan dievaluasi termasuk dalam aspek pembiayaan. Disamping itu untuk menjadikan usaha produksi sebagai pendapatan yang handal, sub sistem produksi harus dilakukan dengan skala ekonomis dengan menerapkan teknologi maju dan dikelola secara profesional.

14. Mempercepat transfer teknologi dan tepat sasaran melalui bantuan benih varietas unggul baru yang diikuti dengan sistem Sekolah lapang , baik dalam pengelolaan pertanaman maupun dalam penanganan pasca panen. Untuk varietas yang belum beradaptasi dilaksanakan uji varietas di beberapa lokasi, sehingga benih yang disebarkan ke petani adalah yang sudah mengalami uji adaptasi dan cocok dikembangkan di daerah Jambi.
15. Mendorong Pola Partisipasi Aktif Seluruh Stakeholder. Petani yang telah pernah mendapat bantuan dan berhasil dalam usahanya didorong untuk mengembalikan modal yang diterimanya kelompok dan dijadikan sebagai modal kelompok. Khusus untuk penangkar benih difasilitasi menjalin kerjasama dengan stakeholder, sehingga benih yang dihasilkan dapat dipasarkan dan terjual dengan harga yang layak.
16. Prioritas pembangunan diarahkan pada pemberdayaan petani dan masyarakat sehingga mereka mampu mengelola dan mengembangkan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan. Sementara itu kapasitas aparat pertanian di daerah masih belum memadai untuk dapat mendorong dan mengkoordinasikan pembangunan pertanian. Untuk itu diperlukan upaya – upaya peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan melalui pendidikan/pelatihan dan pemanfaatan pola dan manajemen pembangunan. Pola pembangunan yang ditetapkan selama ini yang masih diwarnai pendekatan pemberian yang bersifat cuma – cuma sudah mulai dikurangi. Pembangunan saat ini sudah diarahkan dengan pendekatan program dengan melibatkan peran aktif dan sharing dari masyarakat dan seluruh stakeholder yang seluas – luasnya. Bantuan alsintan sudah mulai dalam bentuk Bantuan Uang muka Alsintan (BUMA), dimana petani atau kelompok tani harus

menyiapkan dulu dana tambahan pembelian alat, baru dana dari pemerintah diberikan ke kelompok tersebut.

17. Kelembagaan pangan dan agribisnis guna menopang pemberdayaan petani, seperti kelembagaan produksi khususnya kelompok tani, Kelembagaan irigasi khususnya Perkumpulan Petani Pemakai Air(P3A), Kelembagaan lumbung pangan desa

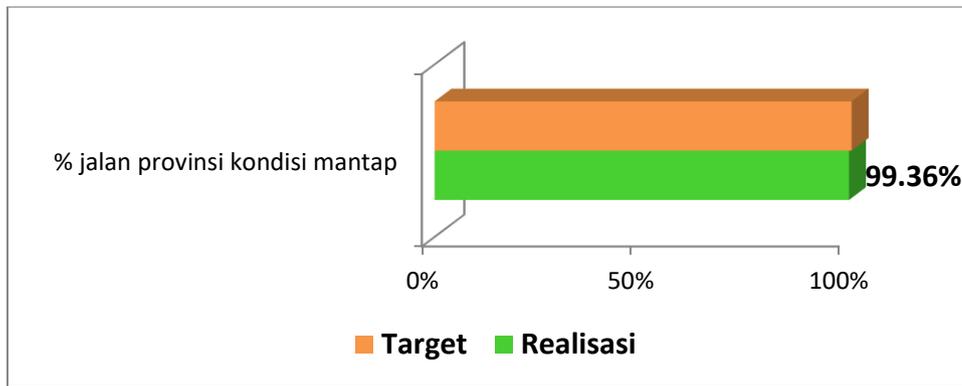
### ***Sasaran Strategis 8***

#### ***Terciptanya Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi yang Menyentuh terhadap Akses dan Sentra Perekonomian***

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pendukung daya saing. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diyakini sebagai motor pembangunan suatu daerah. Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Infrastruktur juga memegang peranan penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta merupakan aspek penting peningkatan produktivitas sektor produksi.

Infrastruktur transportasi dalam fungsinya sebagai fasilitas publik memberikan pelayanan publik bagi masyarakat yaitu: (1) mendorong pemerataan pembangunan, (2) melayani kebutuhan pergerakan masyarakat dengan harga yang terjangkau, (3) memperlancar mobilitas distribusi barang dan jasa; dan (4) mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Dalam kaitannya dengan sektor antara, infrastruktur transportasi menghubungkan berbagai macam aktivitas ekonomi, merupakan prasarana penghubung antar daerah dan memudahkan mobilitas penduduk serta memperlancar lalu lintas barang antar daerah.

Capaian sasaran akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian ditunjukkan oleh indikator persentase jalan Provinsi dalam Kondisi mantap. Capaian terhadap indikator tersebut pada tahun 2018 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3-25 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian

### 1. Jalan dalam Kondisi Mantap

Penanganan jalan dan jembatan menjadi sangat sentral. Apabila tidak mampu dilaksanakan berakibat pada aktifitas barang dan orang akan terhambat. Total panjang jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Jambi berdasarkan SK.Gub.No.567/Kep.Gub/DPU/2012 tanggal 04 Oktober 2012 adalah 1.504,93 Km. Kemudian, dengan adanya peningkatan status jalan dari jalan provinsi menjadi jalan nasional berdasarkan Ketetapan Menteri PUPR pada tanggal 23 April 2015, maka total panjang jalan provinsi sampai dengan Tahun 2015 adalah 1129,906 km. Beberapa ruas Jalan provinsi yang telah ditetapkan tersebut merupakan jalan menuju sentra produksi dengan total sepanjang 855,589 km.

Tabel 3.21 Capaian indikator jalan dalam kondisi mantap

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2018
	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017	2018				
					Tar-get	Reali-sasi	% capai-an		
Jalan dalam kondisi mantap	74,82	75,56	76,074	76,573	77,7	77,205	99,36	79,54	97,06

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan PR, 2019

Tingkat kemantapan jalan ditentukan oleh dua kriteria yakni mantap secara konstruksi dan mantap dalam layanan lalu lintas, Berdasarkan Keputusan Menkimpraswil No.534/KPTS/M/2001 maka Jalan dengan kondisi mantap adalah akumulasi jalan kondisi baik dan sedang. Dalam rangka mewujudkan jalan dalam kondisi mantap, maka penanganan jalan di Provinsi Jambi pada tahun 2018 difokuskan pada pembangunan/ peningkatan jalan dan jembatan serta pemenuhan kebutuhan drainase di jalan tersebut. Capaian indikator persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap pada tahun 2018 adalah sebesar 77,205%. Bila dibandingkan dengan target pada tahun 2018 sebesar 77,7%, maka persentase capaian ini mencapai 99,36% atau masuk dalam kategori **sangat tinggi**. Demikian pula bila dibandingkan dengan target akhir pada tahun 2021, maka capaian ini telah mencapai 97,06% atau sangat tinggi.

Guna mewujudkan capaian di atas, Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan **Program Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan** dengan kegiatan – kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan berikut:

1. Pembangunan Jalan wilayah I Kab.Tanjab Barat terealisasi 95.57% pada ruas
  - *Jalan Sei. Saren-Teluk Nilau-Senyerang-Bts.Riau (eff.13.0 km)*
  - *Jalan Senyerang-Sei. Rambai-Tebing Tinggi (eff.3.00 km)*
2. Pembangunan Jalan wilayah II Kab.Tanjab Timur terealisasi 99.99% pada ruas
  - *Jalan Ma. Sabak/Dermaga Ds. Rantau Rasau (eff.3.5 km)*
  - *Jalan Ds. Rantau rasau Ds.Simpang (eff.2.00 km)*
  - *Pembangunan jalan Ds.Simpang-Ujung jabung (eff.1.00 km)*
3. Peningkatan Jalan diwilayah III (Kab.Muaro Jambi) terealisasi 99.99% pada ruas
  - *Peningkatan struktur jalan Sp.Pudak-Suak kandis(eff.3.25 km)*
  - *Jalan Simpang Ahok-Simp. Pasar-Bumi Perkemahan Pramuka (eff.3.0 km)*

4. Peningkatan Jalan diwilayah IV (Kab.Bungo) terealisasi 100% pada ruas
  - *Jalan Ma.Bungo-Peninjauan-Junction (eff.3.00 km)*
  - *Jalan Rantau Ikil-Bts. Sumbar (eff.1.50 km)*
  - *Jalan Peninjauan-Lubuk Mengkuang-TKA (Bts. Sumbar) (eff.2.50 km)*
5. Peningkatan Jalan diwilayah IX (Kab.Tebo) terealisasi 100% pada ruas
  - *Jalan Simp.logpon-Padang lamo-Tanjung (eff.7.50 km)*
  - *Jalan simp.sawmil-simp.logpon (eff.3.00 km)*
  - *Jalan Simp.Betung bedarah-Pintas-Btd.Kab.Tebo/Kab.Bungo (eff.4.00km)*
  - *Jalan Ma.Tebo – Simp. Logpon (6.00 KM)*
6. Peningkatan Jalan diwilayah VIII (Kab.Sarolangun) terealisasi 99.96% pada ruas
  - *Jalan Sp. Pelawan-Sei Salak (1.75 Km)*
  - *Jalan Sei Salak-Pkn Gedang/btg. Asai (2.0 Km)*
  - *Jalan Pkn Gedang – Ma.Talang (1.0km)*
  - *Jalan Pauh-Air Hitam (2.0 Km)*
  - *Jalan Pauh – Lubuk Napal – Sipitun – Bts Sumsel (1.25Km)*
  - *Jalan Ma. Talang – Sei.Keradak – Beringin Tinggi (1.00 Km)*
7. Peningkatan Jalan diwilayah VI (Kab.Merangin) terealisasi 99.68% pada ruas
  - *Penanganan longsor Jl.Sp.Pl.Rengas-Ma.siau-Dsn.Tuo-Jangkat*
  - *Jalan Ma.Siau-Dsn.Tuo-Jangkat (eff.1.00 km)*

- *Jalan Simp Margoyoso – Sumber Agung- Bts. Kab Merangin/Kab Sarolangun ( 2.50 Km)*
  - *Jalan Air Hitam-Simp Jelatang (1.50 Km)*
  - *Eskalasi Pnk. Jalan Sp. Pulau Rengas Ma. Siau Dusun Tuo Jangkat (Multi Years)*
- 8.** Peningkatan Jalan diwilayah V (Kab.Batanghari dan Ma.Jambi) terealisasi 99.99% pada ruas
- *Peningkatan Struktur jalan Tempino-Ma.Bulian (eff.2.75 km)*
  - *Jalan Simp.Panerokan-Sei.Bahar (eff.4.50Km)*
  - *Jalan Sei.Duren – Sei. Buluh dan Pemb. Box Culvert (Eff. 2.00 Km)*
- 9.** Peningkatan Jalan diwilayah VII (Kab.Kerinci) terealisasi 100% pada ruas
- *Jalan Sangg Agung – Jujun – Lempur ( Eff. 2.00 Km)*
  - *Jalan Jujun – Sei Penuh (Eff. 2.00 Km)*
  - *Pembangunan Jalan Kelok Sago – Lembur/Sangg.Agung (Eff. 2.50 Km)*
- 10.** Peningkatan Jalan dengan sumber DAK terealisasi 99.95% pada ruas
- *Jalan Sp. Lagan – Sp Pelabi/zona Lima (DAK) ( Eff 2.50 Km)*
- 11.** Peningkatan Jalan di wilayah Kota Jambi terealisasi 99,24% pada ruas
- *Jalan Pattimura – Jl. Bakkaruddin dan Box Culvert (Eff 0.85 Km)*
  - *Jalan RE. Martadinata, Jl. KH. Abdul Majid Jambi dan Jl. Hayam Wuruk (Eff. 2.00 Km)*
  - *Pemeliharaan jalan Wilayah Perkotaan Jambi*
- 12.** Pembangunan Jembatan di Kab. Merangin dan Kerinci terealisasi 65.72% pada
- *Pemb. Jembatan Muara Kelukup ( Eff 30' M )*
  - *Pembangunan Jembatan Tanjung Benuang ( Eff 34' M )*
  - *Pembangunan Jembatan Kelok Sago (Eff 150' M ) (Bangunan Atas)*
- 13.** Rehab/Pemeliharaan Jembatan di Provinsi Jambi terealisasi 99.82% pada

- *Rehab Jembatan Sei. Pelawan*
- *Rehab Jembatan Sei. Pulau Pandan*
- *Rehab Jembatan Sei. Naga*
- *Rehab Jembatan Sei. Belalang*
- *Rehab Jembatan Sei. Binal*
- *Rehab Jembatan Sei. Sikamis Besar*
- *Rehab Jembatan Sei. Salak*
- *Rehab Jembatan Sei. Pinang*
- *Rehab Jembatan Sei. Sauk*
- *Rehab Jembatan Sei. Batu Bagumbak*
- *Rehab Jembatan Sei. Kunkun I*
- *Rehab Jembatan Sei. Kunkun II*
- *Rehab Jembatan Kemanang*
- *Rehab Jembatan Sei. Balik II*
- *Rehab Jembatan Sei. Birun*
- *Rehab Jembatan Sei. Duku*
- *Rehab Jembatan Sei. Siau II*
- *Rehab Jembatan Sei. Sisin II*
- *Rehab Jembatan Nilo Sunsang*
- *Rehab Jembatan Nilo Dingin*
- *Rehab Jembatan Sei. Lalang*
- *Rehab Jembatan Sei. Mantilin IV*
- *Rehab Jembatan Sei. Gedang*
- *Rehab Jembatan Meram*
- *Rehab Jembatan Riam*
- *Rehab Jembatan Parit V dan VI Teluk Nilau*

- *Rehab Jembatan Parit III dan IV Teluk Nilau*
- *Rehab Jembatan Parit II*
- *Rehab Jembatan Karang Babi dan Sei Simpai*
- *Rehab Jembatan Pauh*
- *Rehab Jembatan Sei. Dua*
- *Rehab Jembatan Sei. Besar*
- *Rehab Jembatan Sei. Kuning*
- *Rehab Jembatan Ds. Muaro Delang*
- *Rehab Jembatan Sei Sahud*
- *Rehab Jembatan Sei Limbur*
- *Rehab Jembatan Ds. Tunas Lestari*
- *Rehab Sei Air Hitam Kecil*
- *Rehab Jembatan Air Hitam ( Sei Napol)*
- *Rehab Jembatan Ds. Paku Haji*
- *Rehab Jembatan Anak Pauh*
- *Rehab Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi Jambi*

**Permasalahan:**

- 1 Permasalahan yang umumnya terjadi adalah kerusakan jalan yang terjadi tidak serta merta bisa langsung ditangani, namun harus menunggu perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya, sehingga kondisi jalan yang rusak akan semakin parah.
- 2 Peningkatan kondisi jalan baru mampu sedikit mengurangi jalan dalam kondisi rusak berat dan rusak ringan menjadi kondisi sedang dan belum mampu menambah panjang jalan dalam kondisi baik secara signifikan karena laju kerusakan lebih cepat daripada kemampuan Pemerintah Daerah dalam membangun

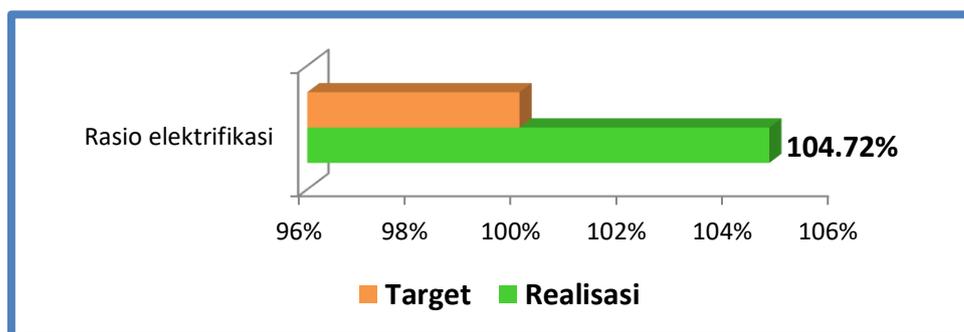
## Solusi:

- 1 Pemerintah Provinsi Jambi menyediakan alat berat sebagai alat tanggap darurat untuk penanganan awal sehingga kerusakan tidak semakin parah menjelang perbaikan dilakukan pada tahun berikutnya.
- 2 Meningkatkan kemampuan teknis jalan yang seiring dengan pengawasan yang baik dan perencanaan yang matang.
- 3 Selain melakukan perbaikan secara fisik, juga dilakukan pengawasan terhadap kendaraan yang menggunakan jalan, sehingga tidak dilewati oleh kendaraan yang melebihi kemampuan jalan.

### **Sasaran Strategis 9**

#### **Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Listrik**

Pembangunan infrastruktur kelistrikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap energi listrik. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Provinsi Jambi maka kebutuhan akan energi listrik juga turut meningkat. Tenaga listrik juga menjadi kebutuhan pokok dalam hal industrialisasi, sehingga suatu wilayah yang energi listriknya tidak bisa bersaing sudah dapat dipastikan industrinya juga tidak dapat bersaing. Sebagai suatu daerah yang sedang mengarahkan perubahan sektor unggulan dari sektor primer ke sektor sekunder, Provinsi Jambi menjadikan sasaran meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik menjadi salah satu sasaran yang harus dicapai dalam lima tahun kedepan. Adapun indikator yang menggambarkan capaian sasaran ini adalah Rasio Elektrifikasi, dimana capaian pada tahun 2018 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3-26 Capaian Sasaran meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik

Provinsi Jambi memiliki cukup banyak potensi energi baru dan terbarukan yang dapat dikembangkan untuk menutupi kekurangan energi di Provinsi Jambi.

Untuk Sumber energi, salah satu sumber energi terbarukan (*renewable resources*) yang terdapat di Provinsi Jambi adalah panas bumi (geothermal). Data-data lokasi potensi geothermal di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.22 Potensi Geothermal Provinsi Jambi

No	Lokasi	Resources (Mwe)			Reserves (Mwe)	
		Speculative	Hypotetic	Predicted	Possible	Proven
1	Gunung Kapur, Kerinci	25	-	-	-	-
2	Gunung Kaca, Kerinci	25	-	-	-	-
3	Sungai Betung, Kerinci	100	-	-	-	-
4	Semurup, Kerinci	-	-	208	-	-
5	Lempur, Kerinci	-	-	150	15	40
6	Air Dikit, Merangin	25	-	-	-	-
7	Graha Nyabu, Merangin	-	185	-	-	-
8	Sungai Tenang, Merangin	-	74	-	-	-

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2018

Potensi sumber enenrgi lainnya adalah air terjun, yang berlokasi di beberapa kabupaten yang berada di bagian Barat Provinsi Jambi. Adapun lokasi potensi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.23 Lokasi Potensi Air terjun di Provinsi Jambi

NO	KABUPATEN	LOKASI	KET
1	MERANGIN	1. Air Terjun Sungai Sigerincing Desa Muara Siau Kec. Muara Siau	
		2. Air Terjun Tuah Rajo Sungai Tembesi Desa Rantau Suli Kec. Sungai Tenang	
		3. Air Terjun Telentam Desa Telentam Kec. Tabir Barat	
		4. Air Terjun Telun Tujuh Desa Rantau Suli Kec. Sungai Tenang	3,8 MW
		5. PLTA Langkup Danau Pauh, Sungai Lungkup, Kec. Jangkat	
		6. Desa Renah Pelaan Kec. Jangkat	200 KW
		7. Desa Tiaro Kec. Muara Siau	50 KW
		8. Desa Sepantai Renah	
		9. Desa Terapung Air Liki	
		10. Desa Terapung Air Liki Baru	
		11. Desa Terapung Ngaol Ilir	
		12. Desa Tanjung Beringin	
		13.	
2	TEBO	14. Desa Semambu Kec. Sumay	
3	KERINCI	15. Desa Air Bahan I Kec. Gunung Kerinci	13 KW
		16. Desa Air Bahan II Kec. Gunung Kerinci	180 KW
		17. Desa Kuning Kec. Siulak Deras	70 KW

NO	KABUPATEN	LOKASI	KET
4	SAROLANGUN	18. Desa Simpang Narso Kec. Batang Asai	7,8 KW
		19. Desa Simpang Narso Kecil	
		20. Desa Padang Jering	
		21. Desa Pulau Langsung	
5	BUNGO	22. Dusun Tanjung Bungo Kec. Limbung Luhak Mendiang	10 KW
		23. Dusun Laman Panjang Dusun Aur Cino Kec. Bathin III	19 KW
		24. Desa Sungai Talang Kec. Bathin III Ulu	12 KW
		25. Air Terjun Telun Tirau Dusun Baru Pelepat Dusun Batu Kerbau Kec. Pelepat	32,6 KW

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2018

Selain panas bumi dan air terjun, Provinsi Jambi juga memiliki potensi air yang bisa dikembangkan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Adapun lokasi potensi tersebut dapat dilihat pada dua tabel berikut ini.

Tabel 3.24 Data Potensi Energi Potensial Air di Kabupaten Kerinci

NO	NAMA AIR TERJUN	KETINGGIAN AIR TERJUN	ENERGI YANG DIHASILKAN	LEBAR AIR TERJUN	LEBAR SUNGAI	KETINGGIAN DPL	JARAK DARI KOTA
1	BATU NAMORA	50 M	5 – 6,2 MW	6 – 7 M	6 – 7 M	1200 – 2000	50 KM
2	BEDENG IV	25 M	1,6 – 2 MW	4 – 5 M	5 – 6 M	700 – 1000	45 KM
3	SELUANG BERSISIK	50 M	2 – 3,2 MW	7 – 8 M	7 – 7,6 M	1000 – 1200	40 KM
4	TALANG KEMULUN	23 M	1,5 – 2 MW	5 – 6 M	5 – 7 M	600 – 1000	18 KM
5	PANCURAN ARO	75 M	6 – 8,3 MW	8 – 9,5 M	6 – 9 M	800 – 2000	15 KM
6	SUNGAI MEDANG	25 M	2 – 3 MW	5 – 6,5 M	6 – 9 M	500 – 870	10 KM
7	PANCURAN TUJUH	30 M	4,5 – 6,3 MW	7 M	6 – 7 M	800 – 1700	30 KM
8	TELUN BERASAP	75-90 M	7 – 8,3 MW	5 – 7 M	6 – 7 M	1200 – 2000	60 KM
9	BUKIT TAPAN	60 M	3,5 MW	5 – 7 M	5 – 7 M	1200 – 2000	18 KM
10	GUNUNG TUJUH	80 M	15 MW	6 – 7 M	6 – 7 M	1200 – 2000	65 KM

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2018

Sedangkan pemenuhan kebutuhan listrik pada wilayah yang terisolir dan tidak terjangkau dengan jaringan listrik PLN serta tidak memiliki potensi air terjun, Pemerintah Provinsi Jambi telah mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan *system Solar Home System (SHS)* dan biogas yang tersebar di beberapa kabupaten di Provinsi.

### 1. Rasio Elektrifikasi

Listrik dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan dasar manusia seperti penerangan, menjalankan peralatan rumah tangga dan mengoperasikan peralatan-peralatan industri. Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin

ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Rasio elektrifikasi adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang berlistrik dengan jumlah keseluruhan rumah tangga.

Kondisi kelistrikan di Provinsi Jambi saat ini salah satunya dapat dilihat pada Rasio Desa Berlistrik (RD) di Provinsi Jambi, dimana sampai Bulan November Tahun 2018 rasio desa berlistrik mencapai 95,21%, meningkat dari kondisi tahun 2017 yang baru mencapai 91,88 % dari total desa 1562 desa dan kelurahan. Jumlah desa belum teraliri listrik sebanyak 67 desa atau menurun dari kondisi tahun 2017 yang masih pada jumlah 127 desa di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Desa-desa berlistrik bersumber dari listrik PLN maupun Non PLN.

Tabel 3.25 Rasio Desa Berlistrik per Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Jambi

No	Kabupaten/Kota	Rasio Desa Berlistrik (%)
1	Kota Jambi	-
2	Muaro Jambi	99,33
3	Batang Hari	99,09
4	Tanjung Jabung Timur	87,67
5	Tanjung Jabung Barat	83,33
6	Sarolangun	89,26
7	Bungo	100
8	Merangin	90,73
9	Tebo	98,13
10	Kerinci	100
11	Kota Sungai Penuh	100
		95,21

Sumber: Dinas ESDM, 2019

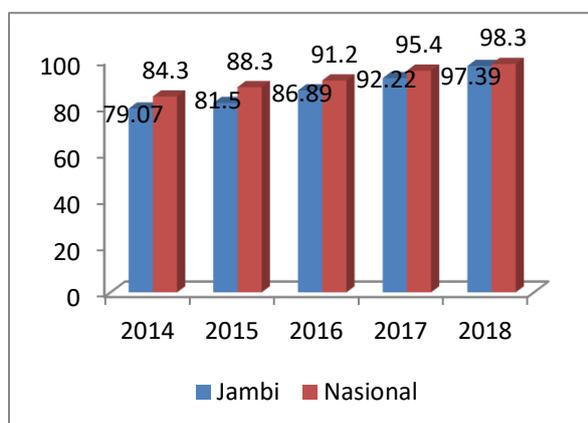
Secara umum capaian indikator rasio elektrifikasi di Provinsi Jambi Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.26 Capaian Indikator Rasio elektrifikasi

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja						Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2018
	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017	2018			
					Target	Realisasi		
Rasio Elektrifikasi	79,07	81,5	86,89	92,22	93	97,39	104,72	101,45

Sumber: Dinas ESDM, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio elektrifikasi di Provinsi Jambi terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2018, capaian indikator rasio elektrifikasi terealisasi sebesar 97,39. Capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 93 atau terealisasi sebesar 104,72% dengan kriteria **sangat tinggi**. Capaian ini telah melewati target akhir tahun 2021 atau terealisasi mencapai 101,45% dengan kategori sangat tinggi.



Sumber: Kementerian ESDM, 2019

Gambar 3-27 Rasio Elektrifikasi Provinsi Jambi dibandingkan dengan nasional

Capaian rasio elektrifikasi Provinsi Jambi selalu berada di bawah nasional, namun dengan gap yang semakin mengecil, atau dengan kata lain peningkatan rasio elektrifikasi Provinsi Jambi lebih cepat daripada nasional. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan rasio elektrifikasi tersebut, terutama guna memenuhi kebutuhan listrik di wilayah perdesaan dengan akses yang sulit namun memiliki potensi untuk pengembangan energi

baru terbarukan. Pada tahun 2018, tindak lanjut *Letter of Intent* (LoI) yang telah ditandatangani bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan *United nations*

*development Programme* (UNDP) untuk pembangunan empat unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di empat desa di Provinsi Jambi telah terimplementasikan dan diresmikan. Proyek ini telah memberikan akses listrik kepada 937 rumah atau 6.454 jiwa di empat desa tersebut.

Program yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 dalam rangka peningkatan rasio elektrifikasi ini adalah **Program Pengembangan Energi**, dengan kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembangunan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (TM, TR, Trafo)

Pada tahun 2018 pembangunan jaringan dilakukan di 3 Kabupaten yaitu :

- Revitalisasi/Rehab Jaringan Listrik Desa Karang Jering- Desa Kasiro Kab.Sarolangun.
- Pembangunan JTR JL.Masjid Istiqomah RT.02 Desa Pelawan Jaya Kec.Sarolangun Kab.Sarolangun dengan panjang jaringan 0,765 kms
- Pembangunan JTR Desa Rejosari RT 07 RW 02 Dusun 02 Kec.Pamenang Kab.Merangin dengan panjang jaringan sekitar 1 kms
- Pembangunan 1 Unit Trafo 50 kVa dan Asesoris Desa bernai RT 01 Kec.Sarolangun Kab.Sarolangun.
- Penggantian Tiang JTR dan Aksesoris di belakang Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat.

**Permasalahan:**

1. Rasio elektrifikasi masih di bawah rata-rata nasional.
2. Beberapa potensi energi alternatif seperti kotoran sapi, POME, Biji jarak, tenaga surya, angin, panas bumi dan potensi air terjun belum termanfaatkan secara maksimal

**Solusi:**

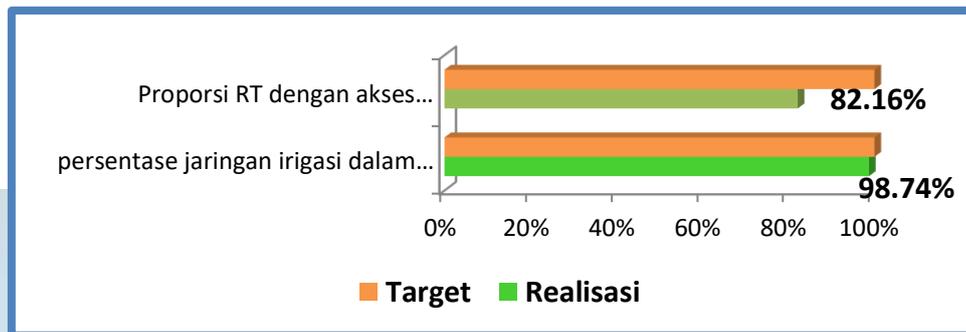
1. Memanfaatkan potensi energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif di Provinsi Jambi untuk listrik perdesaan dan sebagai upaya meningkatkan rasio elektrifikasi Provinsi Jambi

## **Sasaran Strategis 9**

### ***Meningkatnya Akses terhadap Air Bersih dan Pemenuhan Kebutuhan Jaringan irigasi***

Air bersih adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goal/SDGs*) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih. Sekjen PBB menetapkan 27 panel tingkat tinggi pada bulan Juli 2012. Panel tingkat tinggi merupakan kemitraan global yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan mengubah perekonomian melalui pembangunan berkelanjutan. Fokus utama ada pada ketersediaan pangan, air bersih dan energi yang merupakan dasar dari kehidupan. Perubahan yang paling penting dalam konsumsi berkelanjutan dan produksi akan didorong oleh teknologi, inovasi, desain produk, pedoman kebijakan yang terperinci, pendidikan dan perubahan perilaku. Panel mengusulkan dua belas *universal goals* serta target nasional dan akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau pada tahun 2030. Dalam rangka mendukung target nasional ini, Provinsi Jambi menjadikannya sebagai salah satu sasaran jangka menengah daerah.

Sementara untuk mendukung fokus ketersediaan pangan, salah satu prasarana pendukungnya adalah irigasi yang baik. Luas areal layanan Irigasi di Provinsi Jambi adalah sebesar 33.248 Ha mencakup 92 Daerah Irigasi (DI) yang terdiri atas 2 DI Kewenangan Pusat, 4 DI Kewenangan Provinsi dan 86 DI Kewenangan Kab/Kota. Adapun DI Kewenangan Provinsi adalah DI Suban, DI Batang Ule, DI Tanduk, dan DI Limun Singkut dengan luas keseluruhan yang 6.029 Ha. Adapun capaian sasaran meningkatnya akses terhadap air bersih ditunjukkan oleh indikator Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, perkotaan dan perdesaan, sedangkan capaian pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi ditunjukkan oleh indikator persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik. Capaian terhadap kedua indikator tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3-28 Capaian sasaran meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi

### 1. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan

Air minum merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan makhluk hidup. Air minum berperan agar makhluk hidup khususnya manusia dapat bertahan hidup. Kualitas air minum merupakan faktor yang sangat menentukan bagi kesehatan. Pasokan air yang memadai sangat penting untuk mengurangi risiko penyakit dan untuk menjamin hak atas pangan, kesehatan dan perumahan. Keamanan dan aksesibilitas terhadap air bersih menjadi perhatian besar di seluruh dunia. Mudahnya akses terhadap air bersih dan sanitasi dapat meningkatkan kesehatan individu, sehingga dapat meningkatkan kehadiran di sekolah dan meningkatkan produktifitas. Oleh karena itu sumber daya air perlu dikelola dengan baik untuk pemenuhan hak asasi manusia mendapatkan air minum dan sanitasi yang aman dan bersih.

Tabel 3.27 Capaian Indikator Kinerja Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2018
	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017	2018				
					Target	Realisasi	% capaian		
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	60,78	62,75	63,23	65,73	80	65,73*	82,16	80	82,16

Sumber: Dinas PUPR Prov. Jambi, 2019

Ket: \*) kondisi 2017 yang dirilis tahun 2018

Berdasarkan data di atas, terlihat perkembangan proporsi air minum layak Provinsi Jambi yang terus menunjukkan peningkatan walaupun belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Realisasi indikator proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan Provinsi Jambi pada tahun 2018 adalah sebesar 65,73%. Capaian ini belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 80% atau hanya terealisasi sebesar 82,16 % dan termasuk dalam kategori tinggi. Bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2021, maka capaian ini baru memenuhi 82,16% dari target akhir dan masih termasuk dalam kategori tinggi.

Pada dasarnya Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan banyak hal dalam rangka pemenuhan target indikator ini, seperti perluasan/ pemasangan jaringan pipa distribusi pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun bila dibandingkan dengan nasional, terlihat bahwa capaian Provinsi Jambi atas indikator ini selalu berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa percepatan yang dilakukan oleh Provinsi Jambi belum mampu mengimbangi laju pemenuhan kebutuhan air bersih secara nasional.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator ini adalah:

1. Program Penyediaan dan pengelolaan air baku
2. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan pengairan lainnya.

**Permasalahan:**

- 1 Upaya peningkatan proporsi akses rumah tangga terhadap air minum layak masih menemukan kendala yang berhubungan dengan target cakupan pembangunan yang besar sementara sumber pendanaan terbatas, kemampuan pelayanan operator air minum serta permasalahan kemiskinan yang membatasi kemampuan masyarakat dalam mengakses air minum layak.

**Solusi:**

- 1 Terus melakukan perluasan/ pemasangan jaringan pipa distribusi pada masyarakat berpenghasilan rendah dan terus bekerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/ kota dalam pemenuhan sarana prasarana air bersih sesuai dengan kewenangan masing-masing

**2. persentase jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik**

Luas areal layanan Irigasi di Provinsi Jambi adalah sebesar 33.248 Ha mencakup 92 Daerah Irigasi (DI) yang terdiri atas 2 DI Kewenangan Pusat, 4 DI Kewenangan Provinsi dan 86 DI Kewenangan Kab/Kota. Adapun DI Kewenangan Provinsi hingga tahun 2018 adalah DI Suban, DI Batang Ule, DI Tanduk, dan DI Limun Singkut dengan luas keseluruhan yang 6.029 Ha.

Tabel 3.28 Capaian Indikator persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2018
	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017	2018				
					Target	Realisasi	% capaian		
Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	62,69	66,35	74,3	76,2	78	77,2	98,74	95	84,84

Sumber: Dinas PUPR Prov. Jambi, 2019

Tabel di atas memperlihatkan bahwa indikator persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari target sebesar 78% pada tahun 2018, Pemerintah Provinsi mampu mencapai 77,2% atau tercapai 98,74% dengan kriteria **sangat tinggi**. Bila dibandingkan dengan target akhir pada tahun 2021 maka capaian ini masuk dalam kriteria tinggi dengan capaian sebesar 84,84%.

Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik atau fungsional memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama pada Provinsi Jambi yang mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian. Persentase fungsionalisasi daerah irigasi sama artinya dengan meningkatkan fungsional lahan pertanian. Peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional ditandai dengan Pertumbuhan Ekonomi dan meningkatnya lahan pertanian. Adapun faktor yang mempengaruhi Peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional yaitu terdiri atas 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang mempengaruhinya yaitu kemampuan teknis, pengawasan yang baik, matangnya perencanaan. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional yaitu dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah dan kerjasama antar instansi yang terkait, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Langkah yang perlu diperhatikan dalam Peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional yaitu aksesibilitas dan kondisi lahan pertanian.

Selain faktor tersebut diatas, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 guna mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran tidak dapat diabaikan begitu saja karena program dan kegiatan dimaksud memberikan andil yang besar terutama pada peningkatan dibidang irigasi. Sepanjang tahun 2018 Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan **program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya**, yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan air lainnya ini dilaksanakan kegiatan pendukungnya yaitu Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi. Adapun fokus kegiatan adalah penanganan rehabilitasi saluran primer; saluran sekunder; jalan inspeksi; bangunan pelengkap; bendung; dan lantai saluran; serta pintu air. Kegiatan – kegiatan yang dilakukan tersebut dapat dinilai efektif karena dapat meningkatkan persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan menurunkan persentase jaringan irigasi dalam kondisi rusak secara signifikan.

**Permasalahan:**

1. Capaian persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik tidak merata pada seluruh Daerah Irigasi kewenangan Provinsi

**Solusi:**

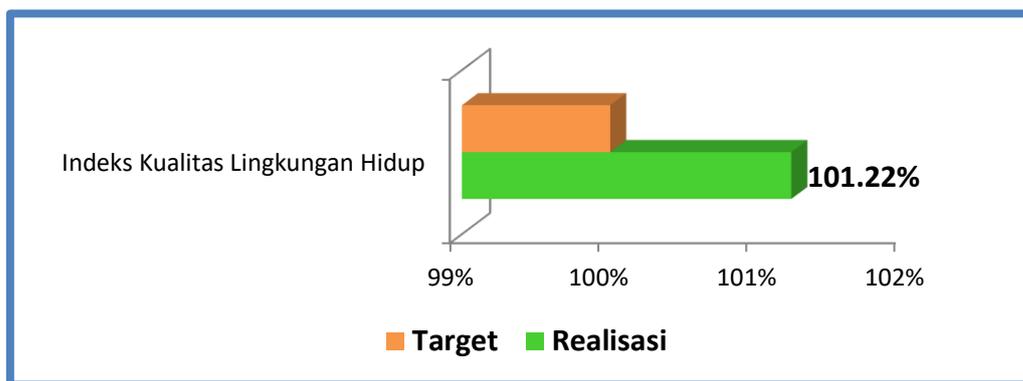
1. Upaya peningkatan kondisi jaringan harus dilaksanakan merata pada seluruh Daerah Irigasi, mengingat pada keempat lokasi Daerah Irigasi tersebut merupakan lumbung padi Provinsi Jambi dan bila produktivitasnya terganggu maka akan mengganggu ketahanan pangan di Provinsi Jambi.

***Sasaran Strategis 11***

***Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan***

Sumber daya alam merupakan semua komponen yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar dapat bertahan hidup dan lebih sejahtera. Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya alam merupakan salah satu modal besar yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dibalik dampak ekonomi yang positif, bila tidak dilakukan pengelolaan yang benar maka dampak yang ditimbulkan terutama yang berhubungan dengan lingkungan dan sosial akan buruk bagi generasi mendatang.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jambi merasa berkewajiban untuk mengelola sumber daya alam di Provinsi Jambi dengan baik dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi dan mengurangi seminimal mungkin dampak lingkungan yang akan diakibatkan. Keinginan luhur tersebut diejawantahkan dalam salah satu sasaran strategis daerah, yaitu “meningkatnya kualitas pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan”. Capaian sasaran tersebut ditunjukkan oleh indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan capaian pada tahun 2018 dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar 3-29 Capaian Sasaran Strategis meningkatnya kualitas pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan

### 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia saat ini dinilai secara kuantitatif dengan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diadopsi dari beberapa sumber diantaranya *Environmental Performance Index (EPI)* yang dikembangkan oleh sebuah pusat studi di Universitas Yale, Amerika Serikat. Tiga indikator yang menjadi dasar penilaian IKLH di Indonesia mencakup kualitas air sungai, kualitas udara ambien, dan tutupan hutan.

IKLH merupakan sebuah kebijakan yang diambil untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah dan menjadi salah satu cara untuk mereduksi banyaknya data dan informasi mengenai kualitas lingkungan hidup sehingga dapat dijadikan sebagai sebuah parameter untuk membandingkan kualitas

lingkungan hidup di wilayah tersebut dengan wilayah lainnya atau membandingkan kualitas lingkungan hidup pada tahun sekarang dengan tahun sebelumnya.

Dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Lebih lanjut dalam Pasal 262 ayat (1) disebutkan bahwa Rencana pembangunan Daerah tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Karena dalam perumusan rencana pembangunan daerah harus berwawasan lingkungan, maka IKLH dapat menjadi masukan bagi para pengambil keputusan baik tingkat pusat maupun daerah dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan lingkungan dan mengukur keberhasilan program-program pengelolaan lingkungan.

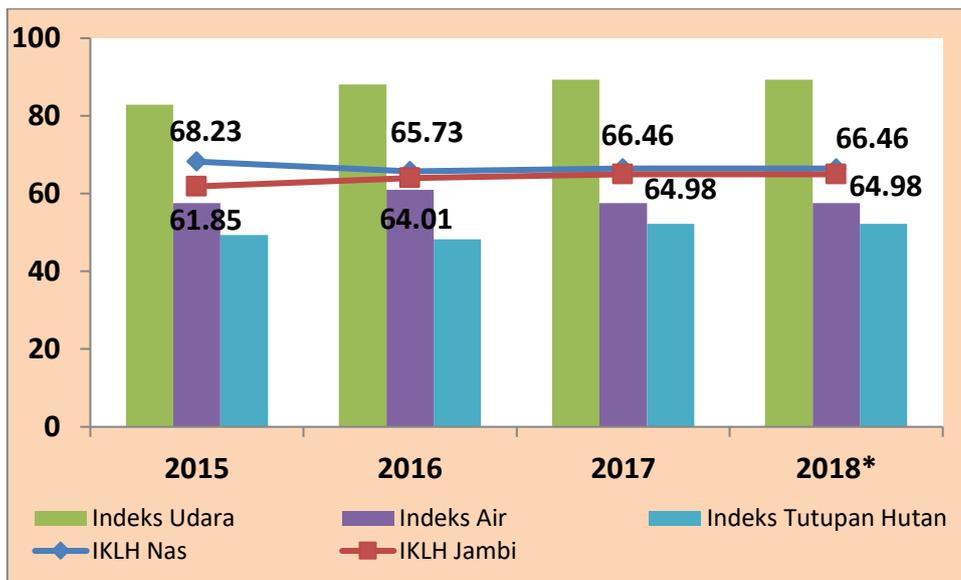
Tabel 3.29 Capaian Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2018
	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017	2018				
					Target	Realisasi	% capaian		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,04	61,85	64,01	64,98	64,2	64,98*)	101,22	66	98,45

Sumber: Kemen LH, 2018

Ket: \*kondisi tahun 2017 rilis tahun 2018

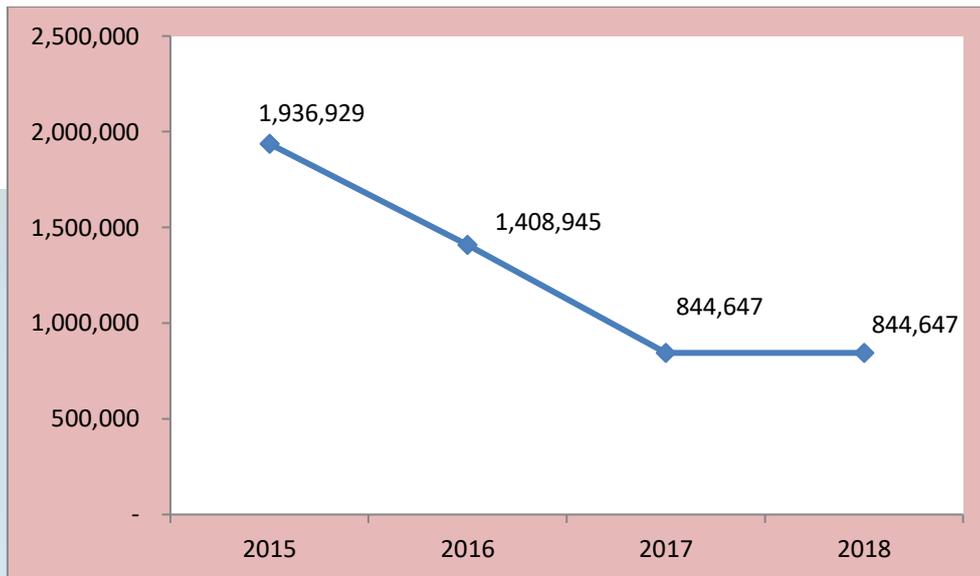
Data realisasi IKLH tahun 2018 yang disampaikan pada tabel di atas adalah data yang dirilis pada akhir tahun 2018 dan merupakan kondisi tahun 2017. Berdasarkan data tersebut, realisasi IKLH melebihi target yang ditetapkan atau terealisasi sebesar 101,22% atau masuk dalam kategori **sangat tinggi**. Bila dibandingkan dengan target akhir, maka realisasi ini telah mencapai 98,45% dari target akhir IKLH pada tahun 2021 yang ditetapkan sebesar 66,0 atau telah terealisasi sangat tinggi.



Sumber: Kemen LH (diolah), 2018

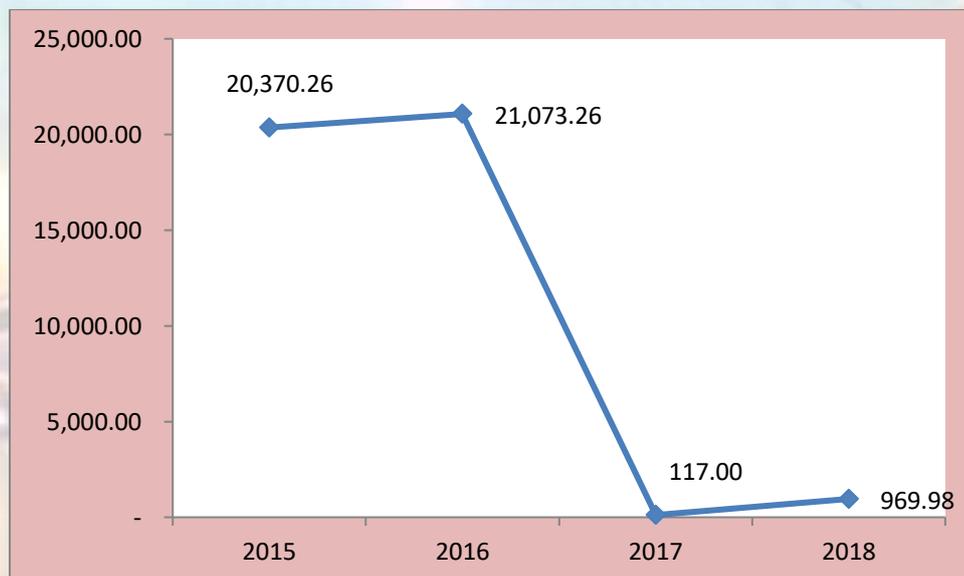
Gambar 3-30 Perkembangan komponen IKLH di Provinsi Jambi dan Perbandingan dengan IKLH Nasional

Gambar di atas memperlihatkan bahwa IKLH Provinsi Jambi masih terus dibawah IKLH Nasional, namun terlihat perbaikan yang lebih cepat dibanding nasional. Untuk itu upaya-upaya perbaikan kualitas lingkungan harus terus dilakukan secara masif. Perbaikan indeks tutupan lahan akan membutuhkan waktu beberapa tahun walaupun rehabilitasi hutan dan lahan terus dilakukan baik oleh Pemerintah Provinsi Jambi maupun pihak-pihak lainnya. Dalam rangka meningkatkan kualitas tutupan lahan tersebut, pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan rehabilitasi terhadap lahan-lahan kritis seluas 969,98 hektar. Rehabilitasi yang dilakukan di Provinsi Jambi selama bertahun-tahun telah mampu menurunkan luas lahan kritis yang ada di Provinsi Jambi. Sampai dengan tahun 2018 luas lahan kritis adalah 844.647 hektar.



Sumber: Dinas Kehutanan Prov. Jambi, 2019

Gambar 3-31 Perkembangan Luas Lahan Kritis Provinsi Jambi (Hektar)

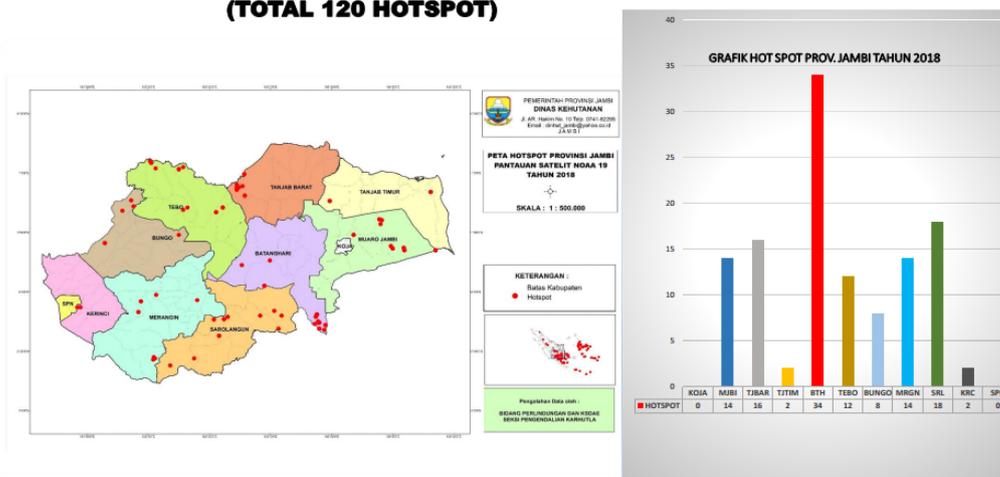


Sumber: Dinas Kehutanan Prov. Jambi, 2019

Gambar 3-32 Rehabilitasi lahan dan hutan yang dilakukan tahun 2015-2018

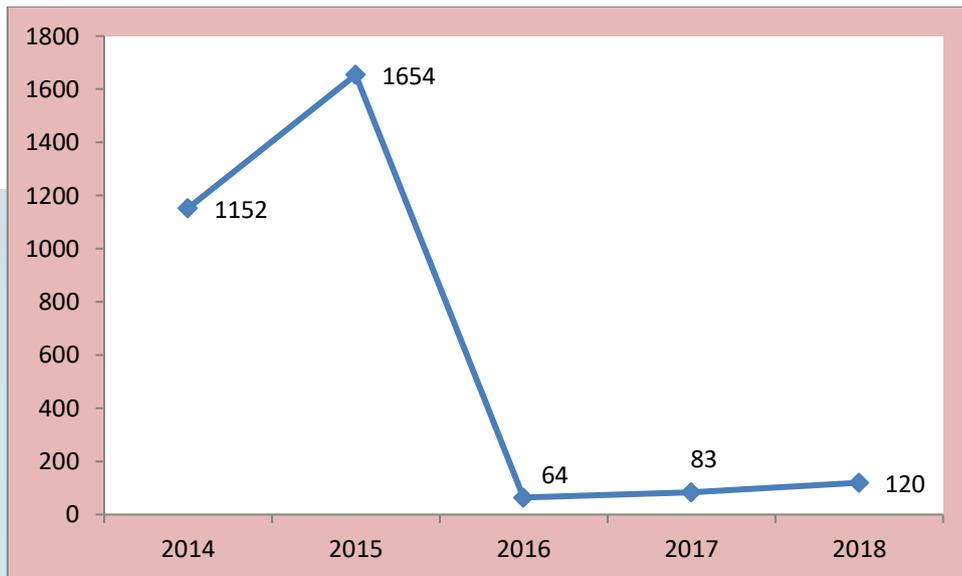
Selain itu, bersama-sama dengan Badan Restorasi Gambut juga terus dilakukan upaya-upaya perbaikan ekosistem gambut. Hal ini juga berkorelasi dengan perbaikan kualitas udara, karena kualitas udara di Provinsi Jambi lebih banyak dipengaruhi oleh kasus kebakaran lahan dan hutan yang terjadi pada musim kemarau. Tim terpadu kebakaran Hutan dan Lahan juga terus melakukan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan terus melakukan pemantauan hot spot, pemantauan langsung ke lapangan dan melakukan pemadaman secara cepat pada lahan yang terbakar. Pada tahun 2018 terdapat 120 hot spot di Provinsi Jambi yang tersebar di wilayah Kabupaten/kota dan terbanyak berada di Kabupaten Batang Hari. Jumlah hot spot ini sedikit mengalami peningkatan karena musim kemarau yang lebih panjang pada Tahun 2018. Peningkatan jumlah hot spot ini juga meningkatkan luas lahan dan hutan yang terbakar pada tahun 2018, namun upaya cepat Tim terpadu cukup berhasil menahan perluasan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi.

**PETA SEBARAN HOTSPOT PROVINSI JAMBI TAHUN 2018  
BERDASARKAN PANTAUAN SATELIT NOAA  
(TOTAL 120 HOTSPOT)**



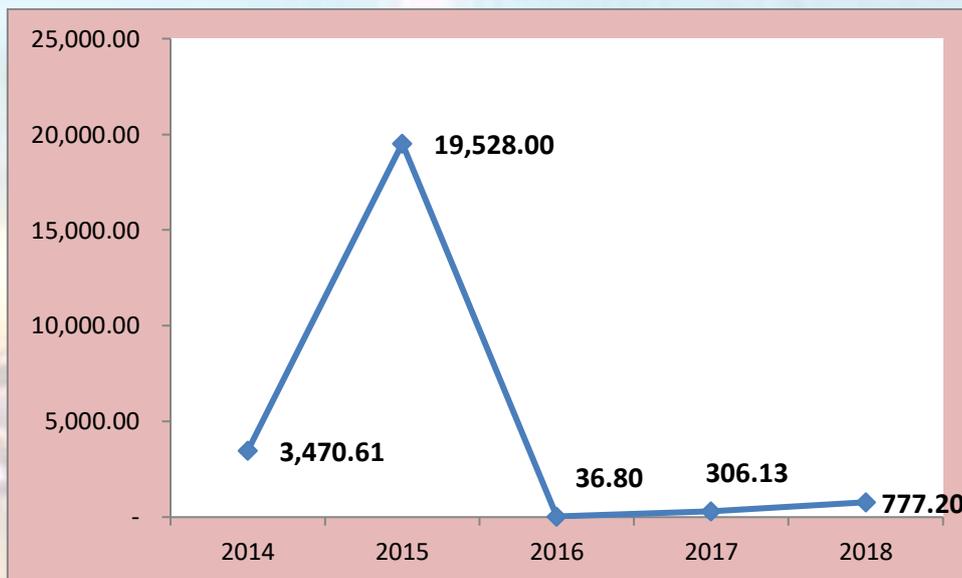
Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2019

Gambar 3-33 Sebaran Hotspot di Provinsi Jambi Tahun 2018



Sumber: Dinas Kehutanan Prov.Jambi, 2019

Gambar 3-34 Perkembangan Jumlah Hot spot di Provinsi Jambi



Sumber: kementerian LHK, 2019

Gambar 3-35 Luas Lahan dan Hutan terbakar di Provinsi Jambi Tahun 2014-2018

Sumber daya alam bukan hanya hutan, namun semua komponen yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup

manusia agar dapat bertahan hidup dan lebih sejahtera. Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya alam merupakan salah satu modal besar yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dibalik dampak ekonomi yang positif, bila tidak dilakukan pengelolaan yang benar maka dampak yang ditimbulkan terutama yang berhubungan dengan lingkungan dan sosial akan buruk bagi generasi mendatang.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan IKLH, Pemerintah Provinsi Jambi juga berkewajiban untuk mengelola sumber daya alam di provinsi Jambi dengan baik dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi dan mengurangi seminimal mungkin dampak lingkungan yang akan diakibatkan. Salah satunya adalah pelaksanaan aktivitas pertambangan secara baik dan benar (*good mining practice*). Hal ini dianggap penting karena permasalahan umum tambang di Indonesia adalah kerusakan lingkungan akibat pengelola tambang meninggalkan lahan tambang begitu saja setelah tidak produktif lagi.

*Good mining practice* adalah suatu kegiatan pertambangan yang mentaati aturan, terencana dengan baik, menerapkan teknologi yang sesuai dan berlandaskan pada efektivitas dan efisiensi, mengendalikan dan memelihara fungsi lingkungan, menjamin keselamatan kerja, mengakomodir keinginan dan partisipasi masyarakat, menghasilkan nilai tambah, meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat sekitar serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa ciri *good mining practice* antara lain:

1. Penerapan prinsip konservasi dan nilai lindung lingkungan
2. Kepedulian terhadap K3 (kesehatan dan keselamatan kerja) terutama bagi pekerjanya
3. Menciptakan nilai tambah bagi pengembangan wilayah dan masyarakat sekitar
4. Kepatuhan terhadap hukum dan perundangan yang berlaku
5. Menggunakan standarisasi keteknikan dan teknologi pertambangan yang tepat dalam aktifitasnya
6. Pengembangan potensi dan kesejahteraan masyarakat setempat terutama dari optimalisasi dan konversi pemanfaatan mineral

7. Menjamin keberlanjutan kegiatan pembangunan setelah periode pasca tambang
8. Memberikan benefit yang memadai bagi investor

Provinsi Jambi merupakan Provinsi yang memiliki cukup banyak kekayaan sumberdaya alam ESDM. Pengusahaan pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Jambi berkembang dengan pesat, hal ini ditandai dengan banyaknya izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batubara yang telah diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Sebagian besar pengusahaan pertambangan yang ada merupakan pertambangan batubara, sedangkan sebagian lagi mengusahakan bijih besi, emas dan kuarsa.

Kondisi bulan November Tahun 2018 Kegiatan Usaha Pertambangan Komoditi Logam dan Batuan di Provinsi Jambi sebanyak 152 IUP, 25 dalam tahap Ekplorasi dan 127 dalam tahap Operasi Produksi. Selain Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Jambi juga terdapat 3 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Untuk komoditi Non Logam dan Batuan di Provinsi Jambi terdapat sebanyak 73 IUP, 5 dalam tahap Eksplorasi dan 68 dalam tahap Operasi Produksi. Untuk Produksi Batubara di Provinsi Jambi dihasilkan oleh Kabupaten Bungo, Tebo, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Batanghari dan Muaro Jambi.

Tabel 3.30 Data PKP2B di Provinsi Jambi

NO	NAMA PERUSAHAAN	TAHAP KEGIATAN	BAHAN GALIAN	LOKASI
1	PT. KARYA BUMI BARATAMA	EKSPLORASI	BATUBARA	SAROLANGUN
2	PT. SARWA SEMBADA KARYA BUMI	EKSPLORASI	BATUBARA	SAROLANGUN DAN BATANGHARI
3	PT. INTIRTA PRIMA SAKTI	EKSPLORASI	BATUBARA	SAROLANGUN DAN BATANGHARI

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2019

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa salah satu ciri *good mining practice* adalah Kepatuhan terhadap hukum dan perundangan yang berlaku. Salah satu peraturan perundangan yang harus dipatuhi oleh perusahaan minerba adalah pembayaran *landrent* dan *royalti*. Ketentuan mengenai pembayaran *landrent* dan *royalti* diatur di dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. *Landrent* dan *royalti* dibayar ke Pemerintah Pusat melalui KPPN dalam bentuk Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang selanjutnya dikembalikan ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil, yang disalurkan sesuai dengan bagiannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang dana perimbangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Pertambangan di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.31 Realisasi PNBP bidang pertambangan tahun 2011-2018

<b>TAHUN</b>	<b>LANDRENT (Rp)</b>	<b>ROYALTI (Rp)</b>	<b>TOTAL (Rp)</b>
2011	6.624.870.897	72.800.086.703	79.424.957.600
2012	13.911.967.978	75.904.540.173	89.816.508.151
2013	7.375.299.644	65.339.135.029	72.714.434.673
2014	10.262.610.504	50.761.328.971	61.023.939.475
2015	7.114.247.137	125.563.045.607	132.677.292.744
2016	9.092.919.751	67.743.426.059	76.836.345.810
2017	7.239.762.338	140.779.037.625	148.018.799.963
2018	239.040.332.176	10.078.597.951	249.118.930.127

*Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2019*

*Ket: \*per November 2018*

Tabel 3.32 Jumlah Produksi Batubara dan Bijih Besi

<b>Jumlah Produksi Batubara dan Bijih Besi di Provinsi Jambi</b>		
<b>Tahun</b>	<b>Batubara (Ton)</b>	<b>Bijih Besi (Ton)</b>
2009	2.690.971	213.276
2010	4.175.424	305.081
2011	7.760.173	527.096
2012	7.118.038	116.401
2013	7.737.549	148.657
2014	7.797.961	30.003
2015	6.091.553	-
2016	5.573.672	-
2017	3.065.114	-
2018*	5.971.920	-

*Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2018*

*Ket: \*s.d Oktober 2018*

Tabel di atas memperlihatkan peningkatan PNBPN dari sektor pertambangan di Provinsi Jambi yang cukup signifikan seiring peningkatan jumlah produksi. Hal ini seiring pula dengan perbaikan harga komoditi dunia.

Pemantauan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan tanpa diikuti oleh aktivitas pemantauan tidak akan banyak berarti. Hal ini merupakan upaya untuk mengetahui sejauhmana dampak aktivitas pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengukur kualitas lingkungan di wilayah Provinsi Jambi khususnya kualitas air sungai lintas Kabupaten/Kota dan kualitas udara ambien di Wilayah Provinsi Jambi.

Pada Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan pemantauan kualitas air pada 7 sungai dalam Provinsi Jambi yaitu Batang Hari, Batang Merangin, Batang Tembesi, Batang Tebo, Batang Tabir, Batang Sumay, Batang Limun dengan 14 titik sampel dan dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun. Berdasarkan analisa terhadap data hasil uji menggunakan Metode Indeks Pencemar (IP), status mutu air untuk baku mutu adalah cemar ringan.

Program-program yang dilakukan pada tahun 2018 untuk mencapai sasaran strategis ini adalah:

1. Program Pembinaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara
2. Program Penyelidikan, Pembinaan, Mitigasi dan Pelayanan Geologi
3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
4. Program : Perlindungan dan Konservasi SDA
5. Program Pemanfaatn Potensi Sumber Daya Hutan
6. Program Perencanaan dan Pengembangan hutan
7. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
8. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

**Permasalahan:**

1. Pengaruh iklim masih sangat berpengaruh dengan jumlah kejadian Kebakaran hutan dan lahan, dimana pada saat terjadi kemarau yang panjang maka kebakaran hutan dan lahan akan meningkat
2. Kesadaran masyarakat dan korporasi untuk tidak melakukan pembakaran pada saat pembukaan lahan mulai tumbuh namun belum optimal.
3. Pembinaan dan pengawasan belum menyentuh seluruh Izin Usaha Pertambangan mineral dan batubara
4. Kualitas air yang menunjukkan kualifikasi buruk akibat cemar berat di beberapa titik di Sungai Batanghari perlu penanganan serius mengingat Sungai Batanghari merupakan sumber air baku utama bagi perusahaan air minum yang beroperasi di Provinsi Jambi

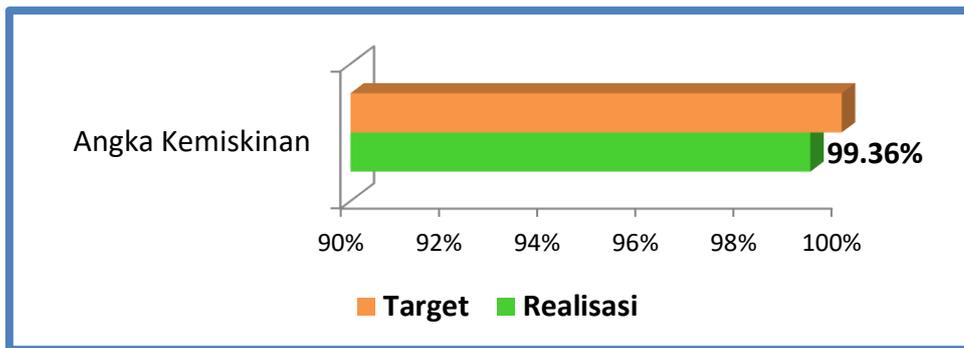
## **Solusi:**

1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara
2. Insentif bagi perusahaan yang taat dan disinsentif bagi perusahaan yang melanggar aturan perundang-undangan harus diterapkan dengan jelas, dan bila memungkinkan pencabutan izin sementara bagi perusahaan yang telah melanggar berkali-kali.
3. Penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan.
4. Pengelolaan lingkungan secara baik dan benar bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun merupakan tanggung jawab seluruh stake holder. Oleh sebab itu upaya-upaya peningkatan kesadaran masyarakat sebagai upaya preventif harus terus dilakukan seiring dengan upaya-upaya perbaikan kualitas lingkungan.

### ***Sasaran Strategis 12***

#### ***Menurunnya Angka Kemiskinan***

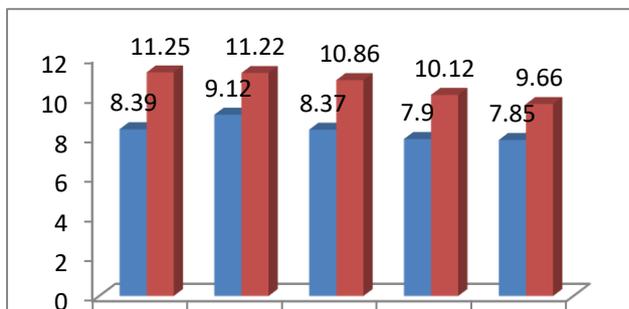
Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang telah lama menjadi isu sentral. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi antara lain kelebihan penduduk, tidak meratanya distribusi sumberdaya ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup dan standar hidup yang tinggi, pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak memadai, dan degradasi lingkungan. Pada banyak kasus, penyebab dan dampak kemiskinan saling berinteraksi, jadi apa yang membuat penduduk miskin juga menciptakan kondisi yang membuat mereka tetap miskin. Kemiskinan bisa menjadi penghambat pembangunan di masa mendatang yang akan berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Capaian sasaran strategis menurunnya angka kemiskinan ditunjukkan oleh indikator angka kemiskinan, dan capaian tahun 2018 terhadap indikator tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3-36 Capaian sasaran strategis menurunnya angka kemiskinan

### 1. Angka Kemiskinan

Batas yang digunakan untuk pengelompokan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin adalah garis kemiskinan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan selama periode Maret-september 2018 naik sebesar 0,98 persen, yaitu dari Rp426.251,- per bulan pada Maret 2018 menjadi Rp430.435,- per kapita perbulan pada September 2018. Dengan memperhatikan komponen garis kemiskinan yang terdiri dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan, terlihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan) Besarnya sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan pada September 2018 sebesar 76,65%.



Sumber: BPS, 2018

Gambar 3-37 Angka kemiskinan Provinsi Jambi dibandingkan nasional

Berdasarkan Berita Resmi yang diekspos BPS, Angka kemiskinan Provinsi Jambi tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun 2017, sebagaimana terlihat pada gambar disamping. Tingkat capaian indikator ini adalah sebesar 99,36%, atau masuk **kategori sangat tinggi**

dan bila dibandingkan dengan target akhir maka capaiannya telah mencapai 93,91% dan juga termasuk kategori sangat tinggi.

Tabel 3.33 Capaian Indikator angka kemiskinan Provinsi Jambi

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2018
	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017	2018				
					Target	Realisasi	% capaian		
Angka kemiskinan	8,39	9,12	8,37	7,9	7,8	7,85	99,36	7,4	93,91

Sumber: BPS, 2018

Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari tingkat kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan adalah indeks kealaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Pada periode maret-september 2018, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan mengalami penurunan. **Indeks kedalaman kemiskinan turun dari 1,302 pada Maret 2018 menjadi 1,256 pada September 2018.** Demikian pula **indeks keparahan kemiskinan, turun dari 0,322 menjadi 0,309 pada periode yang sama.** Penurunan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin mengecil.

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2018 untuk menurunkan angka kemiskinan adalah mengurangi tingkat kemiskinan pada masyarakat petani, Pemerintah Provinsi Jambi juga melakukan

beberapa hal yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas, stabilitas harga di tingkat petani dan pemberian jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin. Peningkatan produktivitas dilakukan dengan meningkatkan layanan irigasi, pemberian pupuk bersubsidi, pemberian penyuluhan, pemberian saprodi, dan lain-lain. Sedangkan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani, salah satunya dengan meningkatkan kondisi jalan yang menuju ke sentra produksi karena kondisi jalan yang buruk mempengaruhi biaya produksi dan transportasi yang harus ditanggung petani.

Demikian pula pada nelayan dan masyarakat lainnya. Pada dasarnya hampir seluruh program yang bersentuhan dengan masyarakat merupakan upaya pengurangan kemiskinan di Provinsi Jambi. Beberapa program yang dilaksanakan pada tahun 2018 untuk menudukung indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, pemasaran hasil dan investasi pertanian
2. Program pengembangan usaha peternakan
3. Program pengembangan perikanan budidaya
4. Program pengembangan perikanan tangkap
5. Program lingkungan sehat perumahan dan permukiman
6. Program pemberdayaan masyarakat perdesaan
7. Program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
8. Program perlindungan, pelayanan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
9. Program pembinaan, perlindungan, pemberdayaan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS
10. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

**Permasalahan:**

1. Kondisi perekonomian yang tidak menentu yang dapat menyebabkan inflasi tinggi merupakan salah satu faktor kerawanan peningkatan angka kemiskinan, karena masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan sangat mudah kembali menjadi miskin akibat keadaan ini.

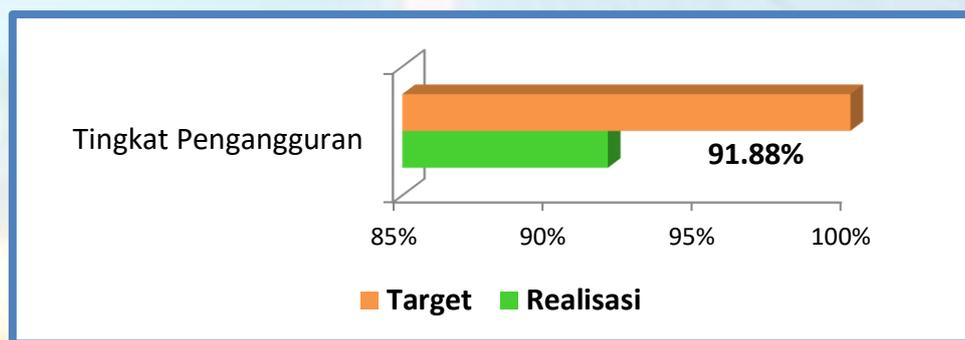
**Solusi:**

1. Menjaga stabilitas harga yang mampu diintervensi oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengurangi inflasi
2. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian

### **Sasaran Strategis 13**

#### **Menurunnya Angka Pengangguran**

Permasalahan pengangguran merupakan masalah yang dihadapi oleh setiap daerah di negara berkembang. Permasalahan ini timbul akibat jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja, ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan dengan kebutuhan kualifikasi tenaga kerja yang tersedia serta penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Capaian sasaran menurunnya angka pengangguran ditunjukkan oleh indikator tingkat pengangguran terbuka dan capaian pada tahun 2018 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3-38 Capaian sasaran menurunnya angka pengangguran

#### **1. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Perluasan kesempatan kerja merupakan upaya untuk mengembangkan sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja. Usaha penyerapan tenaga kerja tidak lepas dari faktor yang mempengaruhinya seperti jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, tingkat produktifitas tenaga kerja dan kebijakan pemerintah dalam hal penyerapan tenaga kerja itu sendiri.

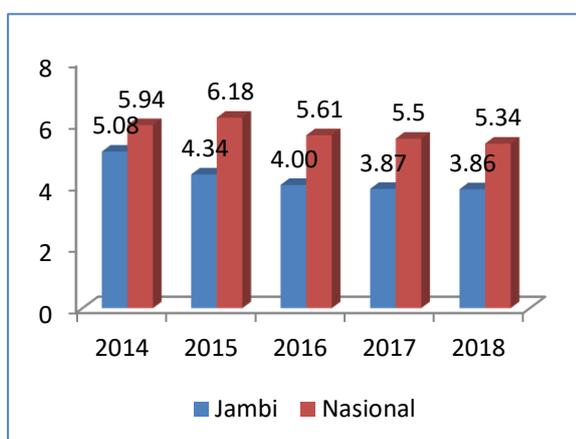
Tabel 3.34 Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja						Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2018
	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017	2018			
					Target	Realisasi		
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,08	4,34	4,0	3,87	3,57	3,86	91,88%	62,14

Sumber: BPS, 2018

Ket: TPT Bulan Agustus

Tabel capaian indikator TPT diatas memperlihatkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Jambi terus membaik setiap tahunnya. TPT Tahun 2018 sebesar 3,86 % atau terjadi penurunan 0,01% dibandingkan kondisi tahun 2016 dan terealisasi sebesar 91,88% (**sangat tinggi**). Bila dibandingkan dengan target akhir pada tahun 2021, maka capaian ini masih dalam kategori rendah karena baru mencapai 62,14% dari target sebesar 2,8%. Namun demikian, TPT Provinsi Jambi dalam 5 tahun terakhir selalu berada di bawah TPT nasional yang artinya capaian indikator TPT di Provinsi Jambi masih lebih baik dibandingkan nasional dan beberapa daerah lainnya.



Sumber: BPS, 2018  
 Gambar 3-39 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jambi dibanding nasional (Agustus)

Kondisi ketenagakerjaan dirilis oleh BPS 2 kali setahun, yaitu pada Bulan Februari dan Agustus. Keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Jambi pada Agustus 2018 menunjukkan adanya penurunan jumlah angkatan kerja sebanyak 55.993 orang dibanding Februari 2018 dan bertambah 65.804 orang dibanding Agustus 2017. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jambi Agustus 2018 adalah sebesar 68,46% atau memperlihatkan peningkatan sebesar 0,94 % dibanding

Agustus 2017 yang menunjukkan data sebesar 67,52%. Kenaikan TPAK memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja. Bila dilihat tren sektoral selama Agustus 2017 – Agustus 2018, sektor-sektor yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja terutama pada sektor perdagangan, sektor pertambangan, jasa perusahaan, sektor konstruksi dan real estate, sektor industri, listrik, gas dan air, serta sektor jasa keuangan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk menurunkan TPT antara lain melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja tentang kewirausahaan produktif, produktivitas tenaga kerja; kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja berbasis kompetensi (PBK) dan berbasis masyarakat; pemagangan dalam dan luar negeri, Pengembangan Kesempatan Kerja Dalam dan Luar Negeri; Perluasan Kesempatan Kerja Sektor Informal bagi Masyarakat Melalui Pembentukan Kelompok Wirausaha Baru (WUB); Pengembangan Masyarakat Melalui Terapan Teknologi Tepat Guna; pengembangan kesempatan kerja dalam dan luar negeri; serta sertifikasi tenaga kerja konstruksi.

Langkah yang perlu diperhatikan dalam Peningkatan Jumlah tenaga kerja yang dilatih adalah peranan para pelaku jasa konstruksi dan dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah/swasta. Selain faktor tersebut, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 guna mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran tidak dapat diabaikan begitu saja karena program dan kegiatan dimaksud memberikan andil yang besar.

Adapun program yang mendukung indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas
2. Program Pemberdayaan Tenaga Kerja
3. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi.
4. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan
5. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

#### **Permasalahan:**

1. TPT di Provinsi Jambi didominasi oleh tenaga kerja dengan pendidikan menengah kejuruan dan tenaga kerja yang paling banyak terserap adalah tenaga

kerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah yang berarti penduduk bekerja masih didominasi oleh penduduk bekerja dengan gaji rendah.

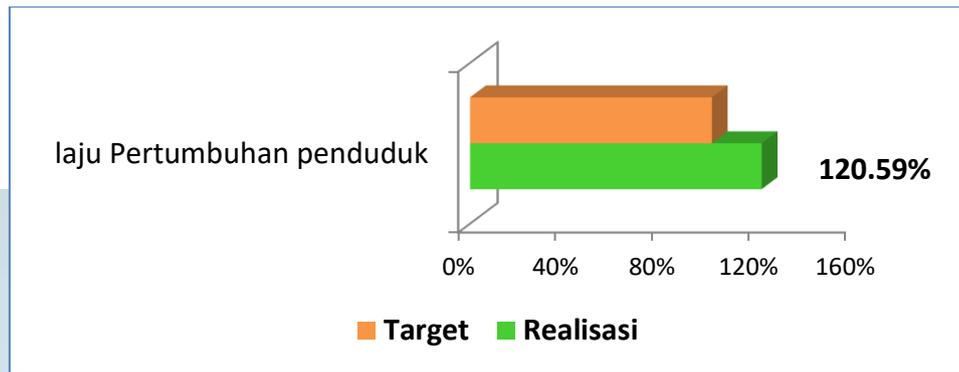
**Solusi:**

1. Meningkatkan kapasitas pendidikan para pencari kerja, sehingga dapat bersaing dengan orang lain dan mendapatkan gaji yang lebih tinggi
2. Upaya lain yang perlu dilakukan untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas tenaga kerja (SDM) antara lain :
  - Menyiapkan tenaga ahli dan trampil dengan menyiapkan pendidikan formal bagi masyarakat.
  - Mengadakan latihan-latihan atau job training bagi tenaga kerja agar memiliki kemampuan kerja yang baik.
  - Mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk memluas ilmu pengetahuan dan ketrampilan serta menimba pengalaman kerja.

***Sasaran Strategis 14***

***Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk***

Permasalahan kependudukan yang terkait dengan banyaknya jumlah penduduk menjadi sebuah masalah yang tidak dapat dihindarkan dan menjadi salah satu masalah yang sangat menarik perhatian pemerintah untuk segera diatasi. Kependudukan berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Perkembangan kependudukan adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Pencapaian sasaran terkendalnya laju pertumbuhan penduduk diukur dari indikator laju pertumbuhan penduduk dengan target dan realisasi sebagai berikut:



Gambar 3-40 Capaian sasaran terkendalnya laju pertumbuhan penduduk

## 1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pada umumnya, masalah yang dialami negara berkembang adalah masalah pertumbuhan penduduk yang berlebih. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali tentu akan menimbulkan banyak pengaruh dalam kehidupan. Problem yang akan dihadapi akibat meningkatnya penambahan penduduk adalah pangan, energi, dan papan. Dari sisi kebutuhan pangan, setiap kenaikan jumlah penduduk akan menaikkan pula kebutuhan pangan. Begitu pula kebutuhan energi, pertumbuhan penduduk akan menyedot energi besar, sementara ketersediaan energi makin menipis. Tak terkecuali masalah papan atau perumahan yang harus disediakan dalam jumlah besar. Masalah ini tentunya akan berujung pada naiknya tingkat pengangguran, kemiskinan, angka kriminalitas dan lain-lain.

Berbagai cara dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini. seperti transmigrasi, program Keluarga Berencana (KB), meningkatkan standar pendidikan bangsa, serta melakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait masalah ini. Pertumbuhan penduduk penting, tetapi dibatasi. Kita perlu sadar bahwa daya dukung sumber daya alam terbatas, sehingga jika jumlah penduduk tidak terkendali akan menjadi problem besar di masa depan. Prinsipnya. Pertumbuhan harus dibatasi, dan setiap lapisan masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi masalah ini. karena dengan pertumbuhan yang terkendali akan mempermudah pemerintah mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera.

Tabel 3.35 Capaian indikator Laju Pertumbuhan Penduduk

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja						Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2018	
	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017	2018				
					Target	Realisasi			% capaian
Laju Pertumbuhan Penduduk	1,88	1,85	1,8	1,67	2,04	1,62	120,59 %	1,82	110,99%

Sumber: Jambi Dalam Angka Tahun 2018, BPS, 2018

Tabel di atas memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2018 (data tahun 2017) adalah sebesar 1,62. Angka ini melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 2,04 atau terealisasi sebesar 120,59% dengan kategori capaian termasuk dalam kategori **sangat tinggi**. Bila dibandingkan dengan target akhir pada tahun 2021, capaian ini juga telah melebihi target akhir yang ditetapkan sebesar 1,82 atau terealisasi 110,99% dengan kategori capaian sangat tinggi.

Tercapainya target indikator ini tidak terlepas dari upaya berbagai pihak terkait dalam menggalakkan program KB. Adapun program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2018 untuk mendukung capaian indikator ini adalah **Program Pengendalian Penduduk**. Bila dilihat dari komposisi usia penduduk, terlihat bahwa sebagian besar masyarakat Provinsi Jambi berada di usia produktif, dan oleh karena itu bila tidak diantisipasi maka akan terjadi lonjakan penduduk yang cukup signifikan.

**Permasalahan:**

1. Jumlah penduduk terbesar di Provinsi Jambi adalah penduduk usia produktif, bila tidak dilakukan langkah-langkah antisipatif untuk menekan laju pertumbuhan penduduk alamiah maka akan terjadi lonjakan penduduk yang tidak terkendali di Provinsi Jambi yang pada akhirnya memberikan banyak dampak negatif.

**Solusi:**

1. Program Keluarga Berencana harus terus digalakkan, dan diimbangi dengan peningkatan pendidikan masyarakat sehingga kesadaran akan dampak buruk pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi dapat tersosialisasi dengan baik.

2. Bila laju pertumbuhan penduduk alamiah dapat ditekan melalui program KB, faktor migrasi penduduk tidak bisa dibatasi dengan mudah. Oleh karena itu, langkah antisipatif untuk mengurangi dampak buruk penambahan penduduk lewat migrasi adalah dengan menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang diiringi dengan penyediaan pendidikan yang berkualitas.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Persentase realisasi anggaran belanja langsung pada tahun 2018 adalah sebesar 84,07% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Persentase realisasi anggaran yang mendukung sasaran-sasaran strategis adalah sebesar 83,69%. Persentase realisasi terkecil berada pada sasaran strategis menurunnya angka kemiskinan dan realisasi terbesar berada pada sasaran strategis meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan. Beberapa hal yang menyebabkan realisasi yang kecil adalah pelaksanaan kegiatan-kegiatan berbasis masyarakat yang membutuhkan waktu lebih lama baik dalam penyiapan administrasi dan hal-hal lainnya, sehingga anggaran yang telah disediakan tidak terserap optimal. Rincian realisasi anggaran tiap sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.36 Realisasi belanja langsung per sasaran Tahun 2018

No	Sasaran	Anggaran	Realisasi	%
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas	65.700.021.278,00	61.717.555.427,00	93,94
2	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	472.880.174.493,00	428.867.362.747,00	90,69

No	Sasaran	Anggaran	Realisasi	%
3	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	3.665.473.290,00	3.623.312.220,00	99,12
4	Terwujudnya ketertiban umum daerah	56.248.087.243,00	49.063.995.113,00	87,23
5	Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)	9.359.777.643,00	8.734.830.172,00	93,32
6	Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah	26.050.727.557,00	18.390.717.228,00	70,59
7	Meningkatnya ketahanan pangan	14.353.624.327,00	13.818.434.779,00	96,27
8	Terciptanya akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian	614.760.665.800,00	482.647.396.801,00	78,51
9	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik	3.794.671.650,00	3.135.030.140,00	82,62
10	Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi	42.339.083.000,00	35.665.136.731,00	84,24
11	Meningkatnya kualitas pengelolaan	33.109.759.480,00	24.791.640.409,00	74,88

No	Sasaran	Anggaran	Realisasi	%
	sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan			
12	Menurunnya angka kemiskinan	47.398.110.737,00	31.642.173.023,00	66,72
13	Menurunnya angka pengangguran	6.064.543.750,00	5.971.367.302,00	98,46
14	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	457.788.000,00	443.590.600,00	97,97
<b>Jumlah</b>		<b>1.396.167.508.248,00</b>	<b>1.168.494.542.692,00</b>	<b>83,69</b>
<b>Total Belanja Langsung</b>		<b>2.110.526.806.715,00</b>	<b>1.774.448.036.157,28</b>	<b>84,07</b>

Sumber: Badan Keuangan Daerah (unaudited, diolah), 2019

Tabel 3.37 Realisasi Anggaran dibandingkan dengan Realisasi Kinerja

No	Sasaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja	%
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas	93,94	100	106,45
2	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	90,69	99,28	109,47
3	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	99,12	102,06	102,97

No	Sasaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja	%
4	Terwujudnya ketertiban umum daerah	87,23	98,83	113,30
5	Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)	93,32	38,33	41,07
6	Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah	70,59	84,09	119,12
7	Meningkatnya ketahanan pangan	96,27	106,63	110,76
8	Terciptanya akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian	78,51	99,36	126,56
9	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik	82,62	104,72	126,75
10	Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi	84,24	90,45	107,37
11	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan	74,88	101,22	135,18
12	Menurunnya angka kemiskinan	66,72	99,36	148,92
13	Menurunnya angka pengangguran	98,46	91,88	93,32
14	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	97,97	120,59	123,09
<b>JUMLAH</b>		<b>86,75</b>	<b>95,49</b>	<b>111,74</b>

### EFEKTIVITAS PENGGUNAAN

Bila realisas anggaran dibandingkan dengan kinerja yang dicapai tahun 2018, dimana realisasi anggaran sebesar 83,69% dan capaian kinerja sebesar 95,14%, maka terlihat adanya efektivitas penggunaan anggaran pada tahun 2018.

# BAB IV

## PENUTUP

4

Laporan Kinerja (LKj) merupakan pengejawantahan manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Pemerintah Provinsi Jambi juga menjadi makna strategis sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Jambi. Dalam kaitannya dengan kedudukan sebagai Pemerintah Provinsi Jambi, LKj juga menjadi bagian dari pertanggung-jawaban tugas dan fungsi baik sebagai daerah otonom maupun sekaligus sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2018), namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RPJMD. Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2018 merupakan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi tahun 2016-2021. Keberhasilan yang dicapai semata-mata adalah berkat kerjasama, partisipasi dan komitmen seluruh komponen pemerintah daerah dan masyarakat yang diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan, sehingga target Jambi TUNTAS 2021 dapat terwujud. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung dengan upaya-upaya yang lebih baik oleh berbagai pihak.

Secara umum, sebagai pelaksanaan tahun kedua periode RPJMD Tahun 2016-2021, kinerja Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2018 adalah sangat baik, karena 12 indikator memenuhi kriteria sangat baik, 2 indikator memenuhi kriteria tinggi, dan

*Bab IV Berisi:  
Simpulan Umum atas Capaian  
Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi*

hanya 1 indikator dengan kriteria sangat rendah. Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa upaya maksimal telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah.

Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD dan RKPD 2018, yang mencakup juga penentuan program/ kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/ kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk. Pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk perencanaan yang dikenal sebagai e-planning adalah bagian dari upaya penyelesaian masalah-masalah pembangunan melalui intervensi program/ kegiatan yang berbasis data dan terfokus. Begitu juga pengembangan sistem pengendalian berbasis teknologi informasi melalui link laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan (lppk) dan penilaian akuntabilitas kinerja melalui e-sakip.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Jambi ke depan. **Pertama**, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Peran Pemerintah Provinsi Jambi diperlukan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap warga negara, dengan menjadi fasilitator dan katalisator atas berbagai inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam pembangunan. Ini juga mencakup pentingnya perlindungan dan peningkatan inklusi sosial bagi kelompok-kelompok marjinal yang masih menghadapi ketimpangan akses dan manfaat pembangunan.

**Kedua**, hal ini juga bisa diartikan, pentingnya koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan berbagai unsur baik Pemerintah/ Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jambi, daerah yang berbatasan dengan Provinsi Jambi maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah. Tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Bagi instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas, kreatifitas, inovasi, dan

komitmen yang kuat dalam upaya mencapai kinerja yang akuntabel sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

**Ketiga**, Inovasi menjadi penting bagi pemerintah Provinsi Jambi. Perubahan-perubahan kebijakan yang tiba-tiba terutama terkait dengan penghematan anggaran, menuntut adanya inovasi dalam mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, sehingga kekurangan anggaran bukan lagi menjadi persoalan yang penting yang menghambat pembanguana di Provinsi Jambi.

**Keempat**, sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.



# PEMERINTAH PROVINSI JAMBI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letjen. M.T. Haryono No. 02 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317  
JAMBI – 36122

## PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi untuk Tahun Anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Provinsi Jambi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jambi, 27 Maret 2019

INSPEKTUR,



**Dr.H.Kailani, S.H., M.Hum**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601023 198902 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. H. FACHRORI UMAR, M.Hum**  
Jabatan : **Plt. GUBERNUR JAMBI**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jambi, Oktober 2018  
**Plt. GUBERNUR JAMBI,**

**Dr. H. FACHRORI UMAR, M.Hum**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
PROVINSI JAMBI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	CC
2.	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,5
3.	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64
4.	Terwujudnya ketertiban umum daerah	Indeks Demokrasi Indonesia	75
5.	Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)	Total Factor Productivity (TFP)	1,2
6.	Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah	Persentase <i>share</i> sektor Sekunder terhadap PDRB	20,5%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Meningkatnya ketahanan pangan	Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari)	3.212
8.	Terciptanya akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian	Jalan Provinsi dalam kondisi mantap	77,70%
9.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik	Rasio Elektrifikasi	93%
10	Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi	1. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	80%
		2. persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	78%
11	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,2
	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	7,80%
	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka	3,57%

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,04%

	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>
1	Program Pembangunan jalan dan jembatan	Rp 510.020.622.850,00
2	Program Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Rp 1.168.675.850,00
3	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp 4.408.614.800,00
4	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rp 389.060.000,00
5	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp 15.262.243.700,00
6	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp 5.430.218.000,00
7	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Rp 1.299.428.000,00
8	Program Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Perumahan	Rp 560.316.562,00
9	Program Pembinaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Rp 1.206.350.000,00
10	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Rp 12.534.652.986,00
11	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp 11.596.690.286,00
12	Program Pengawasan obat dan Makanan	Rp 83.421.000,00
13	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp 3.026.306.800,00
14	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp 3.710.386.600,00

	<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>
15	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ rumah Sakit jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	Rp	90.900.816.513,00
16	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ rumah Sakit jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	Rp	2.404.897.079,00
17	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Rp	128.015.000.000,00
18	Program pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Rp	10.414.112.801,00
19	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp	664.248.500,00
20	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp	2.374.199.700,00
21	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp	1.272.719.600,00
22	Program Peningkatan Kemitraan Pelayanan Kesehatan	Rp	91.424.600,00
23	Program Kesehatan Anak Balita	Rp	115.664.100,00
24	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Rp	98.109.100,00
25	Program Kesehatan Ibu dan Anak	Rp	393.533.700,00
27	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Rp	250.231.300,00
28	Program Peningkatan Balai Kesehatan	Rp	2.425.140.000,00
29	Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Rp	4.830.169.000,00
30	Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Rp	4.452.846.716,00
31	Program Pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan	Rp	1.364.190.450,00
32	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Rp	1.069.074.554,00
33	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp	22.759.686.517,17
34	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp	1.198.667.000,00
35	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Rp	525.000.000,00

	<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>
36	Program Perlindungan, Pelayanan, pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Rp	111.333.000,00
37	Program Pembinaan, Pemberdayaan, Rehabilitasi Bantuan dan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Rp	4.830.690.000,00
38	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp	1.790.388.800,00
39	Program Penanggulangan Pra Bencana	Rp	1.334.000.000,00
40	Program Penanggulangan Saat Bencana	Rp	627.348.500,00
41	Program Penanggulangan Bencana dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan	Rp	418.336.000,00
42	Program Penanggulangan Pasca Bencana	Rp	606.502.400,00
43	Program Rakor dan Pelatihan Teknis Kebencanaan	Rp	566.177.400,00
44	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan	Rp	1.719.694.000,00
45	Program Peningkatan Daya Saing KUMKM	Rp	921.852.000,00
46	Program Peningkatan Penguatan Usaha Koperasi	Rp	1.219.994.320,00
47	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp	865.320.000,00
48	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp	2.409.814.000,00
49	Program Pengembangan Standarisasi Nasional	Rp	822.027.000,00
50	Program Pengembangan Industri Agro dan Kimia	Rp	1.772.814.820,00
51	Program Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah	Rp	281.093.500,00
52	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp	861.900.000,00
53	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Rp	179.500.000,00
54	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian	Rp	454.063.500,00
55	Program Peningkatan Kualitas SDM Pertanian	Rp	1.277.830.463,00

	<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>
56	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Rp	1.236.100.923,00
57	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Rp	5.711.145.210,00
58	Program Peningkatan Produksi dan Teknologi Budidaya Perkebunan	Rp	14.861.500.337,00
59	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Pemasaran Produk Perkebunan	Rp	3.643.371.000,00
60	Program Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan	Rp	783.955.126,00
61	Program Peningkatan Produksi Peternakan	Rp	2.885.884.977,00
62	Program Pengembangan Usaha Peternakan	Rp	606.590.000,00
63	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	411.056.000,00
64	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp	3.581.032.080,00
65	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp	4.578.392.100,00
66	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Konservasi dan Pengelolaan Wilayah Pesisir	Rp	6.651.324.520,00
67	Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp	2.699.958.200,00
68	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Rp	964.755.640,00
69	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Rp	333.172.000,00
70	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Rp	9.559.572.000,00
71	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Rp	3.723.601.720,00
72	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp	3.253.534.000,00
73	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp	878.072.000,00
74	Program Peningkatan kualitas dan akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp	413.944.000,00

	<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>
75	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp	2.527.647.200,00
76	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rp	3.132.774.800,00
77	Program Pengembangan Kemitraan	Rp	1.044.202.000,00
78	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp	6.799.848.100,00
79	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	Rp	588.496.000,00
80	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Rp	171.118.000,00
81	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah	Rp	12.997.888.724,00
82	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Rp	1.099.462.300,00
83	Program Pengelolaan Kekayaan Daerah	Rp	4.485.727.027,00
84	Program Perwujudan Demokrasi yang Makin Kokoh	Rp	1.806.971.290,00
85	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp	1.096.766.613,00
86	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rp	638.213.950,00
87	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp	3.117.214.900,00
88	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rp	1.152.991.200,00
89	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Rp	920.945.580,00
90	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Kebakaran	Rp	344.443.300,00
91	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Rp	2.123.852.000,00
92	Program Pemberdayaan Tenaga Kerja	Rp	1.518.106.900,00
93	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp	1.176.742.000,00
94	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp	1.848.502.000,00

	<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>
95	Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp	1.063.867.500,00
96	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Rp	5.756.594.140,00
97	Program Pembangunan dan Pengembangan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rp	2.626.997.200,00
98	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Rp	2.626.805.300,00
99	Program Pembangunan, Pengembangan Aplikasi dan Telematika	Rp	868.744.000,00
100	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp	1.595.474.500,00
101	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp	1.586.279.250,00
102	Program Peningkatan peran Serta Kepemudaan	Rp	4.473.155.600,00
103	Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Rp	493.928.300,00
104	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Rp	9.929.657.000,00
105	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga dan Pemuda	Rp	3.718.291.200,00
106	Program Kebijakan dan Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan	Rp	424.912.500,00
107	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rp	3.293.577.500,00
108	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp	1.165.678.000,00
109	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Rp	1.559.225.300,00
110	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Rp	891.692.500,00
111	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	2.909.716.600,00
112	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp	1.538.642.900,00
113	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Rp	1.480.000.000,00
114	Program Perencanaan Pengembangan Kewilayahan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp	3.109.805.000,00

	<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>
115	Program Penataan, Perencanaan, dan Rekrutmen SDM Aparatur Berbasis Kompetensi	Rp	470.380.180,45
116	Program Promosi dan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka	Rp	805.962.500,00
117	Program Profesionalisasi PNS	Rp	1.731.874.730,00
118	Program Pelayanan Publik di Bidang Kepegawaian	Rp	405.878.100,00
119	Program peningkatan Kualitas Informasi Kepegawaian	Rp	360.976.400,00
120	Program Manajemen Pelayanan Kediklatan	Rp	318.213.000,00
122	Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Rp	5.929.348.600,00
123	Program Penelitian dan Pengembangan	Rp	1.736.490.750,00
124	Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan	Rp	843.735.450,00
125	Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah	Rp	582.107.500,00
126	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD	Rp	48.219.705.000,00
127	Program Pembinaan Pembangunan Ekonomi di Bidang Penanaman Modal, BUMN/BUMD dan Pendapatan Keuangan	Rp	499.324.950,00
128	Program Kehidupan Umat Beragama	Rp	6.846.744.062,00
129	Program Bidang Sosial dan Kemasyarakatan, Ketenagakerjaan serta Transmigrasi	Rp	1.957.114.154,00
130	Program fasilitasi Bidang pendidikan, kesehatan, Pemberdayaan perempuan, Keluarga berencana dan Kepemudaan	Rp	894.694.084,00
131	Program Perencanaan dan Penataan Peraturan Daerah Provinsi.	Rp	611.660.000,00
132	Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi	Rp	346.170.000,00
133	Program Advokasi Hukum dan HAM	Rp	793.250.000,00
134	Program Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	Rp	309.000.000,00

	<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>
135	Program Pembinaan, Fasilitas, Pelayanan dan Tatakelola Pemerintahan Serta Otonomi Daerah	Rp	1.099.916.150,00
136	Program Penataan Batas dan Wilayah Administrasi	Rp	610.006.000,00
137	Program Penghimpunan Data dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp	15.472.666.000,00
138	Program Reformasi Birokrasi	Rp	1.793.767.340,00
139	Program Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kerjasama	Rp	642.738.250,00
141	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	6.101.481.992,55
142	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp	452.788.000,00
143	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Rp	2.734.060.000,00

Jambi, Oktober 2018

**Plt. GUBERNUR JAMBI,**



**Dr. H. FACHRORI UMAR, M.Hum**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. H. FACHRORI UMAR, M.Hum**  
Jabatan : **Plt. GUBERNUR JAMBI**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jambi, Januari 2019  
**Plt.GUBERNUR JAMBI,**

**Dr. H. FACHRORI UMAR, M.Hum**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
PROVINSI JAMBI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	B
2.	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71
3.	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65
4.	Terwujudnya ketertiban umum daerah	Indeks Demokrasi Indonesia	76
5.	Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)	Total Factor Productivity (TFP)	1,3
6.	Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah	Persentase <i>share</i> sektor Sekunder terhadap PDRB	21%
7.	Meningkatnya ketahanan pangan	Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari)	3.213

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Terciptanya akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian	Jalan Provinsi dalam kondisi mantap	78,07%
9.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik	Rasio Elektrifikasi	94%
10	Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi	1. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	70%
		2. persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	80%
11	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,5
	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	7,7%
	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka	3,2%
	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,98%

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>
1. Program Pembangunan jalan dan jembatan	Rp.510.020.622.850,-
2. Program Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Rp. 1.168.675.850,-
3. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp. 4.408.614.800,-
4. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rp. 389.060.000,-
5. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp. 15.262.243.700,-
6. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp. 5.430.218.000,-
7. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Rp. 1.061.700.000,-
8. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Rp. 313.810.000,-
9. Program Pengendalian Daya Rusak Air, Pengendalian Banjir, dan Pengamanan Pantai	Rp. 54.032.008.400,-
10. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Rp. 24.504.992.200,-
11. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Rp. 46.193.128.100,-
12. Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Rp. 150.531.050,-
13. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Rp. 1.496.207.450,-
14. Program Pengawasan Jasa Konstruksi	Rp. 574.775.800,-
15. Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Rp. 1.321.703.800,-
16. Program Pembangunan PSU Perumahan & Permukiman di Pusat Kegiatan Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi	Rp. 11.788.269.200,-
17. Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman	Rp. 13.068.816.450,-
18. Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	Rp. 4.386.159.550,-
19. Program Evaluasi dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	Rp. 1.083.875.250,-
20. Program Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Perumahan	Rp. 700.184.500,-
21. Program Fasilitasi, Bantuan Teknis dan Sosialisasi Bid. Perumahan	Rp. 989.842.500,-
22. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Infrastruktur ke-PU-an	Rp. 25.201.570.000,-

23.	Program operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA	Rp. 7.024.953.215,-
24.	Program Kualitas pengelolaan SDA Terpadu	Rp. 3.108.017.985,-
25.	Program Pengembangan Energi	Rp. 1.839.356.000,-
26.	Program Penyelidikan, Pembinaan, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	Rp. 501.346.400,-
27.	Program Pembinaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Rp. 1.950.006.000,-
28.	Program Peningkatan Mutu dan keandalan Penyediaan Tenaga Listrik	Rp. 4.159.995.128,-
29.	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Rp. 15.473.344.950,-
30.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Rp. 46.347.696.729,-
31.	Program Pendidikan SMA	Rp. 66.377.816.610,-
32.	Program Pendidikan SMK	Rp. 86.181.595.844,-
33.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp. 9.089.125.494,-
34.	Program BOSDA dan Beasiswa	Rp.270.962.148.000,-
35.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp. 2.059.315.600,-
36.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 677.170.000,-
37.	Program Pengawasan obat dan Makanan	Rp. 155.561.400,-
38.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 1.028.040.679,-
39.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp. 1.950.014.800,-
40.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ rumah Sakit jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	Rp. 37.750.897.937,-
41.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ rumah Sakit jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	Rp. 1.500.000.000,-
42.	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Rp.110.000.000.000,-
43.	Program pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Rp. 4.037.607.948,-
44.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp. 516.397.400,-
45.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp. 2.889.831.900,-
46.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp. 4.269.094.627,-
47.	Program Peningkatan Kemitraan Pelayanan Kesehatan	Rp. 62.073.600,-
48.	Program Kesehatan Anak Balita	Rp. 48.421.100,-
49.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Rp. 62.628.100,-
50.	Program Kesehatan Ibu dan Anak	Rp. 427.280.600,-
51.	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Rp. 272.118.700,-
52.	Program Peningkatan Balai Kesehatan	Rp. 9.425.953.755,-
53.	Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Rp. 22.296.358.700,-

54.	Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Rp.	7.392.238.024,-
55.	Program Pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan	Rp.	1.205.031.850,-
56.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Rp.	931.935.400,-
57.	Program Alat Kesehatan dan perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Rp.	391.948.258,-
58.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp.	12.001.504.171,-
59.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp.	1.150.000.000,-
60.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Rp.	900.000.000,-
61.	Program Perlindungan, Pelayanan, pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Rp.	150.000.000,-
62.	Program Pembinaan, Pemberdayaan, Rehabilitasi Bantuan dan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Rp.	5.046.000.000,-
63.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp.	1.710.209.600,-
64.	Program Penanggulangan Pra Bencana	Rp.	1.120.680.000,-
65.	Program Penanggulangan Saat Bencana	Rp.	604.649.750,-
66.	Program Penanggulangan Bencana dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan	Rp.	625.493.950,-
67.	Program Penanggulangan Pasca Bencana	Rp.	389.841.400,-
68.	Program Rakor dan Pelatihan Teknis Kebencanaan	Rp.	576.312.400,-
69.	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan	Rp.	2.949.290.000,-
70.	Program Peningkatan Daya Saing KUMKM	Rp.	934.567.000,-
71.	Program Peningkatan Penguatan Usaha Koperasi	Rp.	1.588.246.000,-
72.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp.	828.465.000,-
73.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp.	2.134.528.500,-
74.	Program Pengembangan Standarisasi Nasional	Rp.	3.853.252.000,-
75.	Program Pengembangan Industri Agro dan Kimia	Rp.	1.459.050.000,-
76.	Program Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah	Rp.	177.220.000,-
77.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp.	728.305.500,-
78.	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Rp.	715.719.980,-
79.	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian	Rp.	387.469.000,-

80.	Program Peningkatan Kualitas SDM Pertanian	Rp.	1.705.682.901,-
81.	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Rp.	3.034.501.135,-
82.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Rp.	6.692.106.258,-
83.	Program Peningkatan Produksi dan Teknologi Budidaya Perkebunan	Rp.	15.536.649.310,-
84.	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Pemasaran Produk Perkebunan	Rp.	3.563.371.000,-
85.	Program Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan	Rp.	663.041.151,-
86.	Program Peningkatan Produksi Peternakan	Rp.	5.522.790.831,-
87.	Program Pengembangan Usaha Peternakan	Rp.	493.593.100,-
88.	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp.	353.390.000,-
89.	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp.	1.522.610.000,-
90.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp.	3.737.735.300,-
91.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Konservasi dan Pengelolaan Wilayah Pesisir	Rp.	4.302.564.600,-
92.	Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp.	4.236.877.300,-
93.	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Rp.	2.168.970.779,-
94.	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Rp.	1.656.948.528,-
95.	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Rp.	3.803.804.743,-
96.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Rp.	5.383.823.597,-
97.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp.	9.901.598.000,-
98.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp.	1.200.000.000,-
99.	Program Peningkatan kualitas dan akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp.	392.079.000,-
100.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp.	2.602.388.362,-
101.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rp.	4.024.112.693,-
102.	Program Pengembangan Kemitraan	Rp.	847.470.750,-
103.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp.	8.135.812.500,-
104.	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya	Rp.	643.746.000,-
105.	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Rp.	220.574.000,-

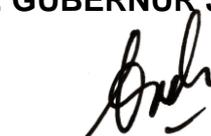
106	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah	Rp. 18.379.672.824,-
107	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Rp. 1.149.462.300,-
108	Program Pengelolaan Kekayaan Daerah	Rp. 7.654.500.000,-
109	Program Perwujudan Demokrasi yang Makin Kokoh	Rp. 1.635.880.000,-
110	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp. 982.368.000,-
111	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rp. 2.838.672.000,-
112	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp. 3.126.074.200,-
113	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rp. 959.493.400,-
114	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Rp. 865.803.000,-
115	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Kebakaran	Rp. 262.332.500,-
116	Program Kelembagaan dan Organisasi	Rp. 113.347.400,-
117	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Rp. 2.365.087.269,-
118	Program Pemberdayaan Tenaga Kerja	Rp. 1.515.807.002,-
119	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp. 1.235.905.142,-
120	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp. 2.202.680.000,-
121	Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp. 742.320.000,-
122	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Rp. 4.418.794.200,-
123	Program Pembangunan dan Pengembangan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rp. 1.891.342.000,-
124	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Rp. 2.229.609.800,-
125	Program Pembangunan, Pengembangan Aplikasi dan Telematika	Rp. 1.006.345.000,-
126	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp. 1.106.095.600,-
127	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp. 1.977.642.300,-
128	Program Peningkatan peran Serta Kepemudaan	Rp. 3.447.052.000,-
129	Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Rp. 166.350.338,-
130	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Rp.10.158.492.120,-
131	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga dan Pemuda	Rp. 4.416.865.624,-
132	Program Kebijakan dan Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan	Rp. 697.136.292,-
133	Program peningkatan Pengembangan tenaga	Rp. 622.364.270,-

	Organisasi Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan	
134	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rp. 8.828.250.000,-
135	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp. 1.177.350.000,-
136	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Rp. 1.340.650.000,-
137	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Rp. 1.003.480.163,-
138	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 3.420.241.600,-
139	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp. 1.517.923.000,-
140	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Rp. 1.780.000.000,-
141	Program Perencanaan Pengembangan Kewilayahan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp. 2.352.464.750,-
142	Program Penataan, Perencanaan, dan Rekrutmen SDM Aparatur Berbasis Kompetensi	Rp. 294.485.987,-
143	Program Promosi dan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka	Rp. 1.018.888.400,-
144	Program Profesionalisasi PNS	Rp. 1.384.384.640,-
145	Program Pelayanan Publik di Bidang Kepegawaian	Rp. 503.691.300,-
146	Program peningkatan Kualitas Informasi Kepegawaian	Rp. 332.946.700,-
147	Program Manajemen Pelayanan Kediklatan	Rp. 819.558.525,-
148	Program Sertifikasi Kompetensi dan pengembangan Kelembagaan	Rp. 1.198.361.800,-
149	Program Pengembangan Kompetensi teknis Inti	Rp. 1.300.200.000,-
150	Program pengembangan Kompetensi teknis Umum dan Fungsional	Rp. 1.487.594.500,-
151	Program Pengembangan kompetensi Manajerial	Rp. 5.057.116.975,-
152	Program Penelitian dan Pengembangan	Rp. 1.992.654.650,-
153	Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan	Rp. 1.085.080.650,-
154	Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah	Rp. 578.288.000,-
155	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD	Rp.47.383.172.000,-
156	Program Pembinaan Pembangunan Ekonomi di Bidang Penanaman Modal, BUMN/BUMD dan Pendapatan Keuangan	Rp. 531.939.650,-
157	Program Kehidupan Umat Beragama	Rp. 6.989.244.062,-
158	Program Bidang Sosial dan Kemasyarakatan, Ketenagakerjaan serta Transmigrasi	Rp. 2.126.114.154,-
159	Program fasilitasi Bidang pendidikan, kesehatan, Pemberdayaan perempuan, Keluarga berencana dan Kepemudaan	Rp. 657.718.084,-
160	Program Perencanaan dan Penataan Peraturan Daerah Provinsi.	Rp. 611.660.000,-

161	Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi	Rp.	446.710.000,-
162	Program Advokasi Hukum dan HAM	Rp.	821.500.000,-
163	Program Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	Rp.	309.000.000,-
164	Program Pembinaan, Fasilitasi, Pelayanan dan Tatakelola Pemerintahan Serta Otonomi Daerah	Rp.	989.924.535,-
165	Program Penataan Batas dan Wilayah Administrasi	Rp.	549.005.400,-
166	Program Penghimpunan Data dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp.	12.627.091.800,-
167	Program Reformasi Birokrasi	Rp.	1.722.800.400,-
168	Program Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kerjasama	Rp.	522.754.895,-
169	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	6.995.147.121,-
170	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Aparatur	Rp.	8.467.773.206,-
171	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp.	500.000.000,-
172	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Rp.	2.550.000.000,-
173	Program Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp.	467.102.800,-
174	Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik Daerah	Rp.	290.506.000,-
175	Program Pengembangan Koleksi, Layanan dan Pelestarian bahan Pustaka	Rp.	794.400.000,-
176	Program Pembinaan, Pengembangan Perpustakaan dan Kegemaran Membaca	Rp.	502.000.000,-
177	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Arsip	Rp.	431.000.000,-
178	Program Pelayanan, Pengolahan dan Akuisisi Arsip	Rp.	543.400.000,-

Jambi, Januari 2019

**Pt. GUBERNUR JAMBI,**



**Dr. H. FACHRORI UMAR, M.Hum.,**